

# Modul Teknis Fasilitator Destana

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



# Modul Teknis Fasilitator Destana

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

Edisi X 2021



Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputan Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

# Modul Teknis Fasilitator Destana

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

Edisi X 2001

## PENGARAH

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB  
Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

## PENANGGUNGJAWAB

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB  
Firza Ghosalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

## EDITOR

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

## PENYUSUN

Sigit Purwanto	Pujiono Centre
Sumino	LPTP Surakarta
Wahyu Heniwati	Daya Annisa / MDMC
Anggoro Budi Prasetyo	Aksara
Wana Kristanto	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Indra Baskoro Adi	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Muhammad Nur Ronggo Dinoyo	LPTP Surakarta
Gandar Mahojwala	KAPPALA Indonesia
Pudji Santosa	Lingkar
Gigih Aditya Pratama	KAPPALA Indonesia
Yugyasmono	Lingkar
Hadi Sutrisno	BNPB
Nurul Maulidhini	BNPB

## KONTRIBUTOR

Arif Fadli	BNPB
Virana Fatwa Nurmala	BNPB
Denadia Mutty	BNPB
Rahma Sari Puspita	BNPB
Riski Yufawinda	BNPB

318 halaman; 21cm x 29,7cm  
ISBN 978-623-5539-53-9

Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

# Daftar Isi

PENGANTAR

DAFTAR ISI

- Modul 1 Pengenalan Dasar Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana
- Modul 2 Pengkajian Risiko Bencana Partisipatif
- Modul 3 Pengembangan Sistem Peringatan Dini Inklusif
- Modul 4 Penyusunan Rencana Evakuasi
- Modul 5 Pengembangan Tim Relawan
- Modul 6 Pengembangan Forum PRB Desa/Kelurahan
- Modul 7 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan
- Modul 8 Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana
- Modul 9 Penyusunan Rencana Kontingensi Desa/Kelurahan
- Modul 10 Latihan Penanganan Darurat Bencana
- Modul 11 Advokasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan
- Modul 12 Keluarga Tangguh Bencana
- Modul 13 Satuan Pendidikan Aman Bencana
- Modul 14 Standar Pelayanan Minimal
- Modul 15 Teknik Fasilitasi

# Pengenalan Dasar Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



# **Pengenalan Dasar Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Risiko Bencana**

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

**2021**



**Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputian Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan



## **Modul Pengenalan Dasar Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Risiko Bencana**

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

### **PENGARAH**

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB  
Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

### **PENANGGUNGJAWAB**

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB  
Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

### **EDITOR**

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

### **PENYUSUN**

Sigit Purwanto	Pujiono Centre
Sumino	LPTP Surakarta
Wahyu Heniwati	Daya Annisa / MDMC
Anggoro Budi Prasetyo	Aksara
Wana Kristanto	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Indra Baskoro Adi	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Muhammad Nur Ronggo Dinoyo	LPTP Surakarta
Gandar Mahojwala	KAPPALA Indonesia
Pudji Santosa	Lingkar
Gigih Aditya Pratama	KAPPALA Indonesia
Yugyasmono	Lingkar
Hadi Sutrisno	BNPB
Nurul Maulidhini	BNPB

### **KONTRIBUTOR**

Arif Fadli	BNPB
Virana Fatwa Nurmala	BNPB
Denadia Mutty	BNPB
Rahma Sari Puspita	BNPB
Riski Yufawinda	BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

# Daftar Isi

<b>Pengantar</b> .....	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>4</b>
<b>A. Materi Pembelajaran</b> .....	<b>5</b>
A.1. Pengertian Bencana di Indonesia .....	5
A.2. Jenis Bencana di Indonesia .....	5
A.3. Jenis Ancaman .....	5
A.4. Penyelenggaraan PB Indonesia .....	6
A.5. Persetujuan Paris ( <i>Paris Agreement</i> ) .....	8
A.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Goals</i> ) .....	8
A.7. Kerangka Aksi Sendai untuk PRB ( <i>Sendai Framework for DRR</i> ) .....	10
<b>B. Praktik Pembelajaran</b> .....	<b>12</b>
B.1. Pengertian, konsep dan konteks bencana di Indonesia .....	12
B.2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia .....	12
B.3. Kebijakan PB/PRB Global .....	13
<b>Daftar Referensi</b> .....	<b>16</b>

# A. Materi Pembelajaran

## A.1. Pengertian Bencana di Indonesia

---

Pasal 1 ayat 1 UU 24/2007 menjelaskan: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

## A.2. Jenis Bencana di Indonesia

---

Pasal 1 ayat 2, 3 dan 4 UU 24/2007 menjelaskan:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror

## A.3. Jenis Ancaman

---

Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana (Psl 1 ayat 13 UPPB). Ancaman dapat berupa kejadian alamiah, hasil samping kegiatan manusia atau gabungan keduanya. Ancaman alamiah seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, wabah, hama, banjir dan longsor. Ancaman akibat hasil samping kegiatan manusia meliputi konflik sosial, pencemaran, kegagalan teknologi dan kecelakaan transportasi. Ancaman seperti banjir, longsor, wabah, hama, dan kecelakaan transportasi juga sering diartikan sebagai kombinasi antara peristiwa alamiah dan kesalahan manusia.

Tabel 1. Jenis dan ragam ancaman

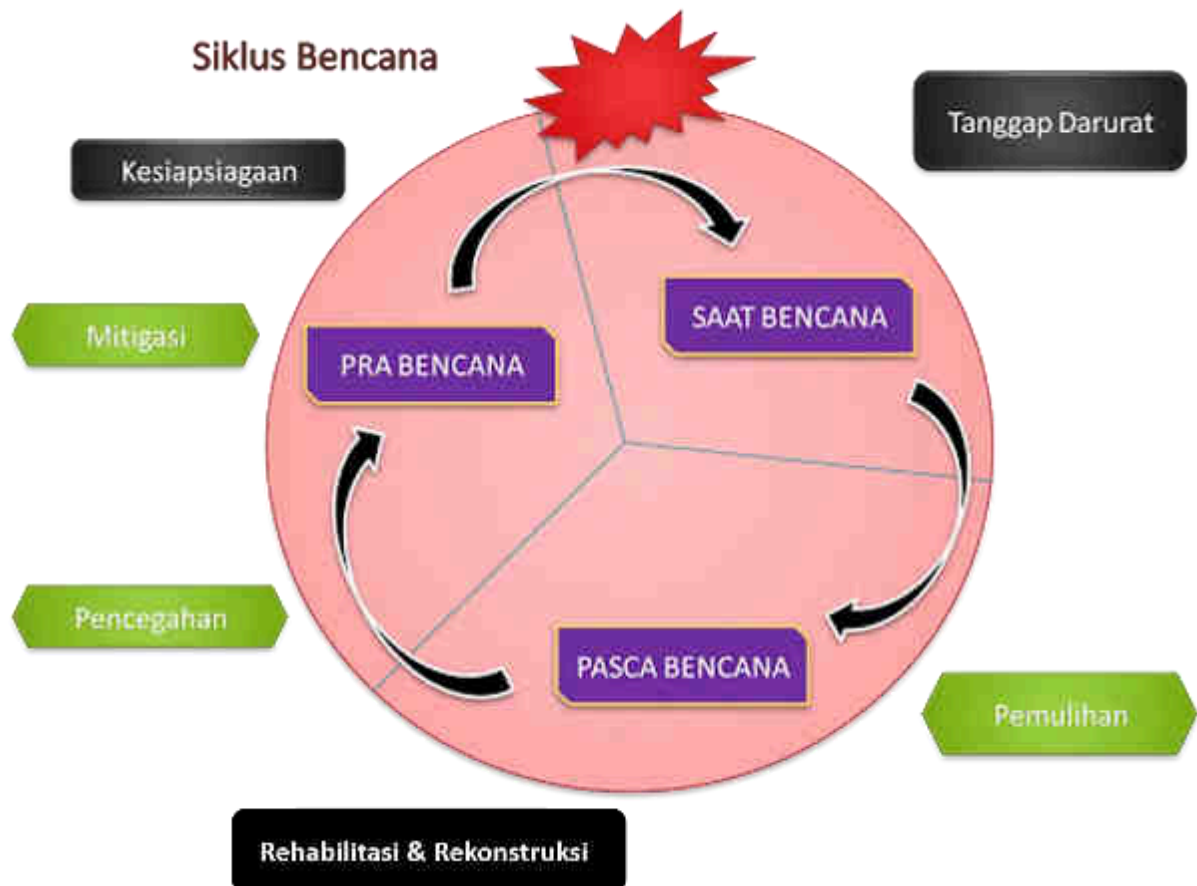
Jenis Ancaman	Ragam Ancaman
<i>Ancaman geologi</i>	<i>Gempa bumi, tsunami, longsor, gerakan tanah</i>
<i>Ancaman Hidro-meteorologi</i>	<i>Banjir, topan, banjir bandang, kekeringan</i>
<i>Ancaman biologi</i>	<i>Wabah, hama/penyakit tanaman, penyakit hewan</i>

Jenis Ancaman	Ragam Ancaman
<i>Ancaman kegagalan teknologi</i>	<i>Kecelakaan transportasi, pencemaran industri</i>
<i>Ancaman lingkungan</i>	<i>Kebakaran, kebakaran hutan, penggundulan hutan.</i>
<i>Ancaman sosial</i>	<i>Konflik, terorisme</i>

#### A.4. Penyelenggaraan PB Indonesia

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (Pasal 1, ayat 5, UU No 24/2007).

1. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
2. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
3. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
4. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.



Gambar 1. Siklus tahapan penanggulangan bencana

7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana

## A.5. Persetujuan Paris (*Paris Agreement*)

Persetujuan Paris merupakan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Bangsa Bangsa yang mengawal reduksi emisi karbon dioksida, yang berlaku mulai tahun 2020.

Tujuan persetujuan Paris

1. Menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat celcius dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat Celcius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim.
2. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan.
3. Membuat suplai finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.



## A.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPD) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.



Gambar 2.2. Ikon tujuan pembangunan berkelanjutan

#### 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun [7 target]
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan [8 target]
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia [13 target]
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang [10 target]
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan [9 target]
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang [8 target]
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang [5 target]
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang [11 target]
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi [8 target]
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara [10 target]
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan [10 target]
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan [11 target]

13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya [5 target]
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan [10 target]
15. Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati [12 target]
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan [12 target]
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan [19 target]

Komitmen Indonesia tercermin dalam 20 prioritas pembangunan nasional. Di bawah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan dengan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan, Indonesia memulai upaya-upaya intensif untuk mengintegrasikan SDGs lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan nasional dan subnasional dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk pembangunan berkesinambungan dan konsisten dengan konteks setempat.

1. Pembangunan Manusia, 2. Pertumbuhan Ekonomi, 3. Kependudukan & KB, 4. Pendidikan, 5. Kesehatan, 6. Gender, 7. Perlindungan Anak, 8. Pangan & Nutrisi, 9. Energi, 10. Maritim, 11. Infrastruktur, 12. Air & Sanitasi, 13. Lingkungan Hidup, 14. Ketidaksetaraan, 15. Pembangunan Perkotaan & Pedesaan, 16. Tata Kelola Pemerintahan, 17. Politik & Demokrasi, 18. Keamanan & Pertahanan, 19. Kemiskinan, dan 20. Kemitraan Global.

#### **A.7. Kerangka Aksi Sendai untuk PRB (*Sendai Framework for DRR*)**

---

Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana juga merupakan kesepakatan dunia untuk mengurangi risiko bencana. Kesepakatan Sendai ini hasil dari Konferensi PBB tentang pengurangan risiko bencana yang diselenggarakan pada 14 hingga 18 Maret 2015 di kota Sendai, Provinsi Miyagi, Jepang. Indonesia menjadi salah satu negara penandatangan kesepakatan ini. Apa saja inti kesepakatan Sendai ini?

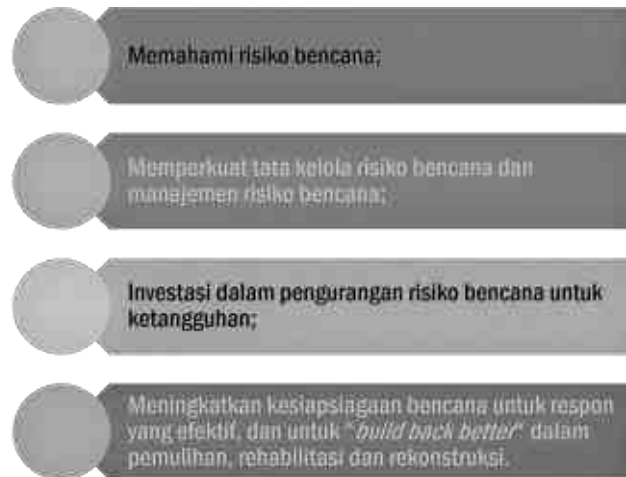


## 7 Target Global



Gambar 3. Target SFDRR

## 4 Prioritas Aksi



Gambar 2.4. Prioritas aksi SFDRR

## B. Praktik Pembelajaran

### B.1. Pengertian, konsep, dan konteks bencana di Indonesia

---

Lembar kerja 1. Pengertian dan jenis bencana di Indonesia

Pertanyaan?	Uraian Jawaban?
Apa pengertian bencana menurut kelompok Anda?	
Apa pengertian jenis bencana alam menurut kelompok Anda?	
Apa pengertian jenis bencana non alam menurut kelompok Anda?	
Apa pengertian jenis bencana sosial menurut kelompok Anda?	

### B.2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia

---

Lembar kerja 2. Penyelenggaraan PB Indonesia

Tahapan Penyelenggaraan PB	Apa Bentuk Kejadiannya?
Kesiapsiagaan	
Tanggap darurat	
Rehabilitasi dan Rekonstruksi	










### B.3. Kebijakan PB/PRB global


Lembar kerja 3. Tugas kelompok pelaksanaan Kesepakatan Paris di desa/kelurahan

Isi Kesepakatan Paris	Bentuk Kegiatan Pelaksanaan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Saja Pelakunya
1. Menahan laju peningkatan temperatur global		
2. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim		
3. Membuat suplai finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.		

Lembar Kerja 4. Tujuan pembangunan berkelanjutan desa/kelurahan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Bentuk Kegiatan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Pelakunya?
		
		
		
		

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Bentuk Kegiatan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Pelakunya?
<p>5 KEBERATAN GENDER</p> 		
<p>6 AIR BERSIH DAN SANITASI</p> 		
<p>7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU</p> 		
<p>8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</p> 		
<p>9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR</p> 		
<p>10 KEFAKARAN DAN KETIDAKSAMAAN</p> 		
<p>11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN</p> 		
<p>12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB</p> 		
<p>13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM</p> 		

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Bentuk Kegiatan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Pelakunya?
		
		
		
		

Lembar Kerja 5. Pelaksanaan kerangka kerja Sendai di desa/kelurahan

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Bentuk Kegiatan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Pelakunya?
1. Memahami risiko bencana		
2. Memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana		
3. Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan		
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi		

## Daftar Referensi

- Anonim, 2007, Undang Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Anonim, 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Anonim, 2012, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana
- Anonim, 2014, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Anonim, 2016, Undang Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Parisagreement To The United Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
- Anonim, United Nations Framework Convention on Climate Change. List List of Annex I Parties to the Convention. Diakses pada 09 Juni 2018, dari [http://unfccc.int/parties\\_and\\_observers/parties/annex\\_i/items/2774.php](http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php)
- Anonim, 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Anonim, 2015, Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 - 2030, BNPB

# Pengkajian Risiko Bencana Partisipatif

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



# Pengkajian Risiko Bencana Partisipatif

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



**Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana**



# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputusan Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

## **Pengkajian Risiko Bencana Partisipatif**

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

### **PENGARAH**

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB  
Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

### **PENANGGUNGJAWAB**

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB  
Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

### **EDITOR**

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

### **PENYUSUN**

Sigit Purwanto	Pujiono Centre
Sumino	LPTP Surakarta
Wahyu Heniwati	Daya Annisa / MDMC
Anggoro Budi Prasetyo	Aksara
Wana Kristanto	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Indra Baskoro Adi	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Muhammad Nur Ronggo Dinoyo	LPTP Surakarta
Gandar Mahojwala	KAPPALA Indonesia
Pudji Santosa	Lingkar
Gigih Aditya Pratama	KAPPALA Indonesia
Yugyasmono	Lingkar
Hadi Sutrisno	BNPB
Nurul Maulidhini	BNPB

### **KONTRIBUTOR**

Arif Fadli	BNPB
Virana Fatwa Nurmala	BNPB
Denadia Mutty	BNPB
Rahma Sari Puspita	BNPB
Riski Yufawinda	BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

# Daftar Isi

<b>Pengantar.....</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>4</b>
<b>A. Materi Pembelajaran .....</b>	<b>5</b>
A.1. Pengertian Risiko Bencana .....	5
A.2. Pengertian Pengkajian Risiko Bencana .....	5
A.3. Pengertian Pengkajian Risiko Bencana Partisipatif .....	5
A.4. Pendekatan Aset Penghidupan.....	6
A.5. Pengertian Ancaman dan Ragam Jenis Ancaman .....	7
A.6. Penilaian Risiko Bencana dan Penetapan Rekomendasi Aksi .....	7
A.7. Pemetaan Risiko Bencana .....	7
<b>B. Praktik Pembelajaran.....</b>	<b>8</b>
B.1. Penilaian ancaman .....	8
B.2. Praktek penilaian tingkat risiko bencana dan penetapan rekomendasi aksi.....	13
B.3. Peta risiko bencana .....	31
<b>Daftar Referensi .....</b>	<b>33</b>

## A. Materi Pembelajaran

### A.1. PENGERTIAN RISIKO BENCANA

---

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Pasal 1 ayat 17 UU PB).

Risiko bencana merupakan hasil interaksi dari faktor-faktor yakni (1) ancaman, (2) kerentanan, dan 3) kapasitas.

### A.2. PENGERTIAN PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

---

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan (Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, Bab 2; Konsepsi).

### A.3. PENGERTIAN PENGKAJIAN RISIKO BENCANA PARTISIPATIF

---

Pengkajian risiko bencana partisipatif merupakan suatu cara untuk menilai potensi dampak negatif pada aset penghidupan suatu komunitas yang mungkin timbul akibat kejadian ancaman. Pengkajian risiko bencana partisipatif dilaksanakan secara mandiri oleh komunitas, pada lingkup ruang hidupnya, menggunakan ukuran-ukuran dan pendekatan baik ilmiah, alamiah dan subyektif.

Tabel .1. Matrik pengkajian risiko bencana partisipatif

<b>Desa/Kec</b> : ..... <b>Kabupaten</b> : ..... <b>Provinsi</b> : ..... <b>Jenis Ancaman</b> : .....						
Aset Berisiko	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset			Kerentanan Penyebab Aset Berisiko	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/S/R)
	Bentuk Risiko	Jumlah	Nominal			
Manusia						
Finansial						
Fisik / Infrastruktur						
Alam / Lingkungan						
Sosial/Politik						
Tinggi (T) : Ketika kapasitas yang dimiliki tidak mampu menghadapi/menyelesaikan kerentanan, kebutuhan sumberdaya dari luar desa lebih besar daripada sumberdaya desa. Sedang (S) : Ketika kapasitas yang dimiliki mampu belum sepenuhnya mampu menghadapi/menyelesaikan kerentanan, sehingga masih membutuhkan bantuan dari luar desa. Rendah (R) : Ketika kapasitas yang dimiliki desa sepenuhnya mampu menghadapi kerentanan dan tidak membutuhkan dukungan dari luar desa.						

#### A.4. PENDEKATAN ASET PENGHIDUPAN

Risiko bencana merupakan perkiraan kemungkinan kerugian pada satu atau lebih aset penghidupan akibat suatu kejadian. Aset penghidupan adalah sumberdaya-sumberdaya dimiliki, dapat diakses, dapat dikontrol oleh suatu unit sosial (individu, keluarga, komunitas) untuk mempertahankan hidup. Jenis aset penghidupan dikelompokkan dalam kategori:

Tabel 2. Contoh aset penghidupan

Jenis Aset	Atribut
Manusia	keterampilan, pengetahuan, kesehatan, sikap/perilaku dan motivasi
Ekonomi/Finansial	tabungan, ternak, pinjaman, harta benda, surat tanah
Fisik/Infrastruktur	rumah, bangunan pemerintah, jalan, jembatan
Alam/Lingkungan	air, tanah/lahan, hutan, hewan buruan, sungai, udara bersih,
Sosial-Politik	famili, teman, organisasi/lembaga, kebijakan

Hampir semua jenis aset penghidupan berpotensi rusak atau hilang akibat suatu kejadian ancaman. Kerusakan atau kehilangan satu atau lebih jenis aset penghidupan dapat mengganggu kemampuan suatu manusia mempertahankan hidup. Pendekatan aset penghidupan digunakan dalam penilaian kerentanan, kapasitas dan kajian risiko.

## **A.5. PENGERTIAN ANCAMAN DAN RAGAM JENIS ANCAMAN**

---

Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana (PsI 1 ayat 13 UUPB). Ancaman dapat berupa kejadian alamiah, hasil samping kegiatan manusia atau gabungan keduanya. Ancaman alamiah seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, wabah, hama, banjir dan longsor. Ancaman akibat hasil samping kegiatan manusia meliputi konflik sosial, pencemaran, kegagalan teknologi dan kecelakaan transportasi. Ancaman seperti banjir, longsor, wabah, hama, dan kecelakaan transportasi juga sering diartikan sebagai kombinasi antara peristiwa alamiah dan kesalahan manusia.

Penilaian ancaman dilakukan dengan cara diskusi pleno dan kelompok. Penilaian ancaman bertujuan meletakkan dasar pemahaman istilah ancaman dengan bencana, memahami jenis ancamannya, kemungkinan terjadi dan dampaknya, bagaimana karakter atau ciri-ciri setiap ancaman.

1. Inventarisasi ragam ancaman

Setiap wilayah di Indonesia memiliki potensi ancaman berbeda-beda tergantung kondisi geografis, lingkungan, sosial, ekonomi, politik dan kependudukannya.

2. Pemeringkatan ancaman

Setiap jenis ancaman memiliki perbedaan dampak dan kemungkinan kejadian. Diperlukan penilaian peringkat ancaman untuk memahami dampak dan kemungkinan kejadian.

3. Penilaian karakter ancaman

Setiap bentuk ancaman wajib dikenali karakter atau ciri-cirinya. Karakter atau ciri-ciri tersebut dapat diekspresikan dengan ukuran-ukuran ilmiah maupun alamiah.

## **A.6. PENILAIAN RISIKO BENCANA DAN PENETAPAN REKOMENDASI AKSI**

---

Setelah penilaian ancaman, bisa ditentukan tingkat risikonya dengan memasukkan unsur kerentanan dan kapasitas (lihat tabel 2.1). Tingkat risiko bencana bersifat subjektif. Sangat tergantung pada latar belakang dan konteks individu atau komunitas.

Setelah penilaian risiko bencana dapat dilanjutkan dengan penentuan rekomendasi. Rekomendasi ini merupakan pilihan-pilihan kegiatan yang terbagi menjadi fase, yakni; 1) Pra bencana; pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas, 2) Pra bencana, kesiapsiagaan atau saat terdapat potensi bencana, 3) Saat tanggap darurat, dan 4) Pasca bencana

## **A.7. PEMETAAN RISIKO BENCANA**

---

Peta risiko bencana dikembangkan dari pemetaan hasil PRA. Menggambar peta dan denah merupakan proses "meniru dan memindahkan" keadaan nyata di suatu ruangan atau kawasan (misalnya rumah, kampung, kota), secara tampak atas, ke atas kertas atau media lainnya. Peta atau denah biasanya dibuat sebagai alat bantu memahami keadaan secara menyeluruh dan kemudian mengelolanya agar menjadi lebih baik.

## B. Praktik Pembelajaran

### B.1. PENILAIAN ANCAMAN

Lembar Kerja 1. Jenis dan ragam ancaman bencana di desa

<b>Desa/Kelurahan</b> : .....	
<b>Kecamatan</b> : .....	
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....	
<b>Provinsi</b> : .....	
<b>Jenis Ancaman</b>	<b>Ragam Ancaman</b>
Ancaman geologi	
Ancaman Hidrometeorologi	
Ancaman biologi	
Ancaman kegagalan teknologi	
Ancaman lingkungan	
Ancaman sosial	

Tabel.2. Contoh jenis/ragam ancaman

<b>Desa/Kelurahan</b> : Pakansari	
<b>Kecamatan</b> : Cibinong	
<b>Kabupaten/Kota</b> : Bogor	
<b>Provinsi</b> : Jawa Barat	
<b>Jenis Ancaman</b>	<b>Ragam Ancaman</b>
Ancaman geologi	Gempa bumi, tsunami, gerakan tanah
Ancaman Hidrometeorologi	Kekeringan, angin puting beliung
Ancaman biologi	Wabah malaria
Ancaman kegagalan teknologi	-
Ancaman lingkungan	-
Ancaman sosial	Konflik tapal batas dengan tetangga desa

Lembar kerja 2. Pemeringkatan ancaman di desa

<b>Desa/Kelurahan</b>	:Pakansari		
<b>Kecamatan</b>	: Cibinong		
<b>Kabupaten/Kota</b>	: Bogor		
<b>Provinsi</b>	: Jawa Barat		
<b>Ragam Ancaman</b>	<b>Kemungkinan Terjadi</b>	<b>Perkiraan Dampak</b>	<b>Total</b>
Banjir			
Puting Beliung			
Kebakaran			
Wabah DBD			

Tabel 3. Contoh pemeringkatan ancaman

<b>Desa/Kelurahan</b>	:Pakansari		
<b>Kecamatan</b>	: Cibinong		
<b>Kabupaten/Kota</b>	: Bogor		
<b>Provinsi</b>	: Jawa Barat		
<b>Ragam Ancaman</b>	<b>Kemungkinan Terjadi</b>	<b>Perkiraan Dampak</b>	<b>Total</b>
Banjir	4	4	8
Puting Beliung	4	3	7
Kebakaran	3	3	6
Wabah DBD	4	3	7

Keterangan Nilai :

<b>Kemungkinan terjadi</b>	<b>Perkiraan dampak</b>
Nilai 1 = Sangat kecil kemungkinan terjadi	Nilai 1 = Tidak parah
Nilai 2 = Kemungkinan kecil terjadi	Nilai 2 = Agak parah
Nilai 3 = Sangat mungkin terjadi	Nilai 3 = Parah
Nilai 4 = Pasti terjadi	Nilai 4 = Sangat parah

\*Catatan : Nilai 1 sampai 4 merupakan asumsi dimana bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah serta kesepakatan, sehingga bisa saja misalnya nilai 1 sampai 5.



Lembar kerja 3. Deskripsi karakter ancaman

<b>Jenis ancaman</b> : ..... <b>Desa/Kelurahan</b> : ..... <b>Kecamatan</b> : ..... <b>Kabupaten/Kota</b> : ..... <b>Provinsi</b> : .....	
KARAKTER	KETERANGAN
Asal/Penyebab	
Faktor Perusak	
Tanda Peringatan	
Sela Waktu	
Kecepatan Hadir	
Frekuensi	
Perioda	
Durasi	
Intensitas	
Posisi	

- Asal/Penyebab : *Sumber atau penyebab ancaman bencana*  
 Faktor Perusak : *Bagian dari ancaman bencana yang menyebabkan kerusakan*  
 Tanda Peringatan : *Tanda-tanda yang dapat diketahui sebelum ancaman bencana datang*  
 Sela Waktu : *Lama waktu antara tanda-tanda dengan datangnya ancaman bencana*  
 Kecepatan Hadir : *Kecepatan ancaman bencana*  
 Periode : *Masa atau siklus ancaman bencana*  
 Frekuensi : *Jumlah perulangan kejadian ancaman bencana setiap periode*  
 Durasi : *Lama setiap kejadian ancaman bencana*  
 Intensitas : *Kekuatan ancaman, luas daerah yang diperkirakan terkena ancaman*  
 Posisi : *Jarak sumber ancaman bencana dengan pemukiman penduduk dan aset-aset penting lainnya (sekolah, pasar, rumah ibadah, rumah sakit / puskesmas,*

Tabel 4. Contoh deskripsi karakter ancaman banjir

<b>Jenis ancaman : Banjir</b> <b>Desa/Kelurahan : Pakansari</b> <b>Kecamatan : Cibinong</b> <b>Kabupaten/Kota : Bogor</b> <b>Provinsi : Jawa Barat</b>	
KARAKTER	KETERANGAN
Asal/Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Curah hujan tinggi</li> <li>● Penyempitan sungai</li> <li>● Irigasi saluran air</li> <li>● Buang sampah sembarangan</li> <li>● Banyak perumahan</li> <li>● Kekurangan resapan</li> <li>● Pendangkalan sungai</li> </ul>
Faktor Perusak	Genangan air, Sampah, Wabah penyakit
Tanda Peringatan	Hujan deras terus menerus dalam waktu 2-3 jam
Sela Waktu	3 jam
Kecepatan Hadir	3 jam
Frekuensi	6 hingga 8 kali sepanjang musim penghujan
Perioda	Waktu musim hujan, bulan September s/d Februari, terjadi dua tahun berturut-turut
Durasi	2 X 24 jam
Intensitas	Ketinggian banjir sekitar 1 hingga 1,5 meter, berdampak pada 63 rumah/KK, 252 jiwa
Posisi	Sungai di tengah pemukiman (Wilayah Kelurahan Pakansari)

Tabel 2.5. Contoh deskripsi karakter ancaman tsunami

<b>Jenis ancaman : Tsunami</b> <b>Desa/Kelurahan : Prigi</b> <b>Kecamatan : Watulimo</b> <b>Kabupaten/Kota : Trenggalek</b> <b>Provinsi : Jawa Timur</b>	
KARAKTER	KETERANGAN
Asal/Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari Alam</li> <li>- Akibat dari proses subduksi lempeng samudra hindia di selatan jawa</li> </ul>
Faktor Perusak	Gelombang tinggi dengan kecepatan yang tinggi pula
Tanda Peringatan	Gempa dengan skala tinggi lebih dari 20 detik Surutnya air laut
Sela Waktu	20 menit
Kecepatan Hadir	900 km/jam

<b>Jenis ancaman : Tsunami</b> <b>Desa/Kelurahan : Prigi</b> <b>Kecamatan : Watulimo</b> <b>Kabupaten/Kota : Trenggalek</b> <b>Provinsi : Jawa Timur</b>	
KARAKTER	KETERANGAN
Frekuensi	tren kejadian bahaya gempa dan tsunami semakin tinggi
Perioda	-
Durasi	20 menit
Intensitas	Tinggi, 3 dukuh di pinggir pantai
Posisi	Pantai berjarak 100 m dari pemukiman warga

Tabel 6. Contoh deskripsi karakter ancaman awan panas

<b>Jenis ancaman : Awan Panas G. Merapi</b> <b>Desa/Kelurahan : Purwobinangun</b> <b>Kecamatan : Pakem</b> <b>Kabupaten/Kota : Sleman</b> <b>Provinsi : DIY</b>	
KARAKTER	KETERANGAN
Asal/Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari Alam</li> <li>- Proses magmatis G. Merapi</li> <li>- Guguran/Longsoran kubah lava G. Merapi sehingga menimbulkan awan panas</li> </ul>
Faktor Perusak	Longsoran bongkah batu, kerikil, Tekanan Gas dari Awan Panas Material pasir, debu, gas, menjadi satu
Tanda Peringatan	Suara gemuruh dari puncak merapi sudah menunjukkan di level kritis
Sela Waktu	10 – 15 menit
Kecepatan Hadir	800 m/jam
Frekuensi	52 kali Awan Panas Guguran
Perioda	2 – 4 tahun
Durasi	5 menit
Intensitas	Lebih tinggi, sampai radius bahaya 6- 9 km dari puncak G. Merapi
Posisi	5 km pemukiman yang terdekat baik dari G. Merapi maupun dari 25 , jarak alur kali Boyong

## B.2. PRAKTEK PENILAIAN TINGKAT RISIKO BENCANA DAN PENETAPAN REKOMENDASI AKSI

Lembar kerja 4. Penilaian Risiko Bencana

<b>Jenis Ancaman</b> : ..... <b>Desa/Kelurahan</b> : ..... <b>Kecamatan</b> : ..... <b>Kabupaten</b> : ..... <b>Provinsi</b> : .....						
Aset Berisiko	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset			Kerentanan Penyebab Aset Berisiko	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/S/R)
	Bentuk Risiko	Jumlah	Nominal			
Manusia	Meninggal					
	Cacat					
	Luka-luka					
	Sakit					
	Kehilangan kemampuan/ keterampilan					
	Mengungsi					
	Tidak bisa bekerja					
	Tidak bisa sekolah					
Ekonomi/ Finansial	Kehilangan penghasilan/upah kerja					
	Kehilangan pekerjaan					
	Kehilangan modal kerja					
	Gagal panen					
	Kerusakan/kehilangan harta benda					
	Kerusakan/kehilangan surat-surat penting					
	Pengeluaran tambahan keluarga					
Fisik / Infrastruktur	Rumah rusak/hilang					
	Gangguan fungsi rumah					
	Kerusakan jaringan pipa air bersih					
	Kerusakan jaringan					

	listrik/telepon					
	Kerusakan saluran air					
	Kerusakan tempat kerja					
	Kerusakan fasilitas umum					
	Gangguan fungsi jalan/jembatan					
	Kerusakan tanggul/bendungan					
Alam / Lingkungan	Pencemaran air/udara/tanah					
	Kerusakan/kehilangan sumber air bersih					
	Kerusakan lahan pertanian					
	Gangguan fungsi irigasi					
	Kerusakan hutan/gambut/rawa					
	Kerusakan sempadan sungai/pantai					
	Kerusakan/kehilangan sumber pangan alam					
Sosial/Politik	Gangguan fungsi estetik tanaman					
	Gangguan kerukunan warga					
	Gangguan fungsi organisasi sosial					
	Gangguan/hambatan partisipasi					
	Gangguan kekerabatan keluarga					
<p>Tinggi (T) : Ketika kapasitas yang dimiliki tidak mampu menghadapi/menyelesaikan kerentanan, kebutuhan sumberdaya dari luar desa lebih besar daripada sumberdaya desa.</p> <p>Sedang (S) : Ketika kapasitas yang dimiliki mampu belum sepenuhnya mampu menghadapi/menyelesaikan kerentanan, sehingga masih membutuhkan bantuan dari luar desa.</p> <p>Rendah (R) : Ketika kapasitas yang dimiliki desa sepenuhnya mampu menghadapi kerentanan dan tidak membutuhkan dukungan dari luar desa.</p>						

**Catatan: Lembar kerja 4 sebaiknya dibuat dalam format landscape**

Tabel 7. Contoh penilaian risiko bencana banjir

Jenis Ancaman : Banjir Desa/Kelurahan : Pakansari Kecamatan : Cibinong Kabupaten/Kota : Bogor Provinsi : Jawa Barat						
Aset Berisiko	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset			Kerentanan Penyebab Aset Berisiko	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/S/R)
	Bentuk Risiko	Jumlah	Nominal (Rp)			
Manusia	Meninggal	1 orang		Terlambat penyelamatan diri / evakuasi		
	Luka Permanen (Cacat)					
	Luka-luka	7 orang	1.400.000 (biaya pengobatan)	Lansia dan anak-anak Tidak memahami tanda bahaya Dekat dengan sumber ancaman	Adanya Evakuasi bersama/kolektif Papan peringatan kawasan banjir tersedia Tersedia Pustu dan tenaga medis	
	Sakit	252 jiwa	252.000.0000 (biaya periksa, pengobatan, biaya perawatan, dll)	- Wabah DBD, Chikungunya dan flu - Pengungsian kotor	Dekat Puskesmas Ada dokter/bidan jaga	Tinggi
	Kehilangan keterampilan					
	Mengungsi	252 jiwa	7.550.000/hari (biaya makan 3x sehari/orang)	- Kurang pengetahuan penanggulangan bencana banjir - Tempat tinggal di dataran rendah	Terdidik dan sehat Sikap mental positif	Sedang
	Tidak bisa bekerja					
	Tidak bisa sekolah	100 anak				
Ekonomi/ Finansial	Kehilangan penghasilan/upah kerja	63 KK	34.020.000 (upah harian/UMR X 3 hari)	Akses infrastruktur jalan terputus		
	Kehilangan pekerjaan					
	Kehilangan modal kerja	14 usaha	35.000.000 (2.5jutaX usaha)	Terendam dan hanyut	adanya kelompok UMKM pendampingan UMKM	

<b>Jenis Ancaman : Banjir</b> <b>Desa/Kelurahan : Pakansari</b> <b>Kecamatan : Cibinong</b> <b>Kabupaten/Kota : Bogor</b> <b>Provinsi : Jawa Barat</b>						
Aset Berisiko	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset			Kerentanan Penyebab Aset Berisiko	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/S/R)
	Bentuk Risiko	Jumlah	Nominal (Rp)			
			mikro)			
	Gagal panen	63 kolam lele	18.900.000 (15kgxharga/kg)	Kolam di dataran rendah tepi sungai	Ada koperasi peternak lele	Sedang
	Kerusakan/kehilangan harta benda	63 KK	630.000.000 (biaya kerusakanX jml KK)	Tidak sempat menyelamatkan barang-barang dan surat berharga	Tenaga sukarela kader aktif dan warga masyarakat serta peran aktif pemerintah	Sedang
	Kerusakan/kehilangan surat-surat penting	63 KK				
Fisik / Infrastruktur	Gangguan fungsi rumah	63 KK		Tempat tinggal di dataran rendah	Tenaga sukarela kader aktif dan warga masyarakat serta peran aktif pemerintah	Sedang
	Kerusakan jaringan pipa air bersih	500m	9.375.000 (biaya kerusakan jaringan)	Berada di dekat aliran sungai		
	Kerusakan jaringan listrik/telepon					
	Kerusakan saluran air					
	Kerusakan tempat kerja					
	Kerusakan fasilitas umum					
	Gangguan fungsi jalan/jembatan					
	Kerusakan tanggul/bendungan					
Alam / Lingkungan	Pencemaran air/udara/tanah					

<b>Jenis Ancaman : Banjir</b> <b>Desa/Kelurahan : Pakansari</b> <b>Kecamatan : Cibinong</b> <b>Kabupaten/Kota : Bogor</b> <b>Provinsi : Jawa Barat</b>						
Aset Berisiko	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset			Kerentanan Penyebab Aset Berisiko	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/S/R)
	Bentuk Risiko	Jumlah	Nominal (Rp)			
	Kerusakan/kehilangan sumber air bersih	- 11 rumah di RT 01/04, - 12 rumah di RT 02/04, - 7 rumah di RT 03/04 - 6 rumah di RT 04/04 - 4 rumah di RT 05/04 - 23 rumah di RT 02/08,	-	Sumur di dataran rendah	- Ada warga punya keahlian membuat sumur - Gotong royong dan swadaya	Tinggi
	Kerusakan lahan pertanian					
	Gangguan fungsi irigasi					
	Kerusakan hutan/gambut/rawa					
	Kerusakan sempadan sungai/pantai					
	Kerusakan/kehilangan sumber pangan alam					
	Gangguan fungsi estetika tanaman					
Sosial/Politik	Gangguan kerukunan warga	63 KK		Kurang kebersamaan dan gotong royong	Pertemuan Triwulan Rt dan Rw di kelurahan ( rutin )	Tinggi
	Gangguan fungsi organisasi sosial					
	Gangguan/hambatan					



<b>Jenis Ancaman : Banjir</b> <b>Desa/Kelurahan : Pakansari</b> <b>Kecamatan : Cibinong</b> <b>Kabupaten/Kota : Bogor</b> <b>Provinsi : Jawa Barat</b>						
Aset Berisiko	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset			Kerentanan Penyebab Aset Berisiko	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/S/R)
	Bentuk Risiko	Jumlah	Nominal (Rp)			
	partisipasi					
	Gangguan kekerabatan keluarga					
<p>Tinggi (T) : Ketika kapasitas yang dimiliki tidak mampu menghadapi/menyelesaikan kerentanan, kebutuhan sumberdaya dari luar desa lebih besar daripada sumberdaya desa.</p> <p>Sedang (S) : Ketika kapasitas yang dimiliki mampu belum sepenuhnya mampu menghadapi/menyelesaikan kerentanan, sehingga masih membutuhkan bantuan dari luar desa.</p> <p>Rendah (R) : Ketika kapasitas yang dimiliki desa sepenuhnya mampu menghadapi kerentanan dan tidak membutuhkan dukungan dari luar desa.</p>						

Tabel 8. Contoh penilaian risiko bencana Tsunami

Jenis Ancaman : Tsunami Desa/Kelurahan : Prigi Kecamatan : Watulimo Kabupaten/Kota : Trenggalek Provinsi : Jawa timur							
Aset Berisiko	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset			Kerentanan Penyebab Aset Berisiko	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/S/R)	
	Bentuk Risiko1	Jumlah	Nominal (Rp)				
Manusia	Meninggal	31 jiwa		Bencana terjadi secara tiba-tiba di malam hari Kekuatan gelombang sangat besar		Tinggi	
	Luka permanen (Cacat)	59 jiwa	2.500.000 x 59 = 147.500.000			Tinggi	
	Luka-luka	112 jiwa	500.000 x 112 jiwa = 56.000.000			Dekat Puskesmas Ada dokter/bidan jaga	Tinggi
	Sakit	26 Jiwa	250.000 x 26 Jiwa = 6.500.000				
	Kehilangan keterampilan	59 jiwa	1.000.000 X 59 = 59.000.000				
	Mengungsi	822 jiwa	25.000x822x30 hari = 616.500.000				
	Tidak bisa bekerja	171 jiwa	1.900.000 UMR x171 jiwa = 324.000.000			Terdidik dan sehat Sikap mental positif	Sedang

<b>Jenis Ancaman : Tsunami</b> <b>Desa/Kelurahan : Prigi</b> <b>Kecamatan : Watulimo</b> <b>Kabupaten/Kota : Trenggalek</b> <b>Provinsi : Jawa timur</b>						
Aset Berisiko	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset			Kerentanan Penyebab Aset Berisiko	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/S/R)
	Bentuk Risiko1	Jumlah	Nominal (Rp)			
	Tidak bisa sekolah	100 anak	100.000X100x 30= 300.000.000			
Ekonomi/ Finansial	Kehilangan upah kerja harian	526 jiwa	76.000 x 14 hari 526Jiwa= 559.664.000			
	Kehilangan pekerjaan	59 jiwa	1.900.000 x 59 =112.100.000			Sedang
	Kehilangan modal kerja	304 usaha	2.500.000 x 304 usaha= 760.000.000	Rumah dan tempat usaha rusak	Sikap mental positif	Sedang
	Gagal panen	30 Ha	5ton x 30 x 3.000.000= 450.000.000	tersapu oleh tsunami	penanaman mangrove meskipun belum cukup besar	Tinggi
	Kerusakan/kehilangan harta benda	211 KK		Tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga	Tenaga sukarela kader aktif dan warga masyarakat serta peran aktif pemerintah	Sedang
Fisik / Infrastruktur	Rumah rusak/hilang	211 KK		Tempat tinggal di dekat pantai	Tenaga sukarela kader aktif dan warga masyarakat serta peran aktif pemerintah	Tinggi
	Gangguan fungsi rumah					

**Jenis Ancaman : Tsunami**  
**Desa/Kelurahan : Prigi**  
**Kecamatan : Watulimo**  
**Kabupaten/Kota : Trenggalek**  
**Provinsi : Jawa timur**

Aset Berisiko	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset			Kerentanan Penyebab Aset Berisiko	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/S/R)
	Bentuk Risiko1	Jumlah	Nominal (Rp)			
	Kerusakan jaringan pipa air bersih					
	Kerusakan jaringan listrik/telepon					
	Kerusakan saluran air					
	Kerusakan tempat kerja	4lokasi kerja	5juta x 4 lokasi= 20.000.000			
	Kerusakan fasilitas umum					
	Gangguan fungsi jalan/jembatan	1 Balai Desa 2 Musholla		Berada di dekat pantai		Sedang
	Kerusakan tanggul/bendungan	300 pX 4t	150.000.000	Kondisi kurang kokoh		
Alam / Lingkungan	Pencemaran air/udara/tanah					
	Kerusakan/kehilangan sumber air bersih					

**Jenis Ancaman** : Tsunami  
**Desa/Kelurahan** : Prigi  
**Kecamatan** : Watulimo  
**Kabupaten/Kota** : Trenggalek  
**Provinsi** : Jawa timur

Aset Berisiko	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset			Kerentanan Penyebab Aset Berisiko	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/S/R)
	Bentuk Risiko1	Jumlah	Nominal (Rp)			
	Kerusakan lahan pertanian	40 Ha	154.000.000 (jumlah panen x harga)	Berada di dataran rendah	Adanya Gapoktan Penyuluh Pertanian	
	Gangguan fungsi irigasi	1km	50.000.000		Adanya Kelompok pengairan Desa	
	Kerusakan hutan/gambut/rawa					
	Kerusakan sempadan sungai/pantai					
	Kerusakan/kehilangan sumber pangan alam					
	Gangguan fungsi estetik tanaman					
Sosial/Politik	Gangguan kerukunan warga					
	Gangguan fungsi organisasi sosial	kelompok Dasa Wisma, PKK, KWT, Arisan RT/RW				

<b>Jenis Ancaman : Tsunami</b> <b>Desa/Kelurahan : Prigi</b> <b>Kecamatan : Watulimo</b> <b>Kabupaten/Kota : Trenggalek</b> <b>Provinsi : Jawa timur</b>						
Aset Berisiko	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset			Kerentanan Penyebab Aset Berisiko	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/S/R)
	Bentuk Risiko1	Jumlah	Nominal (Rp)			
	Gangguan/hambatan partisipasi					
	Gangguan kekerabatan keluarga					

- Tinggi (T) : Ketika kapasitas yang dimiliki tidak mampu menghadapi/menyelesaikan kerentanan, kebutuhan sumberdaya dari luar desa lebih besar daripada sumberdaya desa.
- Sedang (S) : Ketika kapasitas yang dimiliki mampu belum sepenuhnya mampu menghadapi/menyelesaikan kerentanan, sehingga masih membutuhkan bantuan dari luar desa.
- Rendah (R) : Ketika kapasitas yang dimiliki desa sepenuhnya mampu menghadapi kerentanan dan tidak membutuhkan dukungan dari luar desa.

Tabel 9. Contoh penilaian risiko bencana awan panas

Jenis Ancaman : Awan Panas G. Merapi Desa/Kelurahan : Purwobinangun Kecamatan : Pakem Kabupaten : Sleman Provinsi : DIY						
Aset Berisiko	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset			Kerentanan Penyebab Aset Berisiko	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/S/R)
	Bentuk Risiko	Jumlah	Nominal (Rp)			
Manusia	Meninggal	68 Jiwa		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak/kurang memahami perkembangan status/aktivitas G. Merapi</li> <li>Terlambat untuk melakukan proses evakuasi</li> <li>Dekat sumber ancaman/bahaya G. Merapi</li> <li>Abai dalam menyikapi bahaya awan panas</li> <li>Ketidaktahuan karakter awan panas G. Merapi</li> <li>Pemahaman mengenai bahaya kegunungapian masih minim</li> <li>Suhu awan panas lebih dari 500 derajat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti sosialisasi perkembangan status/aktivitas G. Merapi dari BPPTKG</li> <li>Mengikuti pelatihan - pelatihan kesiapsiagaan mulai dari unit dusun sampai desa</li> <li>Mematuhi rekomendasi sesuai dengan status/level gunung api</li> <li>Melakukan ronda malam di kawasan rawan bencana III G. Merapi</li> <li>Kesepakatan penyusunan rencana evakuasi dan dukungan mobilisasi warga masyarakat</li> <li>Menjauhi sumber ancaman/bahaya</li> </ul>	Tinggi
	Luka permanen (Cacat)	42 Jiwa	5.000.000 x 42 jiwa = 210.000.000			
	Luka-luka/Luka bakar	32 jiwa	500.000 x 32 jiwa = 16.000.000			
	Sakit	10 jiwa	200.000 x 10 jiwa = 2.000.000			
	Kehilangan kemampuan/keterampilan	55 jiwa	1.800.000 x 55 jiwa = 99.000.000			
	Mengungsi	550 jiwa	10.000 x 3hari x 550 jiwa x 10 hari = 165.000.000			
	Tidak bisa bekerja	156 jiwa	1.800.000 : 25 = 720.000 x 10 hari x 156 jiwa = 112.320.000			
	Tidak bisa sekolah	55 jiwa	10.000 x 55 jiwa x 10 hari = 5.500.000			
Ekonomi/ Finansial	Kehilangan penghasilan/upah kerja	30 jiwa	1.800.000 UMR: : 25 x 10 hari =	Kerusakan lahan pertanian dan peternakan Matinya lahan usaha	Memanfaatkan pasca bencana yang sudah terjadi untuk menjadikan wilayah yang dapat	Tinggi

**Jenis Ancaman** : Awan Panas G. Merapi  
**Desa/Kelurahan** : Purwobinangun  
**Kecamatan** : Pakem  
**Kabupaten** : Sleman  
**Provinsi** : DIY

Aset Berisiko	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset			Kerentanan Penyebab Aset Berisiko	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/S/R)
	Bentuk Risiko	Jumlah	Nominal (Rp)			
Fisik / Infrastruktur			2.160,000	Modal usaha yang minim Berada di daerah KRB III Tidak memiliki asuransi Modal usaha hilang dan harta benda tidak terselamatkan	menaikkan ekonomi masyarakat (tambang pasir, wisata alam)	
	Kehilangan pekerjaan	12 jiwa	1.8000.000 UMR x x 12 = 21.600.000			
	Kerusakan/kehilangan harta benda			Secara geografis masuk ke kedalam kawasan rawan bencana III G. Merapi		
	Kerusakan/kehilangan surat-surat penting			Belum disiapkan tas siaga bencana Minimnya fungsi mengenai tas siaga bencana		
	Rumah rusak/roboh/hilang	15 unit		Tekanan gas tinggi dan membawa material kerikil dan pasir Langsung tersapu/terhempas awan panas G. Merapi	Memperbaiki jalur evakuasi Adanya Papan petunjuk arah evakuasi Terbentuknya jalur evakuasi secara partisipasi sesuai dengan kesepakatan	Tinggi
	Gangguan fungsi rumah					
	Kerusakan tanggul/bendungan	1 lokasi	100 jt	Sumber air bersih tertimbun material/endapan awan panas yang berhulu di G.Merapi		Tinggi
Alam / Lingkungan	Pencemaran air/udara/tanah					
	Kerusakan/kehilangan sumber air bersih	4 unit	2.500.000 : 4 == 600.000	tercemar abu vulkanik G. Merapi	penutupan bak tampung warga secara kolektif	Tinggi



**Jenis Ancaman** : Awan Panas G. Merapi  
**Desa/Kelurahan** : Purwobinangun  
**Kecamatan** : Pakem  
**Kabupaten** : Sleman  
**Provinsi** : DIY

Aset Berisiko	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset			Kerentanan Penyebab Aset Berisiko	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/S/R)
	Bentuk Risiko	Jumlah	Nominal (Rp)			
Sosial/Politik	Kerusakan lahan pertanian			terkena dampak langsung Awan Panas G.Merapi	menanam kembali area - area yang terlanda akibat awan panas	
	Gangguan fungsi irigasi					
	Kerusakan hutan/gambut/rawa					
	Kerusakan sempadan sungai/pantai					
	Kerusakan/kehilangan sumber pangan alam					
	Gangguan fungsi estetik tanaman					
	Gangguan kerukunan warga			berebut logistik tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan	Ada SOP dalam pembagian logistik bersama tim logistik	
	Gangguan fungsi organisasi sosial			terhambatnya pertemuan - pertemuan di tingkat Dusun dan Desa	membangun kesepakatan ulang/ membuat jadwal rutin pertemuan tingkat dusun	
	Gangguan/hambatan partisipasi			modal sosial kurang berjalan dengan baik masing - masing warga sibuk membersihkan rumah masing - masing	koordinasi bersama ketua RT/RW	
	Gangguan kekerabatan keluarga					

- Tinggi (T) : Ketika kapasitas yang dimiliki tidak mampu menghadapi/menyelesaikan kerentanan, kebutuhan sumberdaya dari luar desa lebih besar daripada sumberdaya desa.  
 Sedang (S) : Ketika kapasitas yang dimiliki mampu belum sepenuhnya mampu menghadapi/menyelesaikan kerentanan, sehingga masih membutuhkan bantuan dari luar desa.  
 Rendah (R) : Ketika kapasitas yang dimiliki desa sepenuhnya mampu menghadapi kerentanan dan tidak membutuhkan dukungan dari luar desa.

Setelah menilai risiko bencana, pembelajaran dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi kegiatan untuk mengurangi tingkat risiko pada aset-aset. Bentuk kegiatan yang diusulkan bertujuan mengurangi tingkat risiko.

Jenis-jenis kegiatan rekomendasi dapat berupa kegiatan-kegiatan:

1. Peningkatan kapasitas (pengorganisasian, penetapan aturan, pelatihan-pelatihan dan simulasi), pencegahan/mitigasi ancaman, dan sebagainya.
2. Peningkatan kesiapsiagaan seperti; pemantauan ancaman, pengaktifan ronda, persiapan evakuasi, penyiapan tempat pengungsian dan sebagainya.
3. Saat tanggap darurat, misalnya; melakukan evakuasi, melakukan kajian kerugian, mengelola logistik pengungsian, pengamanan lokasi bencana, dan sebagainya.

Lembar kerja 5. Contoh Tabel kegiatan pengurangan risiko bencana

<b>Jenis Ancaman</b> : ..... <b>Desa/Kelurahan</b> : ..... <b>Kecamatan</b> : ..... <b>Kabupaten</b> : ..... <b>Provinsi</b> : .....									
Fase/tahap	Kegiatan	Lembaga Organisasi							
Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas)									
Pra bencana, saat terdapat potensi bencana (kesiapsiagaan)									
Saat tanggap darurat									
Pasca bencana									

Tabel 10. Contoh kegiatan pengurangan risiko bencana banjir

<b>Jenis Ancaman : Banjir</b> <b>Desa/Kelurahan : Pakansari</b> <b>Kecamatan : Cibinong</b> <b>Kabupaten : Bogor</b> <b>Provinsi : Jawa Barat</b>											
Fase	Kegiatan	Lembaga/Organisasi Pelibat									
		Kelurahan	RW	RT	Dasa Wisma	Kel. Lele	Kel. Ternak	K. Taruna	Pustu	Tim Siaga	
Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas)	1. Pembuatan Peraturan Penanggulangan Bencana	√	√	√	√	√	√	√	√		
	2. Pengajuan kegiatan RPB ke Musrenbang	√	√	√							
	3. Sosialisasi kesadaran bencana	√	√	√	√	√	√	√			
	4. Reboisasi dan penataan lingkungan	√	√	√		√	√	√			
	5. Pengerukan sungai	√									
	6. Pembuatan biopori	√	√	√	√	√	√	√			
	7. Pembentukan tim siaga bencana	√	√	√				√			
	8. Pelatihan evakuasi dan P3K							√			
	9. Simulasi bencana	√	√	√	√	√	√	√	√		
	10. Pengadaan perlengkapan kebencanaan	√									
	11. Pengelolaan tabungan siaga			√	√	√	√	√			
	12. Pengelolaan bank sampah				√			√			
	13. Perbaikan terasering	√	√	√				√			√
Pra bencana, saat terdapat potensi bencana (kesiapsiagaan)	1. Sosialisasi kesiapsiagaan bencana	√	√	√							√
	2. Pengaktifan Early Warning System (EWS)										√
	3. Pemantauan bahaya										√
	4. Penyiapan pos pengungsian										√
	5. Penyiapan pos pengungsian ternak										
Saat tanggap darurat	1. Menghidupkan EWS dan pengeras suara							√			√
	2. Melakukan evakuasi							√			√
	3. Mengaktifkan pos pengungsian							√	√		√
	4. Melakukan kajian kerugian							√			√
	5. Mengelola logistik pengungsian	√	√	√				√			√
	6. Pengamanan lokasi bencana							√			√
	7. Pembuatan MCK tambahan	√	√	√				√			√
Pasca bencana	1. Sosialisasi tentang pemulihan mental								√		√
	2. Rekonstruksi pasar desa	√	√	√				√			√
	3. Pemulihan aktivitas	√	√	√				√			√
	4. Rehabilitasi jalan desa	√	√	√				√			√

Tabel 11. Contoh kegiatan pengurangan risiko bencana tsunami

<b>Jenis Ancaman : Tsunami</b> <b>Desa/Kelurahan : Prigi</b> <b>Kecamatan : Watulimo</b> <b>Kabupaten/Kota : Trenggalek</b> <b>Provinsi : Jawa Timur</b>										
Fase	Kegiatan	Lembaga/Organisasi Pelibat								
		Desa	RW	RT	Kel. Nelayan	PKK	Kel. Tani	K. Taruna	Pustu	Tim Siaga
Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas)	1. Pembuatan Peraturan Penanggulangan Bencana	√								
	2. Pengajuan kegiatan RPB ke Musrenbang	√	√	√						
	3. Sosialisasi kesadaran bencana	√	√	√	√	√	√	√		
	4. Pembuatan Early Warning System (EWS)	√								
	5. Pembentukan tim siaga bencana	√	√	√				√		
	6. Pelatihan evakuasi dan P3K							√		
	7. Simulasi bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	
	8. Pengadaan perlengkapan kebencanaan	√								
	9. Pengelolaan tabungan siaga			√	√	√	√	√		
Saat tanggap darurat	1. Mengelola logistik pengungsian	√	√	√		√		√		√
	2. Melakukan evakuasi							√		√
	3. Mengaktifkan pos pengungsian							√	√	√
	4. Melakukan kajian kerugian							√		√
	5. Pengamanan lokasi bencana							√		√
Pasca bencana	1. Sosialisasi tentang pemulihan mental					√			√	√
	2. Rekonstruksi/rehabilitasi	√	√	√				√		√
	3. Pemulihan aktivitas	√	√	√				√		√

Tabel 12. Contoh kegiatan pengurangan risiko bencana awan panas

Jenis Ancaman : Awan Panas G. Merapi Desa/Kelurahan : Purwobinangun Kecamatan : Pakem Kabupaten : Sleman Provinsi : DIY											
Fase/tahap	Kegiatan	Lembaga / Organisasi Terlibat									
		kalurahan	BPD Desa	Forum PRB	Tagana	K. Taruna	Relawan/ Tim Siaga Desa	Linmas	Masyarakat	SAR	PMI/Sibat
Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas)	Pembuatan Peraturan Penanggulangan Bencana	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Pengajuan kegiatan RPB ke Musrenbang		√								
	Sosialisasi kesadaran bencana	√	√	√			√	√	√	√	√
	Reboisasi dan penataan lingkungan			√				√	√		
	Penyusunan dokumen rencana Kontijensi	√	√	√	√	√	√	√	√		
Pra bencana, saat terdapat potensi bencana (kesiapsiagaan)	Sosialisasi dari BPPTKG	√		√			√				
	Pembentukan tim siaga bencana	√		√	√	√	√		√		
	Pelatihan evakuasi dan P3K			√			√			√	√
	Simulasi bencana erupsi Gunungapi	√	√	√			√				√
	Pengadaan perlengkapan kebencanaan	√	√	√			√				√
	Sosialisasi kesiapsiagaan bencana	√		√			√			√	√
	Pengaktifan Early Warning System (EWS)								√		
	Pemantauan bahaya G. Merapi			√			√		√		
	Penyiapan TEA pengungsian	√	√				√			√	
	Menghidupkan EWS dan pengeras suara								√		
Saat Darurat Tanggap	Melakukan evakuasi			√	√		√		√	√	√
	Mengaktifkan pos pengungsian	√		√			√		√	√	
	Melakukan kajian kerugian	√		√			√				
	Mengelola logistik pengungsian	√	√	√		√	√		√		
	Pengamanan lokasi bencana	√		√				√			√
Pasca Bencana	Sosialisasi tentang pemulihan mental						√		√		
	Rekonstruksi/rehabilitasi	√		√					√		
	Pemulihan aktivitas	√		√			√		√		

### **B.3. PETA RISIKO BENCANA**

---

Penyusunan peta risiko bencana 1 (satu) jenis ancaman di daerah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur berikut ini.

1. Menyepakati/menentukan unsur peta.

Peta risiko bencana biasanya memiliki unsur peta; 1) jalan, 2) rumah, 3) rumah dengan penduduk rentan, 4) rumah memiliki kendaraan untuk evakuasi, 5) jalur aman evakuasi, 6) titik tujuan evakuasi, 7) daerah diperkirakan terkena ancaman, 8) arah kedatangan ancaman, 9) kebun, 10) sumber air, 11) bangunan atau fasilitas umum seperti sekolah, balai kampung, dan puskesmas, 12) letak alat tanda bahaya, 13) sungai, 14) bukit/lembah, 15) garis batas wilayah kampung, 16) hutan, 17) data penduduk, dan sebagainya.

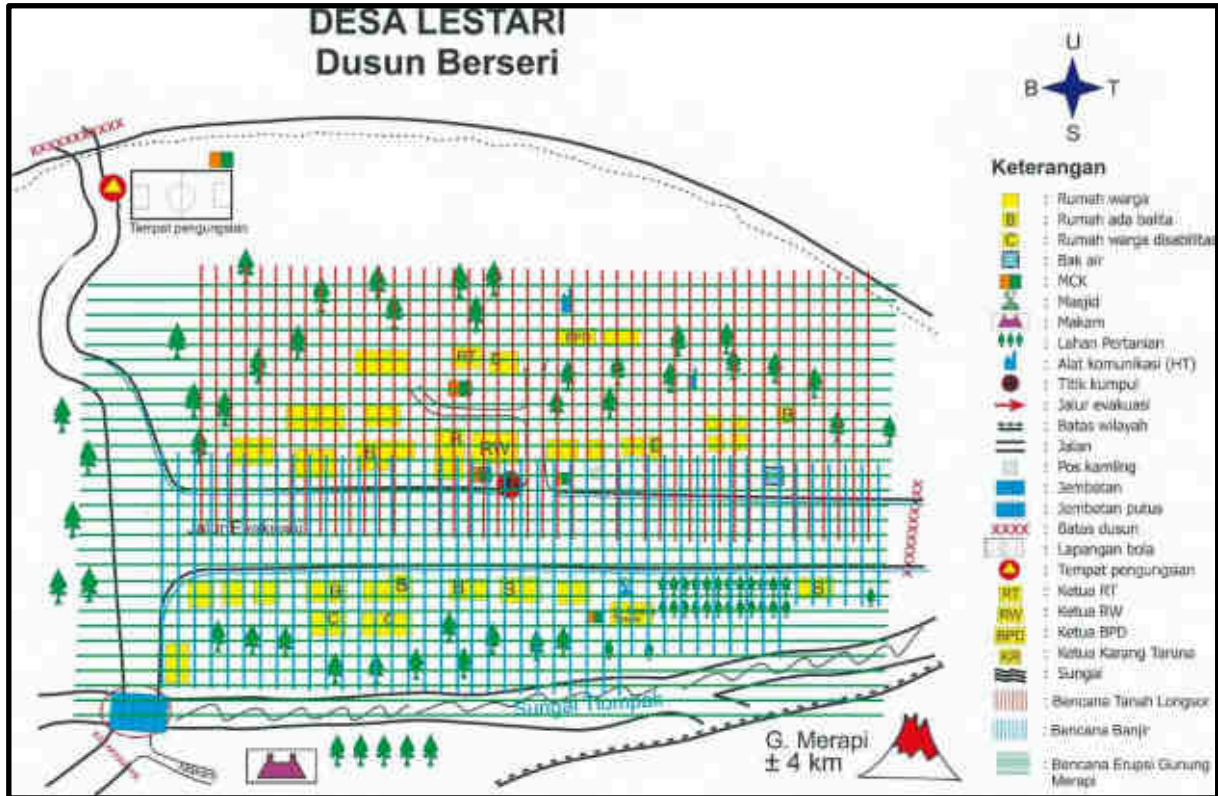
2. Mulai menggambar peta.

Setelah elemen peta disepakati proses menggambar dapat dimulai. Untuk mempermudah proses, penggambaran dapat dimulai dari menggambar garis-garis dasar seperti batas wilayah kampung, jalan, sungai. Baru kemudian memasukkan unsur-unsur peta lainnya. Disarankan menggunakan simbol dan atau warna berbeda untuk setiap unsur peta.

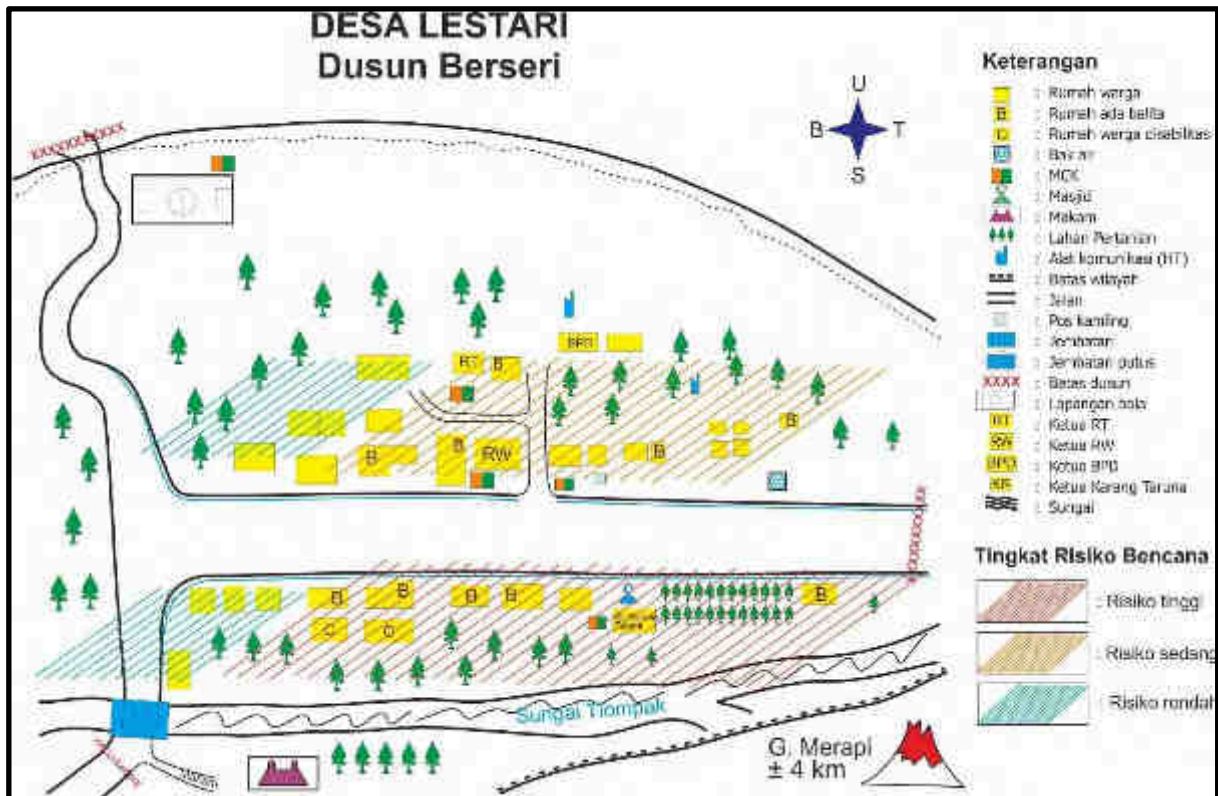
3. Mengecek lapangan.

Usai menggambar, lakukan pengecekan lapangan bersama dengan membawa serta peta hasil penggambaran. Catat temuan penting untuk ditambahkan atau diperbaiki pada peta. Langkah ini perlu untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal penting terlewatkan. Akhiri dengan memberikan apresiasi dan mendiskusikan langkah selanjutnya.

Contoh Peta Ancaman Bencana



Contoh Peta Risiko



## Daftar Referensi

Anonim, 2007, Undang Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

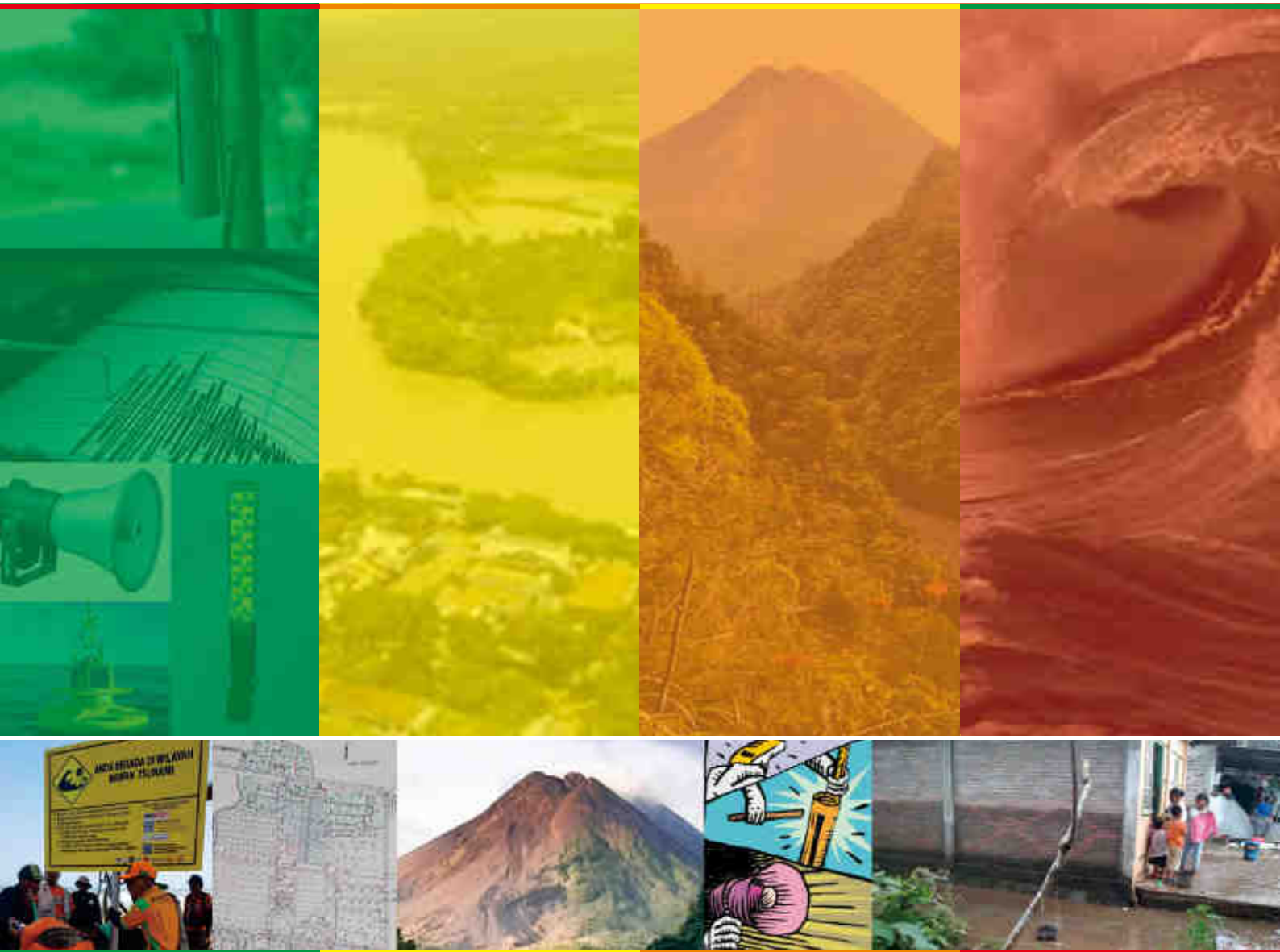
Anonim, 2012, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

Paripurno, ET & Purwanto, S (Ed.), 2010, Panduan Fasilitator Wajib Latih Penanggulangan Bencana Gunungapi, PSMB UPN 'Veteran' Yogyakarta.



# Pengembangan Sistem Peringatan Dini Inklusif

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



# **Pengembangan Sistem Peringatan Dini Inklusif**

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



**Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputian Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

## **Pengembangan Sistem Peringatan Dini Inklusif**

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

### **PENGARAH**

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB

Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

### **PENANGGUNGJAWAB**

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB

Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

### **EDITOR**

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

### **PENYUSUN**

Sigit Purwanto

Pujiono Centre

Sumino

LPTP Surakarta

Wahyu Heniwati

Daya Annisa / MDMC

Anggoro Budi Prasetyo

Aksara

Wana Kristanto

PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

Indra Baskoro Adi

PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

Muhammad Nur Ronggo Dinoyo

LPTP Surakarta

Gandar Mahojwala

KAPPALA Indonesia

Pudji Santosa

Lingkar

Gigih Aditya Pratama

KAPPALA Indonesia

Yugyasmono

Lingkar

Hadi Sutrisno

BNPB

Nurul Maulidhini

BNPB

### **KONTRIBUTOR**

Arif Fadli

BNPB

Virana Fatwa Nurmala

BNPB

Denadia Mutty

BNPB

Rahma Sari Puspita

BNPB

Riski Yufawinda

BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

# Daftar Isi

- Pengantar ..... 2**
- Daftar Isi ..... 4**
  
- A. Materi Pembelajaran ..... 5**
  - A.1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Dasar SPD Inklusif ..... 5
  - A.2. Pengetahuan Tentang Bahaya dan Risiko ..... 6
  - A.3. Pemantauan dan Layanan Peringatan ..... 6
  - A.4. Penyebarluasan dan Komunikasi ..... 6
  - A.5. Kemampuan Merespon ..... 7
  - A.6. Faktor Krusial Sistem Peringatan Dini ..... 8
  
- B. Praktik Pembelajaran ..... 9**
  - B.1. Curah pendapat pengertian dan prinsip-prinsip SPD inklusif ..... 9
  - B.2. Praktek penyusunan Sistem Peringatan Dini Inklusif ..... 9
  
- Daftar Pustaka ..... 16**

# A. Materi Pembelajaran

## A.1. PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP DASAR SPD INKLUSIF

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya (ancaman) bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007 Pasal 1 ayat 8).

Pemerintah, melalui lembaga khusus telah menyediakan informasi peringatan dini bagi masyarakat. Namun peringatan dini oleh lembaga berwenang tersebut seringkali gagal dipahami masyarakat dan direspon menjadi langkah penyelamatan. Membangun ketangguhan bencana pada masyarakat termasuk mengembangkan sistem peringatan dini tepat guna. Suatu sistem peringatan dini tepat guna ditentukan oleh empat unsur prinsip meliputi:

1. Pengetahuan tentang risiko
2. Pemantauan dan layanan peringatan
3. Penyebarluasan dan komunikasi
4. Kemampuan merespon



Gambar 2.1. Unsur sistem peringatan dini (UNISDR)

## **A.2. PENGETAHUAN TENTANG BAHAYA DAN RISIKO**

---

Untuk mengembangkan SPD efektif terlebih dahulu perlu memahami karakter ancaman secara menyeluruh dan potensi bentuk risikonya. Pemahaman tentang karakter ancaman dan bentuk risiko telah dibahas pada Modul Pengkajian Risiko Bencana Partisipatif.

## **A.3. PEMANTAUAN DAN LAYANAN PERINGATAN**

---

Sistem peringatan dini efektif memerlukan adanya pusat peringatan dini yang terpercaya, rutin melakukan pemantauan ancaman, dan pada saat yang tepat mampu mengambil keputusan untuk menyebarkan peringatan kepada masyarakat di kawasan berisiko. Beberapa jenis ancaman semacam tsunami dan gunung api misalnya sudah dilakukan BMKG dan BPPTKG. Namun untuk sebagian jenis ancaman yang lain masih bergantung pada upaya pemantauan oleh masyarakat sendiri. Misalnya jenis ancaman kebakaran, puting beliung, banjir genangan dan longsor.

Hal ini menuntut warga masyarakat untuk membuat kesepakatan agar melakukan pemantauan terhadap ancaman secara rutin, menentukan parameter atau ukuran tingkat bahayanya untuk disampaikan kepada semua warga masyarakat saat bertindak waspada, siaga atau evakuasi. Peringatan dini yang berpusat pada masyarakat merupakan kesepakatan di antara warga mengenai 1) sumber informasi (alam dan resmi) sebagai rujukan bertindak, 2) arti peringatan untuk memutuskan evakuasi mandiri secara tepat waktu. Sumber informasi dapat berasal dari interpretasi umum yang mengartikan tanda-tanda alam, pengalaman, kajian ilmiah, pusat peringatan dini pemerintah. Masing-masing jenis bahaya mempunyai tingkatan dan arti peringatan. Beberapa contoh arti peringatan dapat dilihat di lampiran.

## **A.4. PENYEBARLUASAN DAN KOMUNIKASI**

---

Masyarakat perlu memiliki beragam alat penyebaran peringatan yang disepakati untuk mengingatkan masyarakat di desa waktu yang tepat untuk melakukan evakuasi. Alat-alat komunikasi untuk penyebaran peringatan kepada warga harus dijaga dan dirawat agar selalu berfungsi. Jenis alat komunikasi untuk penyebaran peringatan ini perlu mempertimbangkan kemudahan dalam pembuatan, pengoperasian dan perawatan yang dapat dilakukan oleh warga secara mandiri. Karenanya alat yang berasal dari kearifan lokal disarankan untuk digunakan, misalnya kentongan, bedug, alat tiup / pukul lain. Alat komunikasi berteknologi tinggi atau yang bergantung pada catu daya listrik PLN terkadang tidak selalu handal, misalnya sirine. Alat dengan suku cadang yang didatangkan dari luar daerah juga kadang membuat ketergantungan untuk perawatannya. Setiap warga haruslah mempunyai pemahaman yang sama tentang isi dan arti peringatan yang disepakati untuk dipatuhi bersama.

Di sisi lain, layanan peringatan dini dari pemerintah perlu menjangkau semua orang yang berada di area berisiko bencana. Sistem komunikasi untuk menyampaikan peringatan dini dari pusat peringatan (di bagian hulu) ke masyarakat area berisiko (di bagian hilir) harus diidentifikasi – siapa saja pihak atau ‘perantara’ dalam rantai peringatan dari hulu ke hilir.

Konsep rantai peringatan dirancang sependek mungkin untuk mempercepat penyebaran peringatan dari hulu ke hilir. Para perantara pemegang kewenangan penyebaran peringatan di setiap rantai harus bersepakat dan dipastikan saling terhubung untuk memberi layanan informasi / peringatan.

Perlu diupayakan menggunakan beberapa jenis alat komunikasi penyebaran peringatan untuk memastikan agar i) bila satu alat penyebaran peringatan gagal ada alat komunikasi lain yang dapat digunakan, ii) peringatan dapat diterima oleh lebih banyak masyarakat, dan iii) untuk memperkuat pesan peringatan. Alat penyebaran peringatan perlu ada di tempat-tempat berkumpulnya warga di kawasan berisiko, antara lain permukiman, sekolah, kantor, pasar, rumah sakit, lokasi wisata.

Perlu diperhatikan bahwa di beberapa tempat tertentu di desa juga ada aktivitas warga, mempunyai kesulitan akses untuk menerima informasi / peringatan. Kesulitan akses dapat disebabkan oleh keberadaan warga di area sangat dekat dengan ancaman atau keterbatasan-keterbatasan menuju jalur evakuasi, kendala teknis teknologi komunikasi, atau alasan lainnya. Kelompok-kelompok rentan ini tetap perlu strategi memahami peringatan dini (alam atau berdasar kearifan lokal) untuk secara mandiri bersiap menyelamatkan diri secara tepat waktu

Seberapa besar peringatan dapat mengurangi dampak suatu peristiwa bencana akan sangat bergantung pada beberapa faktor, misalnya: jarak waktu yang tersedia antara keluarnya peringatan sampai datangnya peristiwa yang dapat menimbulkan bencana, kebenaran pesan peringatan, kesiapan perencanaan pra bencana dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk memiliki rencana penyelamatan diri secara tepat waktu (Lihat Modul Rencana Evakuasi), serta keputusan dan tindakan warga masyarakat untuk menyelamatkan diri.

## **A.5. KEMAMPUAN MERESPON**

---

Setelah memperoleh informasi peringatan dini, masyarakat harus melakukan tindakan yang sesuai dengan ancaman. Untuk itu masyarakat harus memiliki prosedur yang mengatur tentang;

1. Siapa menerima informasi peringatan dini,
2. Mekanisme menetapkan tindakan sesuai tingkat ancaman,
3. Rencana evakuasi dan strategi pemberian bantuan evakuasi apabila tingkat ancaman membahayakan.

Prosedur ini harus disepakati dan dipatuhi. Tetapi prosedur yang tepat guna memiliki syarat;

1. Berbahasa tegas sehingga tidak menimbulkan kebingungan,
2. Sederhana sehingga mudah dipahami,
3. Mudah diingat dan
4. Masuk akal dilakukan.
5. Memiliki alternatif komunikasi bagi penyandang disabilitas (tunarungu, tunagrahita)



## **A.6. FAKTOR KRUSIAL SISTEM PERINGATAN DINI**

---

1. Ancaman berskala mikro sehingga luput dari pantauan lembaga berwenang. Contoh misalnya ancaman tanah longsor skala kecil di suatu kampung.
2. Ancaman bersifat lokal dan sanga tiba-tiba atau jeda waktu antara tanda-tanda dengan kejadian sangat pendek (rapid-on set). Contoh misalnya ancaman seperti kebakaran, angin puting beliung, banjir bandang.
3. Peringatan dini oleh lembaga berwenang gagal menjangkau desa-desa terpencil karena tidak tersedia infrastruktur atau teknologi.
4. Rantai penyampaian peringatan dini terlalu panjang atau berjenjang sehingga telat sampai.
5. Isi peringatan dini terlalu abstrak, tidak tegas, sulit dipahami sehingga menghasilkan tindakan keliru.
6. Peringatan dini peka terhadap kelompok disabilitas (tuna rungu, tunagrahita)

## B. Praktik Pembelajaran

### B.1. CURAH PENDAPAT PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP SPD INKLUSIF

---

Setelah mengikuti penjelasan tentang pengertian dan prinsip-prinsip SPD peserta diminta mencurahkan pendapatnya tentang pengertian dan prinsip-prinsip SPD menggunakan lembar kerja 1 di bawah ini.

Lembar kerja 1. Curah pendapat pengertian dan prinsip-prinsip SPD

1.	Apa Pengertian SPD?
2.	Apa pengertian SPD tepat guna di masyarakat?
3.	Apa penyebab SPD lembaga pemerintah seringkali gagal dipahami masyarakat?
4.	Apa saja empat prinsip SPD efektif menurut UNISDR?

### B.2. PRAKTEK PENYUSUNAN SISTEM PERINGATAN DINI INKLUSIF

---

Sistem peringatan dini inklusif merupakan rangkaian suatu rancangan tindakan memperoleh peringatan, menyebarluaskan dan bentuk tindakan/respon.

Untuk menyusun sistem peringatan dini diperlukan dasar pertimbangan berupa karakter ancaman. Gunakan tabel karakter ancaman hasil pengkajian risiko bencana. (Modul 2. Pengkajian Risiko Bencana Partisipatif).

Langkah penyusunan sistem peringatan dini meliputi:

1. Penetapan pemantauan dan peringatan bahaya; tatacara melakukan pemantauan atau memperoleh informasi bahaya.
2. Penetapan penyebarluasan peringatan bahaya; menentukan tata cara penyebarluasan peringatan bahaya kepada masyarakat.
3. Penetapan respon/tindakan terhadap peringatan.

Langkah penyusunan sistem peringatan dini dapat menggunakan lembar kerja di bawah ini:

Lembar kerja 2. Penyusunan sistem peringatan dini

<b>Jenis ancaman</b> : .....	
<b>Desa/Kel</b> : .....	
<b>Kecamatan</b> : .....	
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....	
<b>Provinsi</b> : .....	
<b>Pemantauan dan Peringatan Bahaya</b>	
Sumber peringatan bahaya	
Bentuk peringatan bahaya	
Cara pemantauan bahaya	
Cara penyampaian bahaya	
Cara penyampaian peringatan bahaya	
Cara memastikan kebenaran peringatan	
<b>Penyebarluasan Peringatan Bahaya</b>	
Penyampai peringatan	
Sasaran peringatan	
Cara penyampaian peringatan umum dan khusus difabel	
Bentuk peringatan	
<b>Respon/Tindakan Terhadap Peringatan</b>	
Tindakan RT/RW	
Tindakan Masyarakat	

Tabel 2.1. Contoh sistem peringatan dini inklusif banjir

<b>Jenis ancaman : Banjir</b> <b>Desa/Kel : Pakansari</b> <b>Kecamatan : Cibinong</b> <b>Kabupaten/Kota : Bogor</b> <b>Provinsi : Jawa Barat</b>	
<b>Pemantauan dan Peringatan Bahaya</b>	
Sumber peringatan bahaya	Petugas yang diberi Mandat oleh masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengelola Situ Cikaret</li> <li>● Masyarakat di bantaran sungai</li> <li>● Forum PRB Desa</li> <li>● Pihak lain baik formal maupun non formal</li> </ul>
Bentuk peringatan bahaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Informasi adanya peningkatan debit dan tinggi muka air situ</li> <li>● Informasi peningkatan tinggi muka air sungai</li> <li>● Informasi dengan sirine siaga banjir (untuk buta)</li> <li>● Informasi dengan warna siaga banjir (untuk tuli)</li> </ul>
Cara pemantauan bahaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengamatan tinggi dan volume muka air situ dan sungai</li> <li>● Pemantauan curah hujan</li> </ul>
Cara penyampaian peringatan bahaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengelola situ atau masyarakat melaporkan tanda-tanda banjir ke Lurah/perangkat atau RT/RW di kawasan rawan banjir</li> <li>● Melalui grup <i>Whatsapp</i></li> <li>● Menggunakan pengeras suara</li> </ul>
Cara memastikan kebenaran peringatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menghubungi pihak pengelola Situ Cikaret, BPBD, dan SAR setempat.</li> </ul>
<b>Penyebarluasan Peringatan Bahaya</b>	
Penyampai peringatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lurah/perangkat dan RT/RW</li> <li>● Forum yang telah ditunjuk menyebarluaskan peringatan</li> </ul>
Sasaran peringatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RW 01: RT 01, 02, 03, 04, 05</li> <li>● RW 03: RT 07</li> <li>● Masyarakat di sekitar sungai terutama renta, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya</li> </ul>
Cara penyampaian peringatan umum dan khusus difabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melalui grup <i>Whatsapp</i>, HT, dan Telepon</li> <li>● Melalui penjemputan langsung kepada masyarakat rentan dan disabilitas.</li> <li>● Menggunakan kentongan dan pengeras suara</li> </ul>
Bentuk peringatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Seluruh masyarakat diminta untuk tidak panik</li> <li>● Seluruh masyarakat di daerah rawan banjir untuk segera mengamankan barang berharga.</li> <li>● Seluruh masyarakat diminta untuk menjauhi sungai dan daerah sering banjir lainnya.</li> <li>● Seluruh masyarakat melakukan evakuasi</li> </ul>
<b>Respon/Tindakan Terhadap Peringatan</b>	
Tindakan RT/RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verifikasi/memastikan kebenaran info peringatan ke kepala dusun</li> <li>● Mempersiapkan warga untuk melakukan evakuasi</li> <li>● Menyiapkan tempat evakuasi</li> </ul>
Tindakan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menjauhi/tidak beraktivitas di sungai</li> <li>● Mengemas surat penting dan barang berharga lainnya</li> <li>● Menyelamatkan diri</li> <li>● Mengevakuasi kelompok rentan (difabel, lansia, anak, ibu hamil, dll)</li> </ul>

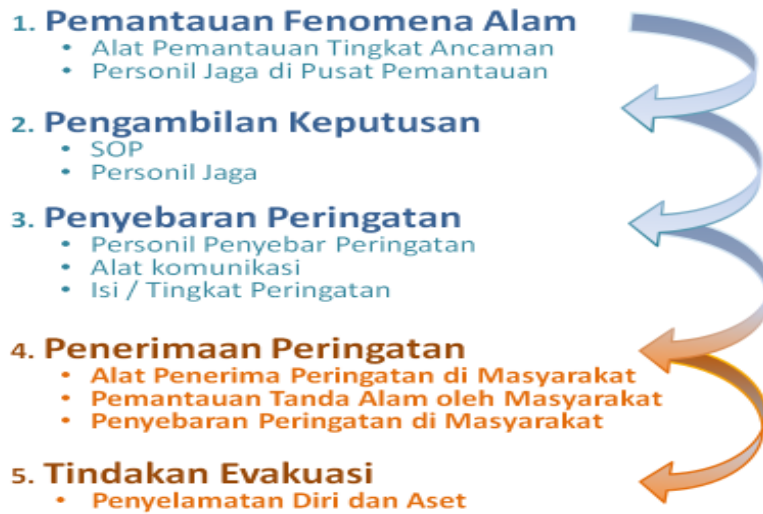
Tabel 2.2. Contoh sistem peringatan dini inklusif tsunami

<b>Jenis ancaman : Tsunami</b> <b>Desa/Kel : Prigi</b> <b>Kecamatan : Watulimo</b> <b>Kabupaten/Kota : Trenggalek</b> <b>Provinsi : Jawa Timur</b>	
<b>Pemantauan dan Peringatan Bahaya</b>	
Sumber peringatan bahaya	Organisasi atau personal yang diberi Mandat oleh masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• BMKG</li> <li>• SAR Pantai</li> </ul>
Bentuk peringatan bahaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi dengan sirine siaga tsunami (untuk buta)</li> <li>• Informasi dengan warna siaga tsunami (untuk tuli)</li> <li>• Notifikasi Info BMKG dan InaRisk</li> <li>• Gempa</li> </ul>
Cara pemantauan bahaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau pemberitahuan langsung dari pihak berwenang (BMKG dan SAR Pantai)</li> </ul>
Cara penyampaian peringatan bahaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notifikasi Info BMKG dan InaRisk</li> <li>• Melalui Grup <i>Whatsapp</i></li> <li>• Sirine</li> <li>• Pengeras suara</li> </ul>
Cara memastikan kebenaran peringatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima informasi dari pihak berwenang yang jelas keakuratannya (BMKG dan BNPB)</li> </ul>
<b>Penyebarluasan Peringatan Bahaya</b>	
Penyampai peringatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak desa yang diberi kewenangan untuk menginformasikan</li> <li>• BMKG dan BNPB melalui notifikasi aplikasi</li> </ul>
Sasaran peringatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang berada di pesisir pantai</li> <li>• Pengunjung pantai dan pemancing</li> </ul>
Cara penyampaian peringatan umum dan khusus difabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk umum, melalui sirine, grup <i>Whatsapp</i>, dan pengeras suara</li> <li>• Ketua RT dan tim melakukan penjemputan langsung untuk difabel yang hidup sendiri</li> </ul>
Bentuk peringatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh masyarakat diminta untuk tidak panik</li> <li>• Seluruh masyarakat di daerah rawan tsunami untuk segera mengamankan barang berharga.</li> <li>• Seluruh Ketua RT dan tim untuk menjemput difabel dan kelompok rentan lain yang hidup sendiri</li> <li>• Seluruh masyarakat diminta untuk menjauhi pantai dan melakukan evakuasi</li> </ul>
<b>Respon/Tindakan Terhadap Peringatan</b>	
Tindakan RT/RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penjemputan langsung bersama tim ke difabel dan kelompok rentan lain yang hidup sendiri</li> <li>• Menyelamatkan diri</li> </ul>
Tindakan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyelamatan barang berharga dan melakukan evakuasi seluruh anggota keluarga.</li> </ul>

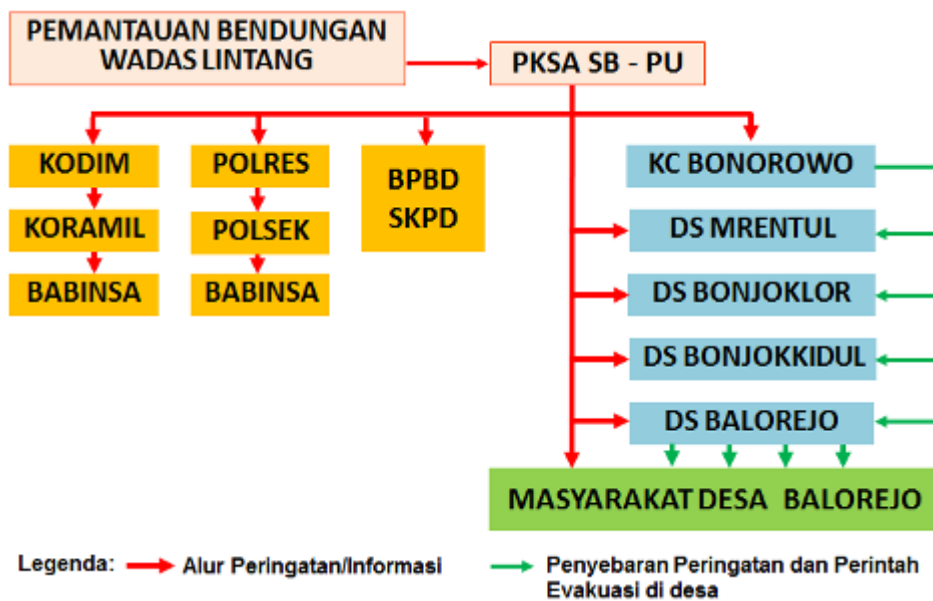
Tabel 2.2. Contoh sistem peringatan dini inklusif awan panas

<b>Jenis ancaman : Awan Panas Gunung Merapi</b> <b>Desa/Kel : Purwobinangun</b> <b>Kecamatan : Pakem</b> <b>Kabupaten/Kota : Sleman</b> <b>Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	
<b>Pemantauan dan Peringatan Bahaya</b>	
Sumber peringatan bahaya	Organisasi atau personal yang diberi Mandat oleh masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Petugas Pos Pengamatan Gunung Merapi/BPPTKG</li> <li>● Warga masyarakat yang berdekatan dengan Gunung Merapi</li> </ul>
Bentuk peringatan bahaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Status kenaikan aktivitas Gunung Merapi terkini</li> <li>● Jarak luncuran awan panas guguran Gunung Merapi selama kurun waktu enam jam ataupun mingguan oleh BPPTKG</li> <li>● Informasi dengan sirine siaga erupsi gunungapi (untuk buta)</li> <li>● Informasi dengan warna siaga erupsi gunungapi (untuk tuli)</li> </ul>
Cara pemantauan bahaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melihat secara visual langsung berupa asap, guguran kubah lava, radius/jarak material guguran yang dilakukan oleh masyarakat setempat/terdekat</li> <li>● mencermati laporan aktivitas magma dan gunungapi (Magma and Volcanic Activity Report) yang disebarluaskan PVMBG</li> </ul>
Cara penyampaian peringatan bahaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melalui jalur alat komunikasi warga lokal/setempat yang sudah tersedia dan disepakati bersama</li> <li>● Media jalur grup <i>Whatsapp</i>, baik keluarga, RT, RW, maupun dusun.</li> <li>● Membunyikan sirine, pengeras suara, dan memukul kentongan yang sudah disepakati</li> </ul>
Cara memastikan kebenaran peringatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memastikan ke pos pengamatan Gunung Merapi/BPPTKG yang bertanggungjawab</li> </ul>
<b>Penyebarluasan Peringatan Bahaya</b>	
Penyampai peringatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pos Pengamatan Gunung Merapi</li> <li>● Warga yang mengetahui pertama kali adanya bahaya Awan Panas</li> </ul>
Sasaran peringatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Masyarakat yang bermukim di KRB III Gunung Merapi radius 5 km dari puncak</li> </ul>
Cara penyampaian peringatan umum dan khusus difabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyampaian melalui grup <i>Whatsapp</i>, sirine, pengeras suara, dan memukul kentongan</li> <li>● Untuk difabel, bisa memberi informasi ke pendamping/keluarga</li> <li>● Untuk difabel yang hidup sendiri, melakukan penjemputan langsung</li> </ul>
Bentuk peringatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Seluruh masyarakat diminta untuk tidak panik</li> <li>● Seluruh Ketua RT atau tim yang telah ditunjuk untuk menjemput difabel dan kelompok rentan lain yang hidup sendiri</li> <li>● Seluruh masyarakat berkumpul di titik kumpul sambil menunggu perkembangan informasi dari yang berwenang</li> <li>● Segera melakukan evakuasi dengan langsung membawa tas siaga yang sudah disiapkan</li> </ul>
<b>Respon/Tindakan Terhadap Peringatan</b>	
Tindakan RT/RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Koordinasi dengan relawan desa dan pemerintah desa setempat</li> <li>● Memberikan himbuan kepada warga untuk mempersiapkan</li> <li>● evakuasi/mengungsi</li> <li>● Menyelamatkan diri</li> </ul>
Tindakan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan penyelamatan barang berharga dan tas siaga</li> <li>● Melakukan evakuasi mandiri</li> <li>● Segera ke titik kumpul/aman yang jauh dari sungai</li> <li>● Dalam konteks Gunungapi ada tingkatan status/level Normal, Waspada, Siaga dan Awak, tindakan masyarakat segera</li> </ul>

## Bagan Alur Peringatan Dini



Gambar 3.1. Contoh bagan alur peringatan dini



Gambar 3.2. Contoh rantai alur peringatan dini erupsi G. Merapi



Gambar 3.3. Contoh rantai alur peringatan dini ancaman Awan Panas G. Merapi



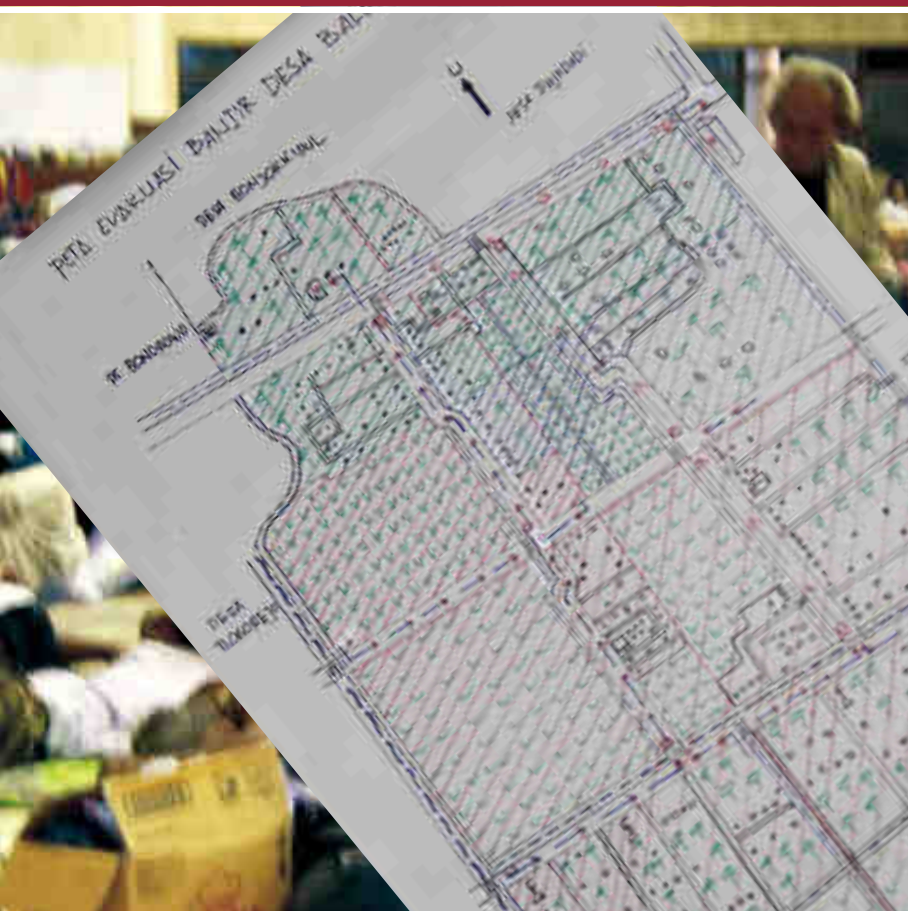
## Daftar Pustaka

Anonim, UNISDR, 2006, Membangun Sistem Peringatan Dini: Sebuah Daftar Periksa

Paripurno, ET & Purwanto, S (Ed.), 2010, Panduan Fasilitator Wajib Latih Penanggulangan Bencana Gunungapi, PSMB UPN 'Veteran' Yogyakarta

# Penyusunan Rencana Evakuasi

Modul Teknis Fasilitas Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



# Penyusunan Rencana Evakuasi

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputan Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

## **Penyusunan Rencana Evakuasi**

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

### **PENGARAH**

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB  
Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

### **PENANGGUNGJAWAB**

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB  
Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

### **EDITOR**

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

### **PENYUSUN**

Sigit Purwanto	Pujiono Centre
Sumino	LPTP Surakarta
Wahyu Heniwati	Daya Annisa / MDMC
Anggoro Budi Prasetyo	Aksara
Wana Kristanto	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Indra Baskoro Adi	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Muhammad Nur Ronggo Dinoyo	LPTP Surakarta
Gandar Mahojwala	KAPPALA Indonesia
Pudji Santosa	Lingkar
Gigih Aditya Pratama	KAPPALA Indonesia
Yugyasmono	Lingkar
Hadi Sutrisno	BNPB
Nurul Maulidhini	BNPB

### **KONTRIBUTOR**

Arif Fadli	BNPB
Virana Fatwa Nurmala	BNPB
Denadia Mutty	BNPB
Rahma Sari Puspita	BNPB
Riski Yufawinda	BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

# Daftar Isi

<b>Pengantar .....</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>4</b>
<b>A. Materi Pembelajaran .....</b>	<b>5</b>
A.1. Pengertian Dan Prinsip-prinsip Evakuasi.....	5
A.2. Prinsip-prinsip perencanaan evakuasi .....	5
A.3. Terminologi Dalam Rencana Evakuasi .....	6
A.4. Penyusunan Strategi Evakuasi .....	8
A.5. Penyusunan Peta Evakuasi .....	8
<b>B. Praktik Pembelajaran .....</b>	<b>9</b>
B.1. Menyusun Rencana Evakuasi.....	9
B.2. Penetapan Jalur Evakuasi .....	14
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>15</b>

## A. Materi Pembelajaran

### A.1. PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP EVAKUASI

Masyarakat di kawasan rawan bencana wajib memiliki rencana evakuasi untuk penyelamatan diri beserta harta bendanya ke tempat lebih aman sebelum datang ancaman. Undang-undang PB No 24/2007 pada Pasal 45, ayat 2, butir e berbunyi “Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui:” e. penyiapan lokasi evakuasi.

### A.2. PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN EVAKUASI

Tabel 2.1. Prinsip-prinsip perencanaan evakuasi

Prinsip	Penjelasan
Partisipatif	Setiap keputusan dalam perencanaan evakuasi merupakan kesepakatan bersama masyarakat
Efektif	Tidak membingungkan Mudah dipahami seluruh masyarakat Mudah diingat
Menjauhi ancaman	Evakuasi bertujuan menjauhi ancaman, maka arah jalur evakuasi harus menjauhi ancaman
Memprioritaskan kelompok rentan dan penyandang disabilitas	Kelompok rentan menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan evakuasi
Penyelamatan diri dan aset penghidupan	Evakuasi bertujuan menyelamatkan nyawa dan aset-aset penghidupan dari ancaman
Mandiri	Evakuasi merupakan keputusan internal masyarakat suatu desa atas kesadaran risiko

### A.3. TERMINOLOGI DALAM RENCANA EVAKUASI

Tabel 2.2. Pengertian umum dan syarat, istilah dalam perencanaan evakuasi

Istilah / Terminologi	Pengertian Umum	Syarat
Tempat Evakuasi	Ruang perlindungan berupa bangunan dan/atau lahan terbuka dengan perlengkapan untuk menampung warga masyarakat terdampak bencana (penyintas) selama masa tanggap darurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuannya disepakati dan diketahui oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana</li> <li>2. Merupakan lokasi paling aman dari segala bentuk ancaman utama maupun ancaman ikutan sebagai dampak dari ancaman utama</li> <li>3. Merupakan lokasi terdekat dengan tempat asal warga masyarakat terdampak</li> </ol>
Tempat Evakuasi Sementara (TES)	Perlindungan penyintas bersifat sementara karena 1) ada potensi peningkatan intensitas ancaman dan/atau 2) sumber daya tersedia terbatas/tidak memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mudah dijangkau oleh bantuan kemanusiaan dari pihak luar</li> <li>5. Luasannya cukup untuk menampung seluruh warga terdampak</li> <li>6. Tersedia dan/atau dekat dengan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi hunian/tempat tinggal, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pangan dan gizi, dan pendidikan.</li> </ol>
Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	Tempat perlindungan penyintas bersifat permanen dengan sumberdaya lebih memadai dan aman dari segala bentuk ancaman	
Jalur Evakuasi	Jalan dan/atau arah disepakati untuk menghindari ancaman menuju TES atau TEA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuannya disepakati dan diketahui oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana</li> <li>2. Cukup luas untuk menampung arus penyintas dan kendaraan pengangkutnya</li> <li>3. Arah jalan menjauhi sumber ancaman</li> <li>4. Tidak terlanda oleh ancaman utama</li> <li>5. Paling aman dari segala bentuk ancaman ikutan</li> <li>6. Merupakan jalur terdekat menuju TES atau TEA</li> <li>7. Dilengkapi rambu penunjuk arah menuju TES atau TEA</li> </ol>
Peta Evakuasi	Gambar dua dimensi atau instalasi multi dimensi (maket/miniatur) memuat informasi tentang daerah rawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didasarkan pada informasi memadai tentang jenis ancaman dan karakternya</li> </ol>



Istilah / Terminologi	Pengertian Umum	Syarat
	bencana, sumber ancaman, perkiraan sebaran ancaman, jalur atau arah evakuasi, dan tempat-tempat evakuasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Disusun dan disepakati oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana</li> <li>3. Disosialisasikan secara terus menerus ke seluruh warga masyarakat kawasan rawan bencana</li> <li>4. Mudah dipahami semua golongan warga masyarakat</li> <li>5. Mengandung pengertian tegas, tidak bermakna ganda</li> <li>6. Disahkan oleh otoritas pemerintah setempat</li> <li>7. Ditaati oleh seluruh warga masyarakat</li> </ol>
Strategi Evakuasi	Serangkaian keputusan mengatur cara-cara evakuasi efektif dalam upaya penyelamatan diri warga serta harta benda sebelum ancaman tiba	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disusun dan disepakati oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana</li> <li>2. Disosialisasikan secara terus menerus ke seluruh warga masyarakat kawasan rawan bencana</li> <li>3. Memuat pembagian peran dan penggunaan alat pengangkut</li> <li>4. Mengutamakan penyelamatan kelompok rentan (berkemampuan beda, sakit, lansia, anak, ibu hamil, balita dan ibu menyusui)</li> <li>5. Didasarkan pada analisis intensitas (kekuatan, sebaran/luasan) ancaman</li> <li>6. Memuat cara-cara penyelamatan harta benda</li> <li>7. Memuat cara-cara pengamanan harta benda ditinggalkan di lokasi rawan bencana</li> </ol>

Dalam mengembangkan rencana evakuasi efektif akan digunakan istilah-istilah (terminologi) yakni 1) tempat evakuasi, 2) jalur evakuasi, 3) peta evakuasi, dan 4) strategi atau cara/tahapan/hirarki evakuasi. Setiap terminologi mengandung pengertian dasar serta syaratnya masing-masing sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

#### **A.4. PENYUSUNAN STRATEGI EVAKUASI**

---

Strategi evakuasi merupakan serangkaian keputusan mengatur cara-cara evakuasi efektif dalam upaya penyelamatan diri warga serta harta benda sebelum ancaman tiba.

Pasal 55, ayat (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Maka dalam penyusunan strategi evakuasi, beberapa prinsip penting adalah

1. Waktu evakuasi, penentuan kapan melakukan evakuasi
2. Kecepatan, keamanan, menghindari ancaman
3. Jumlah penduduk yang akan dievakuasi serta jenis harta bendanya yang akan dibawa
4. Ketersediaan alat angkut, peralatan dan operatornya
5. Pembagian tugas dan tanggungjawab dalam evakuasi
6. Rambu evakuasi sesuai SNI

#### **A.5. PENYUSUNAN PETA EVAKUASI**

---

Peta evakuasi disusun menggunakan peta risiko hasil pengkajian risiko bencana. Setelah strategi evakuasi ditetapkan, selanjutnya peta jalur evakuasi harus digambar. Tujuan menggambar peta evakuasi agar perencanaan evakuasi menjadi bentuk visual/gambar dan mudah dipahami seluruh masyarakat.

## B. Praktik Pembelajaran

### B.1. MENYUSUN RENCANA EVAKUASI

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta diminta menyusun rencana evakuasi. Dengan langkah di bawah ini.

#### B.1.1. Identifikasi Penduduk Kawasan Rawan Bencana

Identifikasi penduduk kawasan rawan bencana dilakukan berdasarkan hasil kajian risiko bencana.

Lembar kerja 1. Identifikasi penduduk kawasan rawan bencana

Jenis ancaman : ..... Dusun/Sejenis : ..... Desa/Kelurahan : ..... Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota : ..... Provinsi : .....								
RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Laki-Laki	Perempuan	Balita	Lansia	Bumil	Difabel

Contoh Tabel 1.1. Identifikasi penduduk kawasan rawan bencana banjir

Jenis Ancaman : Banjir Dusun/Sejenis : I Desa/Kelurahan : Pakansari Kecamatan : Cibinong Kabupaten/Kota : Bogor Provinsi : Jawa Barat								
RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Laki-Laki	Perempuan	Balita	Lansia	Ibu Hamil	Difabel
01	235	721	354	367	65	30	9	3
02	401	1431	701	730	136	92	25	5
03	314	1065	547	518	118	85	25	8
04	289	812	405	407	76	32	18	1

Contoh Tabel 1.2. Identifikasi penduduk kawasan rawan bencana tsunami

Jenis Ancaman : Tsunami Dusun/Sejenis : III Desa/Kelurahan : Prigi Kecamatan : Watulimo Kabupaten/Kota : Trenggalek Provinsi : Jawa Timur								
RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Laki-Laki	Perempuan	Balita	Lansia	Ibu Hamil	Difabel
06	89	386	189	197	12	33	2	1
07	56	156	72	84	23	15	0	0
08	72	301	160	141	18	21	5	4
09	102	613	301	312	37	64	13	3

Contoh Tabel 1.3. Identifikasi penduduk kawasan rawan bencana erupsi G. Merapi

Jenis Ancaman : Awan Panas G. Merapi Dusun/Sejenis : Turgo Desa/Kelurahan : Purwobinangun Kecamatan : Pakem Kabupaten/Kota : Sleman Provinsi : DIY								
RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Laki-Laki	Perempuan	Balita	Lansia	Ibu Hamil	Difabel
01	65	182	84	98	10	7	2	3
02	32	83	39	44	5	8	1	5
03	49	130	67	63	11	6	0	8
04	43	112	51	61	4	5	3	1

### B.1.2. Identifikasi Lokasi Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir

Lembar kerja 2. Identifikasi Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir

Jenis ancaman : ..... RT : ..... Dusun/Sejenis : ..... Desa/Kelurahan : ..... Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota : ..... Provinsi : .....						
Nama	Nama Kepala Keluarga	Usia	Jenis Kelamin	Alamat /RT/RW	Tempat	
					TES	TEA

Tabel 1.4. Contoh Identifikasi Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir Bencana Banjir

Jenis Ancaman : Banjir RT : 1 Dusun/Sejenis : Cibi Desa/Kelurahan : Pakansari Kecamatan : Cibinong Kabupaten/Kota : Bogor Provinsi : Jawa Barat						
Nama	Nama Kepala Keluarga	Usia	Jenis Kelamin	Alamat /RT/RW	Tempat	
					TES	TEA
Toyib Thohir	Toyib Thohir	89 th	Laki-laki	Gg. Namstile No 46 Pakansari	Masjid Al Baitussaajiddin	Stadion Pakansari
Maemunah	Toyib Thohir	91 th	Perempuan	Gg. Namstile No 46 Pakansari	Masjid Al Baitussaajiddin	Stadion Pakansari

Tabel 1.5. Contoh Identifikasi Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir Bencana Erupsi G. Merapi

<b>Jenis ancaman</b> : Awan Panas G.Merapi <b>RT</b> : 3 <b>Dusun</b> : Turgo <b>Desa/Kelurahan</b> : Purwobinangun <b>Kecamatan</b> : Pakem <b>Kabupaten/Kota</b> : Sleman <b>Provinsi</b> : DIY						
Nama	Nama Kepala Keluarga	Usia	Jenis Kelamin	Alamat /RT/RW	Tempat	
					TES	TEA
Baskoro A	Baskoro A	40 thn	Laki-laki	Turgo, RT 03/02	SD Sanjaya Tritis	Barak Utama Pengungsi Desa Purwobinangun
Darminah	Baskoro A	32 thn	Perempuan	Turgo, RT 03/02	SD Sanjaya Tritis	Barak Utama Pengungsi Desa Purwobinangun
Galen Angkasa Baskoro	Baskoro A	7 bulan	Laki – laki	Turgo, RT 03/02	SD Sanjaya Tritis	Barak Utama Pengungsi Desa Purwobinangun

### B.1.3. Identifikasi Kapasitas Untuk Evakuasi

Lembar kerja 3. Identifikasi kapasitas untuk evakuasi

<b>Jenis ancaman</b> : ..... <b>Dusun/Sejenis</b> : ..... <b>Desa/Kelurahan</b> : ..... <b>Kecamatan</b> : ..... <b>Kabupaten/Kota</b> : ..... <b>Provinsi</b> : .....								
RT	Handy Talky	Megaphone/Toa	Pengeras Suara	Kentongan	Truk	Mobil	Motor	Perahu Karet

Tabel 1.7. Contoh Identifikasi kapasitas untuk evakuasi bencana banjir

<b>Jenis Ancaman</b> : Banjir <b>Dusun/Sejenis</b> : Cibi <b>Desa/Kelurahan</b> : Pakansari <b>Kecamatan</b> : Cibinong <b>Kabupaten/Kota</b> : Bogor <b>Provinsi</b> : Jawa Barat								
RT	HandyTalky	Megaphone/Toa	Pengeras Suara	Kentongan	Truk	Mobil	Motor	Perahu karet
01	2	3	4	0	3	14	54	1
02	4	2	5	0	1	16	64	1
03	3	1	4	2	1	19	69	2
04	2	1	3	1	2	21	58	1

Tabel 1.8. Contoh Identifikasi kapasitas untuk evakuasi bencana tsunami

<b>Jenis Ancaman</b> : Tsunami <b>Dusun/Sejenis</b> : Vatu <b>Desa/Kelurahan</b> : Prigi <b>Kecamatan</b> : Watulimo <b>Kabupaten/Kota</b> : Trenggalek <b>Provinsi</b> : Jawa Timur								
RT/RW/ Dusun	Handy Talky	Megaphone/ Toa	Pengeras Suara	Kentongan	Truk	Mobil	Motor	Becak Motor
01	4	2	3	5	1	3	23	4
02	6	1	1	6	2	4	21	2
03	7	1	2	2	1	3	18	8
04	5	0	2	4	1	6	19	0

#### B.1.4. Identifikasi Kapasitas Lokasi Pengungsian

Lembar kerja 4. Identifikasi kapasitas lokasi pengungsian

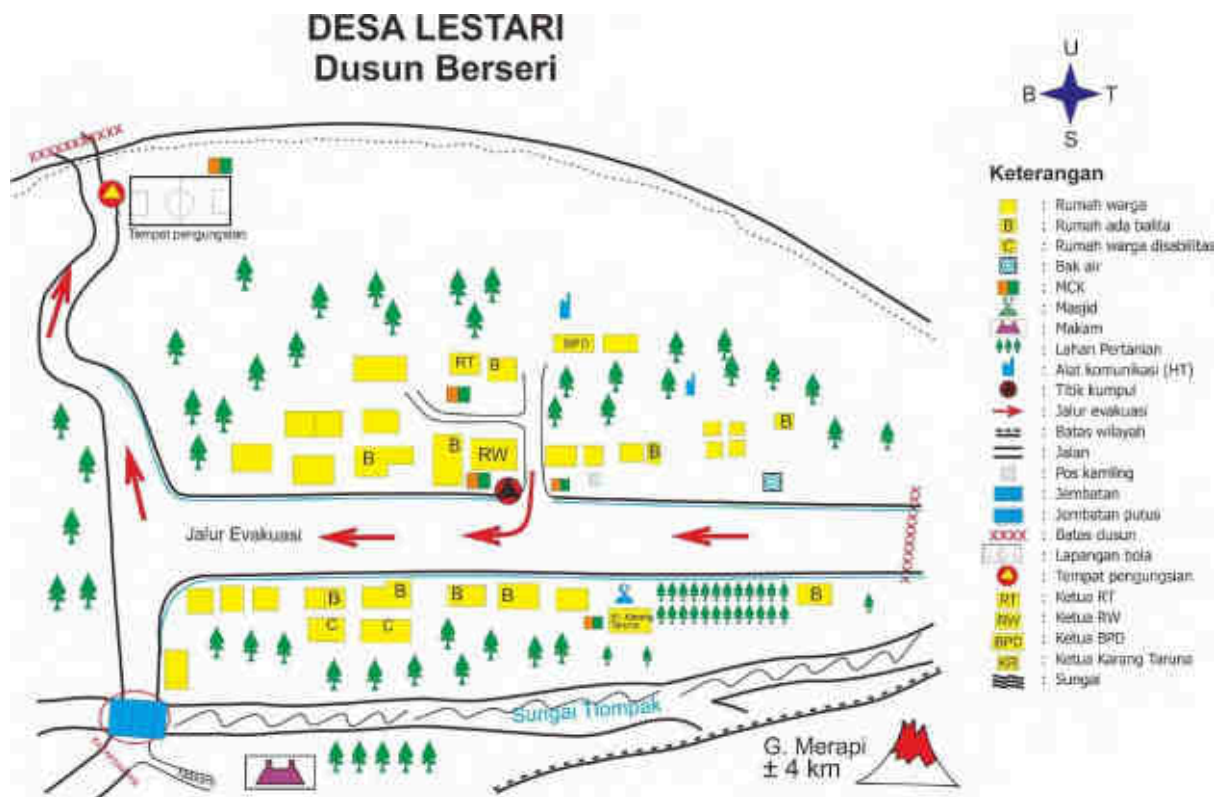
<b>Jenis ancaman</b> : ..... <b>Desa/Kelurahan</b> : ..... <b>Kecamatan</b> : ..... <b>Kabupaten/Kota</b> : ..... <b>Provinsi</b> : .....								
Lokasi Pengungsian	Asal Pengungsi	Jarak Dari Daerah Asal	Daya Tampung	Daya Dukung				
				WC	Sumur	Instalasi Kelistrikan	Instalasi Air	Genset

Tabel 1.8. Contoh Identifikasi kapasitas lokasi pengungsian Awan Panas G. Merapi

<b>Jenis ancaman</b> : Awan Panas G. Merapi <b>Desa/Kelurahan</b> : Purwobinangun <b>Kecamatan</b> : Pakem <b>Kabupaten/Kota</b> : Sleman <b>Provinsi</b> : DIY								
Lokasi Pengungsian	Asal Pengungsi	Jarak Dari Daerah Asal	Daya Tampung	Daya Dukung				
				WC	Sumur	Instalasi Kelistrikan	Instalasi Air	Genset
Stadion Pakansari	Desa Pakansari	1 km	3000 jiwa	48	1	1,2 MW	PDAM	20
MTS Turgo	Dusun Prigi	1.2 km	120	12	2	1 MW	Sumur	-

## B.2. PENETAPAN JALUR EVAKUASI

Gunakan peta hasil pengkajian risiko bencana untuk menentukan jalur evakuasi





## Daftar Pustaka

Paripurno, ET & Purwanto, S (Ed.), 2010, Panduan Fasilitator Wajib Latih Penanggulangan Bencana Gunungapi, PSMB UPN 'Veteran' Yogyakarta

# Pengembangan Tim Relawan Desa/Kelurahan

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



# **Pengembangan Tim Relawan Desa/Kelurahan**

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



**Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputian Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

## **Pengembangan Tim Relawan Desa/Kelurahan**

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

### **PENGARAH**

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB  
Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

### **PENANGGUNGJAWAB**

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB  
Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

### **EDITOR**

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

### **PENYUSUN**

Sigit Purwanto	Pujiono Centre
Sumino	LPTP Surakarta
Wahyu Heniwati	Daya Annisa / MDMC
Anggoro Budi Prasetyo	Aksara
Wana Kristanto	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Indra Baskoro Adi	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Muhammad Nur Ronggo Dinoyo	LPTP Surakarta
Gandar Mahojwala	KAPPALA Indonesia
Pudji Santosa	Lingkar
Gigih Aditya Pratama	KAPPALA Indonesia
Yugyasmono	Lingkar
Hadi Sutrisno	BNPB
Nurul Maulidhini	BNPB

### **KONTRIBUTOR**

Arif Fadli	BNPB
Virana Fatwa Nurmala	BNPB
Denadia Mutty	BNPB
Rahma Sari Puspita	BNPB
Riski Yufawinda	BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

# Daftar Isi

- Pengantar ..... 2**
- Daftar Isi ..... 4**
  
- A. Materi Pembelajaran ..... 5**
  - A.1. Pemahaman Dasar Tim Relawan Desa/Kelurahan ..... 5
  - A.2. Tahapan Pembentukan Tim Relawan Desa/Kelurahan ..... 5
  - A.3. Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Tim Relawan Desa/Kelurahan ..... 6
  
- B. Praktik Pembelajaran ..... 7**
  - B.1. Praktik Pembentukan Tim Relawan Desa/Kelurahan ..... 7
  - B.2. Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Tim Relawan Desa/Kelurahan ..... 12

## A. Materi Pembelajaran

### A.1. PEMAHAMAN DASAR TIM RELAWAN DESA/KELURAHAN

---

Tim Relawan desa/kelurahan merupakan wadah yang menaungi individu-individu yang secara sukarela dan siap sedia melaksanakan pengurangan risiko bencana baik dalam kondisi pra bencana, respon darurat, dan pasca bencana.

### A.2. TAHAPAN PEMBENTUKAN TIM RELAWAN DESA/KELURAHAN

---

Tahapan pembentukan Tim Relawan Desa bisa sangat fleksibel dengan kondisi setempat. Tetapi sebagai gambaran di bawah ini disajikan tahapan rekomendasi pembentukan Tim Relawan Desa.

#### A.2.1. Persiapan

- a. Dimulai dengan hasil kajian risiko bencana dibawa dalam rembung desa/kelurahan, dan disepakati adanya kebutuhan atas wadah masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.
- b. Mengidentifikasi keberadaan seluruh elemen di desa/kelurahan yang dapat menjadi pendukung pembentukan tim relawan.
- c. Pertemuan dengan tokoh-tokoh kunci di tingkat desa/kelurahan untuk menjelaskan perlunya tim relawan untuk menyatukan individu dengan beragam latar belakang pekerjaan, kemampuan, dan peran.

#### A.2.2. Pelaksanaan

Kelompok Kerja harus memutuskan untuk memilih: 1) membentuk tim relawan baru; atau 2) mengoptimalkan organisasi/lembaga sejenis yang sudah ada. Setelah dipilih, tim relawan harus memperhatikan partisipasi/keterwakilan dari berbagai kelompok seperti kelompok difabel, kelompok perempuan, kelompok lansia, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Juga, keterwakilan dari wilayah dengan beragam ancaman yang ada di dusun. Dalam pembentukan ini termasuk memilih pengurus dan menentukan peran dalam strukturnya. Pemilihan pengurus bisa melalui musyawarah maupun dengan melalui voting, tergantung kesepakatan bersama.

Setelah pengembangan Tim Relawan desa/kelurahan disepakati, tim merumuskan AD/ART (termasuk visi dan misi) serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, sebagai pedoman perjalanan tim, merumuskan rencana kerja tim relawan, paling tidak untuk satu tahun, dan membuat rencana tindak lanjut termasuk rencana legalisasi baik berbentuk SK atau Peraturan Desa.

### **A.3. PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN JEJARING TIM RELAWAN DESA/KELURAHAN**

---

#### **A.3.1. Penguatan Kelembagaan Tim Relawan Desa/Kelurahan**

- a. Relevansi, dapat dicapai dengan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga semakin optimal dalam melakukan peran pengurangan risiko bencana. Kegiatan penguatan kelembagaan dapat dengan melibatkan organisasi/lembaga di luar desa untuk semakin memperkaya kapasitas.
- b. Partisipatif, dapat dicapai dengan melibatkan pihak-pihak baik didalam dan diluar desa/kelurahan dalam melakukan kerja pengurangan risiko bencana sehingga kemampuan setiap kelompok dan wilayah terus meningkat.
- c. Hasil yang bermanfaat, penting untuk mencapai pengurangan kerentanan, peningkatan kapasitas, respon yang efektif, dan merealisasikan “Membangun Kembali dengan Lebih Baik”.

#### **A.3.2. Penguatan Jejaring Tim Relawan Desa/Kelurahan**

Jejaring kerjasama dalam pengelolaan risiko bencana dengan pihak ketiga sangat mungkin dilakukan untuk melaksanakan program dan aksi PRB. Selain ruang lingkup di atas, Desa/kelurahan dapat merumuskan ruang lingkup dan kerja sama bidang lain yang bersifat strategis sesuai kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Peran Tim Relawan desa/kelurahan dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak ketiga berperan sebagai delegasi desa. Selanjutnya kerjasama diatur dalam kesepakatan kerjasama secara tertulis antara Desa dan pihak ketiga.

- a. Kerjasama Antar Desa, lazim dilakukan saat ini pada aspek perkuatan perekonomian desa, kerjasama diwujudkan dalam pembentukan Badan Usaha Milik 2 (Dua) Desa atau lebih. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, terutama pada Pasal 73 dijabarkan, bahwa ruang lingkup kerjasama antar desa yaitu:
  - 1) Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - 2) Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa;
  - 3) Keamanan dan ketertiban.
- b. Kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga, sering diartikan dengan kemitraan antara pihak eksternal dengan desa/kelurahan. Kerjasama idealnya saling berbagi sumber daya dan saling menguntungkan. Maka sebelum desa/kelurahan menjalin kemitraan, kedua belah pihak harus menyepakati nilai-nilai (1) kesamaan perhatian/kepentingan (*common interest*); (2) adanya sikap saling mempercayai dan saling menghormati; (3) tujuan yang jelas dan terukur; (4) kesediaan untuk berbagi waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain. Kedua belah pihak juga harus berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip kemitraan yaitu (1) kesamaan kedudukan (*equality*); (2) keterbukaan (*transparency*), (3) saling menguntungkan (*mutual benefit*).



## B. Praktik Pembelajaran

### B.1. PRAKTIK PEMBENTUKAN TIM RELAWAN DESA/KELURAHAN

Setelah mengikuti penjelasan tentang tahapan pembentukan Tim Relawan desa/kelurahan, peserta diminta bekerja dalam kelompok menyelesaikan tugas penyusunan di bawah ini:

Tabel 1 Lembar Kerja Identifikasi Sumberdaya di Desa/Kelurahan

Nama	RT	Tanggal Lahir	Kelompok	Pekerjaan	Kemampuan

Contoh Identifikasi Sumberdaya di Desa

Nama	RT	Tanggal Lahir	Kelompok	Pekerjaan	Kemampuan
Sugeng Tri	1	1-3-2020	Laki-laki, Remaja	Tukang bangunan	Membangun dan memperbaiki bangunan, instalasi listrik, dan air.
Tyasaroh	4	21-4-1990	Perempuan, Difabel	Usaha catering	Memasak dalam jumlah banyak.
Ani Sukirah	4	14-11-1955	Perempuan, Lansia	Pensiunan guru	Menghibur kelompok lansia.
Suhar	6	10-10-1980	Laki-laki	Karyawan swasta	Mengetik, dokumentasi, administrasi, dan menyetir.

Tabel 2. Lembar Kerja Tahapan Pembentukan Tim Relawan Desa/Kelurahan

Tahapan	Kegiatan	Hasil Kegiatan

### Contoh Tahapan Pembentukan Tim Relawan Desa

Tahapan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
Diskusi Terfokus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan potensi desa</li> <li>• Pemetaan masalah desa</li> </ul>	Terdatanya potensi-potensi yang ada di desa (individu dengan beragam pekerjaan) serta teridentifikasinya masalah yang ada di desa (ancaman dan risiko terutama dalam situasi lapangan saat darurat).
Sosialisasi ke pemerintah desa	Pemaparan tentang Tim Relawan	Pemerintah desa memahami dan mendukung kebutuhan pembentukan Tim Relawan desa.
Konsolidasi tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan adat	Pemaparan tentang Tim Relawan	Meningkatkan kesadaran kepada tokoh-tokoh untuk ikut terlibat dan mendukung Tim Relawan.
Diskusi Terfokus Pembentukan Tim Relawan	Membahas rencana pembentukan dan keanggotaan Tim Relawan..	Tim Relawan terbentuk beserta strukturnya.

Tabel 3. Lembar Kerja Pengusulan Susunan Pengurus Tim Relawan Desa/Kelurahan

<b>Susunan Pengurus Tim Relawan Desa/Kelurahan</b>	
Pembina	BPBD Kabupaten/Kota _____ FORPIMCA _____ PUSKESMAS _____ dst
Pelindung	Kepala Desa/Kelurahan _____ Ketua BPD/LPMK _____
Pendamping	Bhabinkamtibmas Desa/Kelurahan _____ Babinsa Desa/Kelurahan _____ Kasi Trantib Kecamatan _____ Bidan Desa _____ dst
Ketua	
Tim Reaksi Cepat	Dusun _____ : a. b. c.  Dusun _____ : a. b. c. dst
Bidang Posko	Koordinator:
Bidang Evakuasi	Koordinator:
Bidang Dapur Umum	Koordinator:

Susunan Pengurus Tim Relawan Desa/Kelurahan	
Bidang Keamanan	Koordinator:
Bidang Kesehatan	
Bidang Penyelamatan Ternak	
Bidang Logistik	
Bidang Transportasi	
Bidang Barak dan Sarpras	
Bidang _____	dst sesuai kebutuhan
Koordinator Dusun/Sejenis	Masing-masing kepala dusun.

#### Contoh Pengusulan Susunan Pengurus Tim Relawan Desa/Kelurahan

Susunan Pengurus Tim Relawan Desa/Kelurahan	
Pembina	BPBD Kabupaten Magetan FORPIMCA Kecamatan Kartoharjo PUSKESMAS Kartoharjo
Pelindung	Kepala Desa Jajar Ketua BPD Jajar
Pendamping	Bhabinkamtibmas Desa Jajar Babinsa Desa Jajar Kasi Trantib Kecamatan Kartoharjo Bidan Desa Jajar
Ketua	Sumantri Sukoridino
Tim Reaksi Cepat	Dusun Kendo : a. Sugeng b. Wahyu c. Tri  Dusun Kenceng : a. Wahab b. Wahid c. Sundo dst
Bidang Posko	Koordinator: Sri Wahyuni
Bidang Evakuasi	Koordinator: Surono
Bidang Dapur	Koordinator: Sumini

Susunan Pengurus Tim Relawan Desa/Kelurahan	
Umum	
Bidang Keamanan	Koordinator: Sugotot
Bidang Kesehatan	
Bidang Logistik	
Bidang Transportasi	
Bidang Barak dan Sarpras	
Koordinator Dusun/Sejenis	Masing-masing kepala dusun.

Tabel 5. Lembar Kerja Pembagian Tugas Tim Relawan Desa/Kelurahan

Bidang	Tugas	Koordinator	Anggota

Contoh pembagian tugas Tim Relawan desa

Bidang	Tugas	Koordinator	Anggota
Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasikan kegiatan tanggap darurat di desa</li> <li>Bertanggungjawab kegiatan tanggap darurat</li> <li>Berkoordinasi dengan pemerintah desa, dusun, dan FPRB dalam proses tanggap darurat</li> </ul>	Hariyono	
Tim Reaksi Cepat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari informasi kejadian darurat di desa</li> <li>Memastikan informasi</li> <li>Melakukan kajian cepat tentang kebutuhan di lapangan</li> </ul>	Purwadi	Slamet (Dusun A) Sunyoto (Dusun A) Nanang (Dusun B) Uwil (Dusun B) dst
Posko	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan jumlah korban dan kondisinya</li> <li>Mendata kebutuhan pengungsi</li> <li>Menjamin berjalannya operasi tanggap darurat</li> <li>Mengumpulkan informasi di lapangan dengan akurat</li> <li>Menempatkan relawan di lapangan sesuai dengan kebutuhan</li> </ul>	Sri Wahyuni	Andrias Serlita Akbar
Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siap mengantar korban ke posko kesehatan dan membawa ke puskesmas atau rumah sakit</li> <li>Siap mengantar pengungsi ke barak</li> <li>Mengantar logistik dan keperluan barak</li> <li>Pengecekan transportasi termasuk kendaraan dan</li> </ul>	Lilik	Sri Asriani Rakiman Giyanto Sri Yuntari Yuli

Bidang	Tugas	Koordinator	Anggota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>BBM</li> <li>Pencarian korban dan evakuasi</li> </ul>		Samsini
Dapur Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan peralatan masak</li> <li>Menyiapkan makanan untuk pengungsi dan relawan</li> <li>Menyajikan makanan yang bersih dan bergizi</li> <li>Menyediakan konsumsi untuk relawan</li> </ul>	Budi Utomo	Wiyono Lantip Yadi Ditha Giyono
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga agar tidak terjadi keributan antar pengungsi</li> <li>Mengamankan barang bantuan pengungsi</li> <li>Mengarahkan warga yang ingin melihat lokasi kejadian</li> <li>Menjaga harta benda yang ditinggalkan pengungsi</li> </ul>	Sri Hayuti	Ika Suyanto Hendrik Jimi Jono Purwanto Sumirah
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberi pertolongan secepat mungkin</li> <li>Pengarahan kepada pengungsi untuk menjaga kebersihan</li> <li>Pemeriksaan kesehatan pengungsi</li> <li>Memeriksa asupan gizi bersama bidang dapur umum terutama untuk kelompok rentan</li> </ul>	Suparlan	Herman Aji Cilik Aji Gede Sukarto Yuyud Agus
Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memilah berbagai jenis bantuan yang masuk</li> <li>Mendata keluar masuk barang</li> <li>Membagikan bantuan kepada pengungsi sesuai data dari posko</li> <li>Mempersiapkan kebutuhan pengungsi</li> <li>Menyiapkan keperluan bidang lain</li> </ul>	dst	
Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu tim evakuasi mengevakuasi warga dan harta bendanya</li> <li>Membantu bidang kesehatan untuk merujuk pasien/korban</li> <li>Menyalurkan konsumsi dari dapur umum ke tempat evakuasi</li> <li>Menyalurkan bantuan bersama bidang logistik</li> </ul>		
Barak dan Sarpras	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendirikan tenda-tenda</li> <li>Menyediakan tempat MCK dan sanitasi</li> <li>Mendirikan tempat dapur umum</li> <li>Menyediakan penerangan barak</li> </ul>		

## B.2. Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Tim Relawan Desa/Kelurahan

Tabel 5. Lembar Kerja Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Tim Relawan Desa/Kelurahan

	Kegiatan (untuk merealisasikan relevansi)	Pihak (untuk merealisasikan partisipatif)	Output / Hasil	Jejaring Luar Desa/Kelurahan
Penguatan Jejaring				
Penguatan Kelembagaan				

Contoh penguatan kelembagaan dan jejaring Tim Relawan desa

	Kegiatan	Pihak	Output
Penguatan Jejaring	Membangun jejaring sungai untuk pencarian orang hanyut.	Tim relawan desa-desa sekitar Sungai Wohe.	Terjalin kerjasama untuk pencarian orang hanyut di Sungai Wohe.
	Jejaring membangun kapasitas relawan desa	SAR, PMI, BPBD Magetan, RZ, dsb	Menjaring dukungan organisasi pemerintah/non pemerintah untuk mendukung kapasitas Tim Relawan desa.
Penguatan Kelembagaan	Pelatihan untuk siap melakukan evakuasi	SAR dan PMI	Peserta pelatihan mampu melakukan evakuasi dalam situasi bencana secara tepat.
	Pelatihan pengurusan posko	BPBD Magetan	Pengurus mampu melakukan kegiatan pengurusan posko dengan efektif dan berguna.

# Pengembangan Forum PRB Desa/Kelurahan

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



# **Pengembangan Forum PRB Desa/Kelurahan**

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



**Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana**



# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputian Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

## **Pengembangan Forum PRB Desa/Kelurahan**

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

### **PENGARAH**

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB  
Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

### **PENANGGUNGJAWAB**

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB  
Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

### **EDITOR**

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

### **PENYUSUN**

Sigit Purwanto	Pujiono Centre
Sumino	LPTP Surakarta
Wahyu Heniwati	Daya Annisa / MDMC
Anggoro Budi Prasetyo	Aksara
Wana Kristanto	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Indra Baskoro Adi	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Muhammad Nur Ronggo Dinoyo	LPTP Surakarta
Gandar Mahojwala	KAPPALA Indonesia
Pudji Santosa	Lingkar
Gigih Aditya Pratama	KAPPALA Indonesia
Yugyasmono	Lingkar
Hadi Sutrisno	BNPB
Nurul Maulidhini	BNPB

### **KONTRIBUTOR**

Arif Fadli	BNPB
Virana Fatwa Nurmala	BNPB
Denadia Mutty	BNPB
Rahma Sari Puspita	BNPB
Riski Yufawinda	BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

# Daftar Isi

- Pengantar ..... 2**
- Daftar Isi ..... 4**
  
- A. Materi Pembelajaran ..... 5**
  - A.1. Pemahaman Dasar Forum Pengurangan Risiko Bencana ..... 5
  - A.2. Tahapan Pembentukan FPRB Desa/Kelurahan ..... 6
  - A.3. Penguatan Kelembagaan dan Jejaring FPRB Desa/Kelurahan ..... 8
  
- B. Praktik Pembelajaran ..... 10**
  - B.1. Praktik Pembentukan FPRB Desa/Kelurahan ..... 10
  - B.2. Penguatan Kelembagaan dan Jejaring FPRB Desa/Kelurahan ..... 17

## A. Materi Pembelajaran

### A.1. PEMAHAMAN DASAR FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara spesifik tentang diperlukannya suatu wadah atau mekanisme untuk memfasilitasi kerjasama para pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui suatu Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Pembentukan FPRB dapat dilakukan di tingkat nasional maupun lokal yang meliputi; tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat Desa/Kelurahan.

FPRB berfungsi untuk menciptakan koordinasi dalam pengarusutamaan, pembentukan, dan pengembangan sistem PRB menyeluruh. FPRB desa/kelurahan diharapkan dapat mengawal pencapaian prioritas aksi yang terdapat dalam Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana. Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana menetapkan empat prioritas aksi:

Tabel 1. Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana

<b>Prioritas 1</b>	Memahami Risiko bencana	Kerentanan, kapasitas, terpaan pada orang dan aset, karakteristik bahaya, dan lingkungan harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan dalam pra-bencana, untuk pencegahan dan mitigasi, dan untuk pengembangan dan pelaksanaan kesiapsiagaan yang tepat serta respon yang efektif terhadap bencana.
<b>Prioritas 2</b>	Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana	Visi, rencana, kompetensi, bimbingan dan koordinasi yang jelas pada manajemen risiko bencana penting dalam mencapai efektif dan efisien. Dengan demikian, penguatan tata kelola risiko bencana dianggap perlu karena dapat mendorong kolaborasi dan kemitraan di seluruh mekanisme dan antar lembaga.
<b>Prioritas 3</b>	Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan	Investasi publik dan swasta dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural adalah hal yang penting untuk meningkatkan ketangguhan ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya.
<b>Prioritas 4</b>	Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “Membangun Kembali dengan Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.	Kondisi bencana yang terus meningkat kejadiannya menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam merespon, mengambil tindakan dalam peristiwa yang telah diperkirakan sebelumnya, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam kesiapsiagaan respon, dan memastikan tersedianya kapasitas untuk respon dan pemulihan efektif pada semua level. Kesiapsiagaan sebelum terjadinya bencana merupakan kesempatan penting untuk mencapai “Membangun Kembali dengan Lebih Baik”.

## **A.2. TAHAPAN PEMBENTUKAN FPRB DESA/KELURAHAN**

---

Dalam memulai pembentukan, perlu disepakati bahwa dalam menghadapi risiko bencana, maka butuh wadah atau kelompok untuk menjamin perencanaan dan fasilitasi pengurangan risiko bencana di tingkat desa/kelurahan. Tahapan pembentukan FPRB desa/kelurahan bisa sangat fleksibel dengan kondisi setempat. Tetapi sebagai gambaran di bawah ini disajikan tahapan rekomendasi pembentukan FPRB desa/kelurahan.

### **A.2.1. Persiapan**

1. Dimulai dengan hasil kajian risiko bencana dibawa dalam rembug desa/kelurahan, dan disepakati adanya kebutuhan atas wadah seluruh elemen lembaga/organisasi di desa/kelurahan dalam mengurangi risiko bencana.
2. Mengidentifikasi keberadaan seluruh elemen di desa/kelurahan yang dapat menjadi pendukung pembentukan forum.
3. Pertemuan dengan tokoh-tokoh kunci di tingkat desa/kelurahan untuk menjelaskan perlunya forum untuk menyatukan berbagai pihak, meliputi; pemangku kepentingan, tokoh masyarakat dan elemen dalam masyarakat yang memiliki perhatian dalam pengurangan risiko bencana di tingkat desa/kelurahan.

### **A.2.2. Pelaksanaan**

Kelompok Kerja harus memutuskan untuk memilih: 1) membentuk forum baru; atau 2) mengoptimalkan forum sejenis yang sudah ada. Setelah dipilih, FPRB desa/kelurahan harus memperhatikan partisipasi/keterwakilan dari berbagai organisasi/lembaga di desa/kelurahan meliputi; pemerintah desa/kelurahan, lembaga usaha, organisasi masyarakat, kelompok-kelompok profesi, kategori-kategori lain, termasuk kelompok difabel, kelompok perempuan, dan keterwakilan dari wilayah. Dalam pembentukan ini termasuk memilih pengurus dan menentukan peran dalam strukturnya. Kepengurusan forum ini harus merepresentasikan semua unsur perwakilan masyarakat desa/kelurahan termasuk keterwakilan perempuan minimal 30% dan keterwakilan kelompok difabel. Pemilihan pengurus bisa melalui musyawarah maupun dengan melalui voting, tergantung kesepakatan bersama.

Setelah pengembangan FPRB desa/kelurahan disepakati, forum merumuskan AD/ART (termasuk visi dan misi) serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, sebagai pedoman perjalanan forum, merumuskan rencana kerja forum, paling tidak untuk satu tahun, dan membuat rencana tindak lanjut termasuk rencana legalisasi baik berbentuk SK atau Peraturan Desa.

Tabel 2. Contoh Penyusunan Dokumen Pembentukan FPRB Desa/Kelurahan

Struktur		Penjelasan	Contoh
<b>Sampul</b>		Halaman paling depan pada dokumen.	
<b>Statuta</b>	Alasan Pembentukan	Hal yang melatarbelakangi pembentukan forum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah Desa Kedung rawan bencana dan merugikan di kehidupan warga</li> <li>2. Di Desa Kedung belum ada forum yang merencanakan pengurangan risiko bencana.</li> </ol>
	Nama Forum		FPRB Desa “Kedung Siaga”
	Semboyan Forum		Siap untuk siaga dan selamat.
	Alamat Forum		Balai Desa Kedung, Jalan Raya Kedung-Pojok, RT 02, RW 02, Dusun Kedung II, Desa Kedung, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi.
	Visi dan Misi	<p>Visi adalah cita-cita secara umum yang ingin dicapai. Misi adalah hal yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut.</p>	<p>Visi: Menjadikan Desa Kedung bebas dari bencana.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberdayakan seluruh elemen yang ada di Desa Kedung</li> <li>2. Membentuk dan memperkuat lembaga kebencanaan di tingkat desa</li> <li>3. Melakukan respon tanggap darurat secara efektif dan bermanfaat</li> </ol>
	Fungsi Forum		<p>FPRB Desa “Kedung Siaga” berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wadah untuk mengapresiasi pendapat dan aspirasi warga</li> <li>2. Mendorong kebijakan pengurangan risiko bencana</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas warga dalam menghadapi bencana</li> <li>4. Mendorong keterlibatan organisasi desa dalam berkegiatan pengurangan risiko bencana</li> </ol>
	Nilai yang Diusung		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saling menghargai</li> <li>2. Setia kawan</li> <li>3. Sukarela</li> <li>4. Gotong Royong</li> </ol>
	Anggota Forum	Anggota FPRB merupakan lembaga, organisasi, komunitas, kelompok, dan paguyuban yang ada di desa/kelurahan.	
	Pengurus Forum	Pengurus FPRB merupakan pengurus aktif dari lembaga,	

Struktur		Penjelasan	Contoh
		organisasi, komunitas, kelompok, dan paguyuban yang menjadi anggota FPRB.	
Pendanaan Lembaga	Sumber Dana		Pendanaan lembaga bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana dari desa</li> <li>2. Donatur yang tidak mengikat</li> <li>3. Swadaya warga</li> <li>4. Swadaya lembaga</li> </ol>
	Penggunaan Dana		Penggunaan lembaga digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjang sarana dan prasarana lembaga</li> <li>2. Untuk membiayai operasional lembaga</li> <li>3. Peningkatan kapasitas anggota</li> <li>4. Mendanai kebutuhan penanganan darurat</li> </ol>
	Pertanggungjawaban Dana	Cara-cara untuk menjelaskan pertanggungjawaban dan transparansi dana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan uang masuk dan uang keluar</li> <li>2. Mengeluarkan laporan satu tahun sekali</li> </ol>
Lampiran	Rencana Kegiatan	Tabel terdapat pada bagian <b>2. Praktik Pembelajaran.</b>	
	Daftar Anggota	Tabel terdapat pada bagian <b>2. Praktik Pembelajaran.</b>	

### A.3. Penguatan Kelembagaan dan Jejaring FPRB Desa/Kelurahan

#### A.3.1. Penguatan Kelembagaan FPRB Desa/Kelurahan

- Relevansi, dapat dicapai dengan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga semakin optimal dalam melakukan peran pengurangan risiko bencana. Kegiatan penguatan kelembagaan dapat dengan melibatkan organisasi/lembaga di luar desa untuk semakin memperkaya kapasitas.
- Partisipatif, dapat dicapai dengan melibatkan pihak-pihak baik didalam dan diluar desa/kelurahan dalam melakukan kerja pengurangan risiko bencana sehingga kemampuan setiap organisasi/lembaga terus meningkat.
- Hasil yang bermanfaat, penting untuk mencapai pengurangan risiko bencana dengan mendorong kebijakan dan fasilitas untuk merealisasikan empat prioritas aksi dalam Kerangka Kerja Sendai.

#### A.3.2. Penguatan Jejaring FPRB Desa/Kelurahan

Jejaring kerjasama dalam pengelolaan risiko bencana dengan pihak ketiga sangat mungkin dilakukan untuk melaksanakan program dan aksi PRB. Selain ruang lingkup diatas, Desa/kelurahan dapat merumuskan ruang lingkup dan kerja sama bidang lain yang bersifat strategis sesuai kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Peran FPRB desa/kelurahan dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak ketiga berperan sebagai delegasi desa. Selanjutnya kerjasama diatur dalam kesepakatan kerjasama secara tertulis antara Desa dan pihak ketiga.

- a. Kerjasama Antar Desa, lazim dilakukan saat ini pada aspek perkuatan perekonomian desa, kerjasama diwujudkan dalam pembentukan Badan Usaha Milik 2 (Dua) Desa atau lebih. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, terutama pada Pasal 73 dijabarkan, bahwa ruang lingkup kerjasama antar desa yaitu:
  - 1) Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - 2) Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa;
  - 3) Keamanan dan ketertiban.
- b. Kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga, sering diartikan dengan kemitraan antara pihak eksternal dengan desa/kelurahan. Kerjasama idealnya saling berbagi sumber daya dan saling menguntungkan. Maka sebelum desa/kelurahan menjalin kemitraan, kedua belah pihak harus menyepakati nilai-nilai (1) kesamaan perhatian/kepentingan (*common interest*); (2) adanya sikap saling mempercayai dan saling menghormati; (3) tujuan yang jelas dan terukur; (4) kesediaan untuk berbagi waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain. Kedua belah pihak juga harus berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip kemitraan yaitu (1) kesamaan kedudukan (*equality*); (2) keterbukaan (*transparency*), (3) saling menguntungkan (*mutual benefit*).



## B. Praktik Pembelajaran

### B.1. PRAKTIK PEMBENTUKAN FPRB DESA/KELURAHAN

Setelah mengikuti penjelasan tentang tahapan pembentukan FPRB desa/kelurahan, peserta diminta bekerja dalam kelompok menyelesaikan tugas penyusunan di bawah ini:

Tabel 3. Lembar Kerja Identifikasi Sumberdaya di Desa/Kelurahan

Lembaga	Kapasitas	Kondisi

Tabel 4. Contoh Identifikasi Sumberdaya di Desa

Lembaga	Kapasitas	Kondisi
Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>Memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran.</li><li>Membuat Kebijakan</li><li>Memiliki jejaring dengan kecamatan, kabupaten, dan provinsi.</li></ul>	Kurang menganggarkan untuk pengurangan risiko bencana.
LKMD	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengawasan penggunaan anggaran.</li><li>Pengusul kebijakan desa.</li></ul>	Selalu hadir di setiap kegiatan desa.
BPD	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyalur aspirasi warga.</li><li>Pengawasn anggaran dan pembangunan</li></ul>	Beberapa anggota tidak aktif.
Kepala Dusun	Mempunyai kewenangan dalam mengelola dusun.	Pemahaman kepala dusun berbeda-beda.
Komunitas HT Kedung	Memiliki jejaring dengan luar desa.	Belum berkegiatan di kebencanaan.

Tabel 5. Lembar Kerja Daftar Anggota FPRB Desa/Kelurahan

No.	Nama	TTL	Kontak	Perwakilan
1.				
2.				
dst				

Tabel 6. Contoh Daftar Anggota FPRB Desa

No.	Nama	TTL	Kontak	Perwakilan
1.	Sri Wahyuni	Ngawi, 27-04-1972	0812345678	Perangkat Desa
2.	Purwadi	Malang, 05-11-1980	0812345678	Kelompok Ikan
3.	Suheran	Ngawi, 02-05-1987	0812345678	Komunitas HT Kedung

Tabel 7. Lembar Kerja Tahapan Pembentukan FPRB Desa/Kelurahan

Tahapan	Kegiatan	Hasil Kegiatan

Tabel 8. Contoh Tahapan Pembentukan FPRB Desa

Tahapan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
Diskusi Terfokus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan potensi desa</li> <li>• Pemetaan masalah desa</li> </ul>	Terdatanya potensi-potensi yang ada di desa (kelompok, organisasi, komunitas) serta teridentifikasinya masalah yang ada di desa (ancaman dan risiko).
Sosialisasi ke pemerintah desa	Pemaparan tentang FPRB	Pemerintah desa memahami dan mendukung kebutuhan pembentukan FPRB.
Konsolidasi tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan adat	Pemaparan tentang FPRB	Meningkatkan kesadaran kepada tokoh-tokoh untuk ikut terlibat dan mendukung FPRB.
Diskusi Terfokus Pembentukan FPRB	Membahas rencana pembentukan FPRB, keanggotaan FPRB, dan statuta FPRB.	FPRB terbentuk beserta statuta dan strukturnya.

Tabel 9. Lembar Kerja Pengusulan Susunan Pengurus FPRB Desa/Kelurahan

<b>Susunan Pengurus FPRB</b>	
<b>Pembina</b>	BPBD Kabupaten/Kota _____ FORPIMCA _____ PUSKESMAS _____ dst
<b>Pelindung</b>	Kepala Desa/Kelurahan _____ Ketua BPD/LPMK _____
<b>Pendamping</b>	Bhabinkamtibmas Desa/Kelurahan _____ Babinsa Desa/Kelurahan _____ Kasitrantib Kecamatan _____ Bidan Desa _____ dst
<b>Ketua</b>	
<b>Wakil Ketua</b>	
<b>Sekretaris</b>	
<b>Bendahara</b>	
<b>Bidang Pendidikan</b>	
<b>Anggota Bid. Pendidikan</b>	
<b>Bidang Kebijakan</b>	
<b>Anggota Bid. Kebijakan</b>	
<b>Bidang Pembangunan</b>	
<b>Anggota Bid. Pembangunan</b>	
<b>Bidang Kesiapsiagaan dan Pemulihan</b>	
<b>Anggota Bid. Kesiapsiagaan dan Pemulihan</b>	
<b>Koordinator Dusun/Sejenis</b>	Masing-masing kepala dusun/sejenis.

Tabel 10. Contoh Pengusulan Susunan Pengurus FPRB Desa/Kelurahan

<b>Susunan Pengurus FPRB "Kedung Siaga"</b>	
<b>Pembina</b>	BPBD Kabupaten Ngawi FORPIMCA Kwadungan PUSKESMAS Kwadungan
<b>Pelindung</b>	Kepala Desa Kedung Ketua BPD Desa Kedung
<b>Pendamping</b>	Bhabinkamtibmas Desa Kedung Babinsa Desa Kedung Bidan Desa Kedung Kasi Trantib Kecamatan Kwadungan
<b>Ketua</b>	Joko Susanto (Sekretaris Desa)
<b>Wakil Ketua</b>	Budi Utomo (BPD)
<b>Sekretaris</b>	Andrias Ifanda M (BPD)
<b>Bendahara</b>	Sri Wahyuni (PKK)
<b>Bidang Pendidikan</b>	Wulyanti (PKK)
<b>Anggota Bid. Pendidikan</b>	Sumir (Karang Taruna), Wahyu (Kelompok Tani), Sulis (Kelompok Ikan)
<b>Bidang Kebijakan</b>	dst
<b>Anggota Bid. Kebijakan</b>	
<b>Bidang Pembangunan</b>	
<b>Anggota Bid. Pembangunan</b>	
<b>Bidang Kesiapsiagaan dan Pemulihan</b>	
<b>Anggota Bid. Kesiapsiagaan dan Pemulihan</b>	
<b>Koordinator Dusun/Sejenis</b>	Masing-masing kepala dusun.

Tabel 10. Statuta

<b>Alasan Pembentukan</b>	
<b>Nama Forum</b>	
<b>Semboyan Forum</b>	
<b>Alamat Forum</b>	
<b>Visi dan Misi</b>	
<b>Fungsi Forum</b>	
<b>Nilai yang Diusung</b>	
<b>Anggota Forum</b>	
<b>Pengurus Forum</b>	
<b>Sumber Dana</b>	
<b>Penggunaan Dana</b>	
<b>Pertanggungjawaban Dana</b>	

Tabel 11. Lembar Kerja Rencana Kegiatan FPRB Desa/Kelurahan

Bidang	Fungsi Bidang	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Waktu	Lokasi
Pendidikan	Memahami Risiko bencana					
Kebijakan	Penguatan kebijakan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana					
Pembangunan	Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan					
Kesiapsiagaan dan Pemulihan	Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk "Membangun Kembali dengan Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.					

Tabel 12 Contoh Rencana Kegiatan FPRB Desa

Bidang	Fungsi Bidang	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Waktu	Lokasi
Pendidikan	Memahami Risiko bencana	Sosialisasi ke warga	Agar warga sadar dan tanggap urusan kebencanaan	Anggota lembaga dan organisasi di desa	Dua bulan sekali	Kedung I, II, IV
Kebijakan	Penguatan kebijakan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana	Pembuatan Perdes Penanggulangan Bencana	Dasar hukum untuk kegiatan penanggulangan bencana	Pemerintah desa dan BPD	Bulan ke-8	Balai Desa
Pembangunan	Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan	Gotong royong	membersihkan lingkungan	Sungai Celeng, Sungai Ai, dan lapangan bola.	Satu bulan sekali	Kedung I
		Normalisasi saluran air	memperlancar arus air sehingga meminimalisir genangan	Got di sepanjang desa	Menjelang musim hujan	Kedung I, II, IV
Kesiapsiagaan dan Pemulihan	Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk "Membangun Kembali dengan Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.	Simulasi tingkat dusun	warga paham SPD, evakuasi, dan jalur evakuasi.	Seluruh warga di wilayah ancaman	6 bulan sekali	Kedung III & II
		Membangun sistem peringatan dini	warga memiliki sistem peringatan dini	Seluruh warga di wilayah ancaman	bulan ke 3	Kedung III & II

## B.2. PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN JEJARING FPRB DESA/KELURAHAN

Tabel 13. Lembar Kerja Penguatan Kelembagaan dan Jejaring FPRB Desa/Kelurahan

	Kegiatan (untuk merealisasikan relevansi)	Pihak (untuk merealisasikan partisipatif)	Output / Hasil	Jejaring Luar Desa/Kelurahan
Penguatan Kelembagaan				
Penguatan Jejaring				

Tabel 14. Contoh penguatan kelembagaan dan jejaring FPRB Desa

	Kegiatan	Pihak	Output
Penguatan Kelembagaan	Pelatihan untuk siap melakukan sosialisasi	PKK, Karang Taruna, Linmas, Kelompok Tani, Kelompok Ikan	Peserta pelatihan mampu melakukan sosialisasi di anggotanya
	Pelatihan administrasi pengurus	Pengurus FPRB	Pengurus mampu melakukan kegiatan administrasi pendukung dalam FPRB seperti pencatatan keuangan, sekretariat, dokumentasi, dll
Penguatan Jejaring	Diskusi terfokus pengembangan jejaring luar desa	Seluruh anggota FPRB	Mendokumentasikan lembaga dari luar desa yang dapat mendukung kegiatan PRB
	Silaturahmi dengan universitas lokal	Pengurus FPRB	Universitas lokal bersedia mendukung pelatihan dan kegiatan PRB di desa





# **Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Desa dan Kelurahan**

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



**Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampingannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputusan Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

## **Modul Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Desa dan Kelurahan**

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

### **PENGARAH**

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB  
Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

### **PENANGGUNGJAWAB**

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB  
Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

### **EDITOR**

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta

### **PENYUSUN**

Sigit Purwanto	Pujiono Centre
Sumino	LPTP Surakarta
Wahyu Heniwati	Daya Annisa / MDMC
Anggoro Budi Prasetyo	Aksara
Wana Kristanto	PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta
Indra Baskoro Adi	PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta
Muhammad Nur Ronggo Dinoyo	LPTP Surakarta
Gandar Mahojwala	KAPPALA Indonesia
Pudji Santosa	Lingkar
Gigih Aditya Pratama	KAPPALA Indonesia
Yugyasmono	Lingkar
Hadi Sutrisno	BNPB
Nurul Maulidhini	BNPB

### **KONTRIBUTOR**

Arif Fadli	BNPB
Virana Fatwa Nurmala	BNPB
Denadia Mutty	BNPB
Rahma Sari Puspita	BNPB
Riski Yufawinda	BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

# Daftar Isi

<b>Pengantar.....</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>4</b>
<b>A. Materi Pembelajaran .....</b>	<b>5</b>
A.1. Pengertian Dan Kegunaan Rencana Penanggulangan Bencana .....	5
A.2. Penyusunan Dan Penyajian Data RPB.....	5
<b>B. Praktik Pembelajaran.....</b>	<b>7</b>
B.1. Praktek Penyusunan RPB .....	7
<b>Daftar Referensi .....</b>	<b>10</b>
<b>Lampiran 1. Contoh Identifikasi Kegiatan dan Pelaku .....</b>	<b>11</b>
<b>Lampiran 2. Contoh Rekap Kegiatan.....</b>	<b>17</b>

## A. Materi Pembelajaran

### A.1. PENGERTIAN DAN KEGUNAAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

---

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan (pra-saat-pasca) bencana dan bidang kerja kebencanaan (Perka BNPB No 4 2008). Dalam arti luas, RPB merupakan program strategis pada seluruh bidang/cakupan pengurangan risiko bencana, baik dalam bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi untuk seluruh ancaman bencana prioritas dalam suatu wilayah administratif.

### A.2. PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN DATA RPB

---

Prinsip dalam melakukan penyusunan RPB adalah paradigma pengelolaan risiko bencana secara menyeluruh sejak sebelum, pada saat, dan setelah kejadian bencana serta seluruh ancaman bencana yang ada.

Sebagai kebijakan dan aras penanggulangan bencana, dokumen ini bertujuan untuk upaya melindungi warga masyarakat. Berbasis hasil kajian risiko bencana—pengenalan dan pengkajian bahaya, pengenalan kerentanan, dan analisis risiko (dampak bencana)—ditentukan upaya-upaya tindakan penanggulangannya.

**Sistematika penyusunan dokumen RPB.** Dokumen RPB disusun dengan sistematika (outline) sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Ruang Lingkup
D. Landasan Hukum
E. Pengertian
II. GAMBARAN UMUM WILAYAH
A. Kondisi Fisik
B. Kondisi sosial ekonomi
C. Kebijakan Penanggulangan Bencana (Legislasi, kelembagaan)
III. PENILAIAN RISIKO BENCANA
A. Ancaman
B. Kerentanan
C. Analisis Kemungkinan Dampak Bencana.
IV. PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
A. Pra-bencana
B. Saat Tanggap Darurat
C. Pasca Bencana
V. MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA
A. Pra Bencana

- B. Saat Tanggap Darurat
  - C. Pasca Bencana
  - D. Mekanisme Penanggulangan Bencana
- VI. ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA.
- A. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
  - B. Pelaku Kegiatan
  - C. Sumber dana
- VII. PENUTUP

**Program dan kegiatan prioritas.** Perencanaan program yang baik menggunakan kata kerja dan menerapkan prinsip SMART, yakni:

*S* = *Specific*. Spesifik tujuan, lokasi, sasaran

*M* = *Measurable*. Terukur capaiannya

*A* = *Achievable*. Realistis dapat dicapai

*R* = *Relevant*. Penting untuk mencapai tujuan

*T* = *Time-bound*. Target waktu

## B. Praktik Pembelajaran

### B.1. PRAKTEK PENYUSUNAN RPB

#### B.1.1. Identifikasi Kegiatan dan Pelaku

Gunakan penetapan rekomendasi hasil dari Modul Pengkajian Risiko Bencana. Perhatikan kelengkapan usulan kegiatan.

#### B.1.2. Rekap Kegiatan dan Perencanaan

Uraikan kegiatan-kegiatan per fase penanggulangan bencana dengan menggunakan lembar-lembar kerja di bawah ini.

Lembar kerja 1. Identifikasi kegiatan dan pelaku

<b>Jenis ancaman :</b> <b>Desa/Kec :</b> <b>Kabupaten :</b> <b>Provinsi :</b>									
Fase/tahap	Kegiatan	Lembaga Organisasi							
		Kelurahan	RW	RT	Dasa Wisma	Kel. Lele	Kel. Ternak	Karang Taruna	DLL
Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas)									
Pra bencana, saat terdapat potensi bencana (kesiapsiagaan)									
Saat tanggap darurat									
Pasca bencana									



Lembar kerja 2. Rekap kegiatan pra bencana (peningkatan kapasitas)

<b>Jenis ancaman :</b>							
<b>Fase : Pra bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas)</b>							
<b>Desa/Kec :</b>							
<b>Kabupaten :</b>							
<b>Provinsi :</b>							
No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya

Lembar kerja 3. Rekap kegiatan pra bencana (kesiapsiagaan)

<b>Jenis ancaman :</b>							
<b>Fase : Pra bencana (kesiapsiagaan)</b>							
<b>Desa/Kec :</b>							
<b>Kabupaten :</b>							
<b>Provinsi :</b>							
No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya

Lembar kerja 4. Rekap kegiatan tanggap darurat

<b>Jenis ancaman :</b>							
<b>Fase : Tanggap darurat</b>							
<b>Desa/Kec :</b>							
<b>Kabupaten :</b>							
<b>Provinsi :</b>							
No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya

Lembar kerja 5. Rekap kegiatan pasca bencana

<b>Jenis ancaman :</b>							
<b>Fase : Pasca bencana</b>							
<b>Desa/Kec :</b>							
<b>Kabupaten :</b>							
<b>Provinsi :</b>							
No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya

## Daftar Referensi

Anonim, BNPB, 2008, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

## Lampiran 1. Contoh Identifikasi Kegiatan dan Pelaku

Contoh Identifikasi kegiatan dan pelaku bencana banjir

<b>Jenis ancaman : Banjir</b> <b>Desa/Kec : Pakansari/Cibinong</b> <b>Kabupaten : Kab. Bogor</b> <b>Provinsi : Jawa Barat</b>										
Fase	Kegiatan	Lembaga/Organisasi Pelibat								
		Kelurahan	RW	RT	Dasa Wisma	Kel. Lele	Kel. Ternak	K. Taruna	Pustu	Tim Siaga
Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas)	1. Pembuatan Peraturan Penanggulangan Bencana	√	√	√						
	2. Pengajuan kegiatan RPB ke Musrenbang	√	√	√						
	3. Sosialisasi kesadaran bencana	√	√	√	√	√	√	√		
	4. Reboisasi dan penataan lingkungan	√	√	√		√	√	√		
	5. Pengerukan sungai	√								
	6. Pembuatan biopori	√	√	√	√	√	√	√		
	7. Pembentukan tim siaga bencana	√	√	√				√		
	8. Pelatihan evakuasi dan P3K							√		
	9. Simulasi bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	
	10. Pengadaan perlengkapan kebencanaan	√								
	11. Pengelolaan tabungan siaga			√	√	√	√	√		

<b>Jenis ancaman : Banjir</b> <b>Desa/Kec : Pakansari/Cibinong</b> <b>Kabupaten : Kab. Bogor</b> <b>Provinsi : Jawa Barat</b>										
Fase	Kegiatan	Lembaga/Organisasi Pelibat								
		Kelurahan	RW	RT	Dasa Wisma	Kel. Lele	Kel. Ternak	K. Taruna	Pustu	Tim Siaga
	12. Pengelolaan bank sampah				√			√		
Pra bencana, saat terdapat potensi bencana (kesiap siagaan)	1. Sosialisasi kesiapsiagaan bencana	√	√	√						√
	2. Pengaktifan Early Warning System (EWS)									√
	3. Pemantauan bahaya									√
	4. Penyiapan pos pengungsian									√
Saat tanggap darurat	1. Menghidupkan EWS dan pengeras suara							√		√
	2. Melakukan evakuasi							√		√
	3. Mengaktifkan pos pengungsian							√	√	√
	4. Melakukan kajian kerugian							√		√
	5. Mengelola logistik pengungsian	√	√	√				√		√
	6. Pengamanan lokasi bencana							√		√
Pasca bencana	1. Sosialisasi tentang pemulihan mental								√	√
	2. Rekonstruksi/rehabilitasi	√	√	√				√		√
	3. Pemulihan aktivitas	√	√	√				√		√

Contoh identifikasi kegiatan dan pelaku bencana gempa bumi

<b>Jenis Ancaman : Gempa bumi</b> <b>Desa/Kelurahan : Slawe</b> <b>Kecamatan : Watulimo</b> <b>Kabupaten/Kota : Trenggalek</b> <b>Provinsi : Jawa timur</b>										
Fase	Kegiatan	Lembaga/Organisasi Pelibat								
		Desa	RW	RT	. Nelayan	PKK	. Tani	K. Taruna	Pustu	Tim Siaga
Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas)	1. Pembuatan Peraturan Penanggulangan Bencana	√								
	2. Pengajuan kegiatan RPB ke Musrenbang	√	√	√						
	3. Sosialisasi kesadaran bencana	√	√	√	√	√	√	√		
	4. Penanaman mangrove	√	√	√	√	√	√	√		
	5. Pembuatan Early Warning System (EWS)	√								
	6. Pembentukan tim siaga bencana	√	√	√				√		
	7. Pelatihan evakuasi dan P3K							√		
	8. Simulasi bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	
	9. Pengadaan perlengkapan kebencanaan	√								
	10. Pengelolaan tabungan siaga			√	√	√	√	√		
Saat tanggap darurat	1. Mengelola logistik pengungsian	√	√	√		√		√		√
	2. Melakukan evakuasi							√		√

<b>Jenis Ancaman : Gempa bumi</b> <b>Desa/Kelurahan : Slawe</b> <b>Kecamatan : Watulimo</b> <b>Kabupaten/Kota : Trenggalek</b> <b>Provinsi : Jawa timur</b>										
Fase	Kegiatan	Lembaga/Organisasi Pelibat								
		Desa	RW	RT	. Nelayan	PKK	. Tani	K. Taruna	Pustu	Tim Siaga
	3. Mengaktifkan pos pengungsian							√	√	√
	4. Melakukan kajian kerugian							√		√
	5. Pengamanan lokasi bencana							√		√
Pasca bencana	1. Sosialisasi tentang pemulihan mental					√			√	√
	2. Rekonstruksi/rehabilitasi	√	√	√				√		√
	3. Pemulihan aktivitas	√	√	√				√		√

Contoh identifikasi kegiatan dan pelaku bencana awan panas

<b>Jenis Ancaman : Awan Panas G. Merapi</b> <b>Desa/Kelurahan : Purwobinangun</b> <b>Kecamatan : Pakem</b> <b>Kabupaten : Sleman</b> <b>Provinsi : DIY</b>											
Fase/tahap	Kegiatan	Lembaga Organisasi									
		kelurahan	BPD Desa	Forum PRB	Tagana	K. Taruna	Relawan/Tim Siaga Desa	Linmas	Masyarakat	SAR	PMI/Sibat
Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas)	Pembuatan Peraturan Penanggulangan Bencana	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Pengajuan kegiatan RPB ke Musrenbang		√								
	Sosialisasi kesadaran bencana	√	√	√			√	√	√	√	√
	Reboisasi dan penataan lingkungan			√				√	√		
	Penyusunan dokumen rencana Kontijensi	√	√	√	√	√	√	√	√		
Pra bencana, saat terdapat potensi bencana (kesiap siagaan)	Sosialisasi dari BPPTKG	√		√			√				
	Pembentukan tim siaga bencana	√		√	√	√	√		√		
	Pelatihan evakuasi dan P3K			√			√			√	√
	Simulasi bencana	√	√	√			√				√
	Pengadaan perlengkapan kebencanaan	√	√	√			√				√
	Sosialisasi kesiapsiagaan bencana	√		√			√			√	√



**Jenis Ancaman** : Awan Panas G. Merapi  
**Desa/Kelurahan** : Purwobinangun  
**Kecamatan** : Pakem  
**Kabupaten** : Sleman  
**Provinsi** : DIY

Fase/tahap	Kegiatan	Lembaga Organisasi									
		kelurahan	BPD Desa	Forum PRB	Tagana	K. Taruna	Relawan/Tim Siaga Desa	Linmas	Masyarakat	SAR	PMI/Sibat
	Pengaktifan Early Warning System (EWS)								√		
	Pemantauan bahaya G. Merapi			√			√		√		
	Penyiapan TEA pengungsian	√	√				√			√	
	Menghidupkan EWS dan pengeras suara								√		
Saat Tanggap Darurat	Melakukan evakuasi			√	√		√		√	√	√
	Mengaktifkan pos pengungsian	√		√			√		√	√	
	Melakukan kajian kerugian	√		√			√				
	Mengelola logistik pengungsian	√	√	√		√	√		√		
	Pengamanan lokasi bencana	√		√				√			√
Pasca Bencana	Sosialisasi tentang pemulihan mental						√		√		
	Rekonstruksi/rehabilitasi	√		√					√		
	Pemulihan aktivitas	√		√			√		√		

## Lampiran 2. Contoh Rekap Kegiatan

Contoh rekap kegiatan bencana banjir

<b>Jenis ancaman : Banjir</b> <b>Fase : Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas)</b> <b>Desa/Kec : Pakansari/Cibinong</b> <b>Kabupaten : Kab. Bogor</b> <b>Provinsi : Jawa Barat</b>							
No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian/Keberhasilan	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya
1	Pengajuan kegiatan RPB ke Musrenbang	Memasukkan kegiatan RPB dalam perencanaan pembangunan	Kegiatan-kegiatan RPB masuk rencana pembangunan	Kelurahan, RT, RW, dan Karang Taruna	Setiap bulan Agustus	-	-
2	Sosialisasi kesadaran bencana	Meningkatkan kesadaran masyarakat	Tersosialisasikannya RPB	Kelurahan, RT, RW,	April – September	2 Juta	APBDes Swadaya
3	Reboisasi dan penataan lingkungan sungai	Mencegah longsor bantaran sungai	Terlaksananya kegiatan reboisasi dan penataan lingkungan bantaran sungai	Kelurahan, RT, RW, dan Karang Taruna	April – September	36 Juta	APBDes Swadaya
4	Pengerukan sungai	Mengurangi luapan sungai	Terlaksananya pengerukan sungai	Kelurahan, RT, RW, dan Karang Taruna	April – September	60 Juta	APBDes Swadaya
5	Pembuatan biopori	Mempercepat resapan air	Tersedianya biopori (5.000 per RT)	Kelurahan, RT, RW, dan Karang Taruna	April – September	2 Juta	APBDes Swadaya
6	Pembentukan tim siaga bencana	Menyediakan tenaga terampil dalam penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya lembaga tim siaga bencana</li> <li>- Terbentuknya struktur organisasi tim siaga bencana</li> <li>- Tersedianya statuta/aturan tim siaga bencana</li> </ul>	Kelurahan, RT, RW, dan Karang Taruna	Maret	2 Juta	APBDes Swadaya

<b>Jenis ancaman : Banjir</b> <b>Fase : Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas)</b> <b>Desa/Kec : Pakansari/Cibinong</b> <b>Kabupaten : Kab. Bogor</b> <b>Provinsi : Jawa Barat</b>							
No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian/Keberhasilan	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya program/kegiatan tim siaga bencana</li> <li>- Terselenggaranya pertemuan rutin tim siaga bencana</li> </ul>				
7	Pelatihan evakuasi dan P3K	Meningkatkan keterampilan tim siaga bencana dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya pelatihan evakuasi dan P3K diikuti tim siaga bencana dan masyarakat</li> <li>- Tim siaga bencana mampu mempraktekkan evakuasi dan P3K dengan benar</li> </ul>	Tim siaga, Pustu dan masyarakat	Juni - Juli	2 Juta	APBDes Swadaya Sponsor
8	Simulasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan tim siaga bencana dan masyarakat</li> <li>- Uji sistem kesiapsiagaan</li> <li>- Memperbaiki rencana kontijensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya simulasi diikuti tim siaga bencana dan masyarakat</li> <li>- Masyarakat mengetahui tata cara penyelamatan diri</li> </ul>	Tim siaga bencana	Agustus	2 Juta	APBDes Swadaya Sponsor
9	Pengadaan perlengkapan kebencanaan	Menyediakan peralatan penanggulangan bencana	Tersedianya peralatan penanggulangan bencana	Kelurahan dan tim siaga bencana	Setiap bulan	30 Juta	APBDes
10	Pengelolaan tabungan siaga	Mempersiapkan dana pada saat	Adanya tabungan siaga masyarakat	Tim siaga bencana	Setiap bulan	-	Swadaya
11	Pengelolaan bank sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi sampah</li> <li>- Meningkatkan ekonomi</li> </ul>	Terkelolanya sampah	Dasa wisma	Setiap bulan	-	Swadaya

**Jenis ancaman : Banjir**  
**Fase : Pra bencana, saat terdapat potensi bencana (kesiapsiagaan)**  
**Desa/Kec : Pakansari/Cibinong**  
**Kabupaten : Kab. Bogor**  
**Provinsi : Jawa Barat**

No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian/Keberhasilan	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya
1	Sosialisasi kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir	Masyarakat sadar dan waspada akan adanya bencana banjir	Tim siaga bencana dan semua warga	Musim penghujan	2 Juta	APBDes Swadaya
2	Pengaktifan Early Warning System (EWS)	Memastikan sistem EWS bekerja	Sistem EWS bekerja saat bencana terjadi	Tim siaga bencana	Musim penghujan		
3	Pemantauan bahaya	Mengetahui keadaan sumber bahaya	Masyarakat lebih siaga	Tim siaga bencana dan semua warga	Musim penghujan		
4	Penyiapan pos pengungsian	Pos pengungsian siap dipakai saat bencana terjadi	Pos pengungsian siap dan layak digunakan	Tim siaga bencana	Musim penghujan		

**Jenis ancaman : Banjir**  
**Fase : Saat tanggap darurat**  
**Desa/Kec : Pakansari/Cibinong**  
**Kabupaten : Kab. Bogor**  
**Provinsi : Jawa Barat**

No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian/Keberhasilan	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya
1	Menghidupkan EWS dan pengeras suara	Warga dapat mengetahui akan terjadi bencana dan dapat melakukan evakuasi	Warga mengetahui informasi terjadinya bencana sebelum bencana terjadi	Tim siaga bencana dan karangtaruna			
2	Melakukan evakuasi	Warga menyelamatkan diri, barang berharga dan dokumen penting	Seluruh warga terevakuasi	Tim siaga bencana dan karangtaruna			
3	Mengaktifkan pos pengungsian	Warga yang menyelamatkan diri mendapatkan tempat dan kebutuhannya tercukupi	Warga yang mengungsi sehat dan tercukupi kebutuhannya	Tim siaga bencana dan karangtaruna			
4	Melakukan kajian kerugian	Mengetahui seberapa besar kerusakan dan kerugian	Semua kerusakan dan kerugian dapat terdata dengan baik	Tim siaga bencana dan karangtaruna			
5	Mengelola logistik pengungsian	Korban yang mengungsi dapat tercukupi kebutuhannya	Semua korban tercukupi kebutuhannya	Kelurahan, tim siaga bencana dan karangtaruna			
6	Pengamanan lokasi bencana	Lokasi kejadian bencana yang ditinggal warga tetap aman Pos pengungsian aman	Tidak terjadi tindak kejahatan di lokasi bencana dan pos pengungsian	Tim siaga bencana dan karangtaruna			

<b>Jenis ancaman : Banjir</b> <b>Fase : Pasca Bencana</b> <b>Desa/Kec : Pakansari/Cibinong</b> <b>Kabupaten : Kab. Bogor</b> <b>Provinsi : Jawa Barat</b>							
No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian/Keberhasilan	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya
1	Sosialisasi tentang pemulihan mental	Mengurangi trauma dan memulihkan mental pengungsi	Mental pengungsi kembali positif	Kelurahan, tim siaga bencana dan karangtaruna			
2	Rekonstruksi/rehabilitasi	Memperbaiki sarpras yang rusak	Sarpras yang rusak dapat difungsikan kembali	Kelurahan, tim siaga bencana dan karangtaruna			
3	Pemulihan aktivitas	Normalisasi aktivitas pengungsi	Aktivitas pengungsi berjalan normal	Kelurahan, tim siaga bencana dan karangtaruna			

Contoh rekap kegiatan bencana tsunami

<b>Jenis ancaman : Tsunami</b> <b>Fase : Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas)</b> <b>Desa/Kec : Slawe/Watulimo</b> <b>Kabupaten : Trenggalek</b> <b>Provinsi : Jawa Timur</b>							
No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian/Keberhasilan	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya
1	Pembuatan Peraturan Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami	Masyarakat sadar dan waspada akan adanya bencana tsunami	Tim siaga bencana dan semua warga	Setiap saat	2 Juta	APBDes Swadaya
2	Pengajuan kegiatan RPB ke Musrenbang	Memasukkan kegiatan RPB dalam perencanaan pembangunan	Kegiatan-kegiatan RPB masuk rencana pembangunan	Kelurahan, RT, RW, dan Karang Taruna	Setiap bulan Agustus		

<b>Jenis ancaman : Tsunami</b> <b>Fase : Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas)</b> <b>Desa/Kec : Slawe/Watulimo</b> <b>Kabupaten : Trenggalek</b> <b>Provinsi : Jawa Timur</b>							
No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian/Keberhasilan	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya
3	Sosialisasi kesadaran bencana	Meningkatkan kesadaran masyarakat	Tersosialisasikannya RPB	Kelurahan, RT, RW,	April – September	2 Juta	APBDes Swadaya
4	Pembuatan Early Warning System (EWS)	Menyediakan tenaga terampil dalam penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya lembaga tim siaga bencana</li> <li>- Terbentuknya struktur organisasi tim siaga bencana</li> <li>- Tersedianya statuta/aturan tim siaga bencana</li> <li>- Adanya program/kegiatan tim siaga bencana</li> </ul> Terselenggaranya pertemuan rutin tim siaga bencana	Kelurahan, RT, RW, dan Karang Taruna	Maret	2 Juta	APBDes Swadaya
5	Pembentukan tim siaga bencana	Menyediakan tenaga terampil dalam penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya lembaga tim siaga bencana</li> <li>- Terbentuknya struktur organisasi tim siaga bencana</li> <li>- Tersedianya statuta/aturan tim siaga bencana</li> <li>- Adanya program/kegiatan tim siaga bencana</li> </ul> Terselenggaranya pertemuan rutin tim siaga bencana	Kelurahan, RT, RW, dan Karang Taruna	Maret	2 Juta	APBDes Swadaya
6	Pelatihan evakuasi dan P3K	Meningkatkan keterampilan tim siaga bencana dan masyarakat	- Terselenggaranya pelatihan evakuasi dan	Tim siaga, Pustu dan masyarakat	Juni - Juli	2 Juta	APBDes Swadaya Sponsor

<b>Jenis ancaman : Tsunami</b> <b>Fase : Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas)</b> <b>Desa/Kec : Slawe/Watulimo</b> <b>Kabupaten : Trenggalek</b> <b>Provinsi : Jawa Timur</b>							
No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian/Keberhasilan	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya
			P3K diikuti tim siaga bencana dan masyarakat Tim siaga bencana mampu mempraktekkan evakuasi dan P3K dengan benar				
7	Simulasi bencana	- Meningkatkan keterampilan tim siaga bencana dan masyarakat - Uji sistem kesiapsiagaan Memperbaiki rencana kontijensi	- Terselenggaranya simulai diikuti tim siaga bencana dan masyarakat Masyarakat mengetahui tata cara penyelamatan diri	Tim siaga bencana	Agustus	2 Juta	APBDes Swadaya Sponsor
8	Pengadaan perlengkapan kebencanaan	Menyediakan peralatan penanggulangan bencana	Tersedianya peralatan penanggulangan bencana	Kelurahan dan tim siaga bencana	Setiap bulan	30 Juta	APBDes
9	Pengelolaan tabungan siaga	Mempersiapkan dana pada saat bencana	Adanya tabungan siaga masyarakat	Tim siaga bencana	Setiap bulan	-	Swadaya



<b>Jenis ancaman : Tsunami</b> <b>Fase : Saat tanggap darurat</b> <b>Desa/Kec : Slawe/Watulimo</b> <b>Kabupaten : Trenggalek</b> <b>Provinsi : Jawa Timur</b>							
No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian/Keberhasilan	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya
1	Menghidupkan EWS dan pengeras suara	Warga dapat mengetahui akan terjadi bencana dan dapat melakukan evakuasi	Warga mengetahui informasi terjadinya bencana sebelum bencana terjadi	Tim siaga bencana dan karangtaruna			
2	Melakukan evakuasi	Warga menyelamatkan diri, barang berharga dan dokumen penting	Seluruh warga terevakuasi	Tim siaga bencana dan karangtaruna			
3	Mengaktifkan pos pengungsian	Warga yang menyelamatkan diri mendapatkan tempat dan kebutuhannya tercukupi	Warga yang mengungsi sehat dan tercukupi kebutuhannya	Tim siaga bencana dan karangtaruna			
4	Melakukan kajian kerugian	Mengetahui seberapa besar kerusakan dan kerugian	Semua kerusakan dan kerugian dapat terdata dengan baik	Tim siaga bencana dan karangtaruna			
5	Mengelola logistik pengungsian	Korban yang mengungsi dapat tercukupi kebutuhannya	Semua korban tercukupi kebutuhannya	Kelurahan, tim siaga bencana dan karangtaruna			
6	Pengamanan lokasi bencana	Lokasi kejadian bencana yang ditinggal warga tetap aman Pos pengungsian aman	Tidak terjadi tindak kejahatan di lokasi bencana dan pos pengungsian	Tim siaga bencana dan karangtaruna			

**Jenis ancaman : Tsunami**  
**Fase : Pasca Bencana**  
**Desa/Kec : Slawe/Watulimo**  
**Kabupaten : Trenggalek**  
**Provinsi : Jawa Timur**

No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian/Keberhasilan	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya
1	Sosialisasi tentang pemulihan mental	Mengurangi trauma dan memulihkan mental pengungsi	Mental pengungsi kembali positif	Kelurahan, tim siaga bencana dan karangtaruna			
2	Rekonstruksi/rehabilitasi	Memperbaiki sarpras yang rusak	Sarpras yang rusak dapat difungsikan kembali	Kelurahan, tim siaga bencana dan karangtaruna			
3	Pemulihan aktivitas	Normalisasi aktivitas pengungsi	Aktivitas pengungsi berjalan normal	Kelurahan, tim siaga bencana dan karangtaruna			

Contoh rekap kegiatan bencana awan panas

<b>Jenis ancaman : Awan Panas G. Merapi</b> <b>Fase : Pra bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas)</b> <b>Desa/Kec : Purwobinangun</b> <b>Kabupaten : Sleman</b> <b>Provinsi : DIY</b>							
No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya
1	Pembuatan Peraturan Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai dasar kebijakan/regulasi program-program Penanggulangan Bencana Desa</li> <li>- Legalisasi dokumen – dokumen RPB, Rencana Kontijensi Desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK kepala desa</li> <li>- Perdes PB</li> <li>- SK Forum PRB Desa</li> </ul>	Perangkat desa, BPD, masyarakat, tim siaga desa, Forum PRB Desa, Karang Taruna Desa	Juli – agustus	-	-
2	Pengajuan kegiatan RPB ke Musrenbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesepakatan para pemangku kebijakan pada level desa sesuai kesepakatan unit paling bawah</li> <li>- Sebagai panduan dan tata kelola kegiatan PRB di Desa secara berjenjang</li> </ul>	Terdokumentasikan perencanaan dan penganggaran program kegiatan ketangguhan desa	Perangkat desa, BPD, masyarakat, tim siaga desa, Forum PRB Desa, Karang Taruna Desa	Februari – juni		Swadaya ADDesa
3	Sosialisasi kesadaran bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas yang tanggap bencana</li> <li>- Mendorong warga berpikir kritis sadar atas risiko bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Warga masyarakat memahami bahaya G. Merapi</li> <li>- Terselenggaranya kegiatan latihan kesiapsiagaan bencana di tingkat desa sebagai upaya ketangguhan desa</li> </ul>	Perangkat desa, BPD, masyarakat, tim siaga desa, Forum PRB Desa, Karang Taruna Desa	September		Swadaya ADDesa
4	Penyusunan dokumen rencana Kontijensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memudahkan peran koordinasi dalam situasi darurat</li> <li>- Mempermudah penanganan saat tanggap darurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada kesepakatan skenario dalam upaya penanganan darurat bencana</li> <li>- Pembagian bidang operasi sesuai kapasitas sumber daya yang ada</li> </ul>	Perangkat desa, BPD, masyarakat, tim siaga desa, Forum PRB Desa, Karang Taruna Desa	September – Desember		ADDesa, BPBD Kabupaten Sleman

<b>Jenis ancaman : Awan Panas G. Merapi</b> <b>Fase : Pra bencana (kesiapsiagaan)</b> <b>Desa/Kec : Purwobinangun</b> <b>Kabupaten : Sleman</b> <b>Provinsi : DIY</b>							
No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya
1	Sosialisasi dari Balai Pengamatan dan Penyelidikan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG)	1. Mengetahui dan memahami aktivitas perkembangan G. Merapi 2. Mengetahui Perubahan arah ancaman/Bahaya Awan Panas G. Merapi	1. Masyarakat memahami status dan aktivitas G. Merapi 2. Warga Mematuhi rekomendasi dan Sistem Peringatan Dini G. Merapi yang sudah ada	Masyarakat, FPRB Desa, Karang Taruna Desa	Status Waspada dan Siaga		Swadaya
2	Pembentukan tim siaga bencana	Ada peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung upaya – upaya PB	Ada SK nama – nama anggota dari Kepala Desa	FPRB Desa	April-Mei		ADDesa Swadaya
3	Pelatihan evakuasi dan P3K	Pengenalan materi – materi dan konsep Penanggulangan Gawat Darurat	Terselenggaranya kegiatan – kegiatan latihan gawat darurat dan mengetahui prinsip – prinsip pertolongan	Masyarakat, FPRB Desa, Karang Taruna Desa PMI/Sibat Kader Kesehatan Desa	Juni minggu ketiga (3)		
4	Penyiapan TEA/Barak Pengungsian	Sebagai tempat perlindungan untuk para penyintas dari bahaya erupsi G. Merapi	Ada lokasi yang sudah disepakati bersama sekaligus ada daya tampung dan daya dukung TEA ( Barak pengungsi) Desa Purwobinangun	Perangkat desa, BPD, masyarakat, tim siaga desa, Forum PRB Desa, Karang Taruna Desa	Juli minggu pertama		APBD kab. Sleman ADDesa

<b>Jenis ancaman : Awan Panas G.Merapi</b> <b>Fase : Tanggap Darurat</b> <b>Desa/Kec : Purwobinangun</b> <b>Kabupaten : Sleman</b> <b>Provinsi : DIY</b>							
No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya
1	Melakukan evakuasi	Menyelamatkan warga dari daerah bahaya ke daerah aman menuju ke barak utama pengungsian Desa Purwobinangun	Semua warga terdampak sudah melakukan evakuasi menuju ke lokasi barak utama Desa Purwobinangun	Warga masyarakat yang terdampak	Tanggap darurat		APBD Kab. Sleman ADDesa
2	Mengelola logistik pengungsian	Memastikan distribusi logistik sesuai dengan mekanisme untuk kebutuhan dasar penyintas	Distribusi logistik sudah tertangani Semua penyintas mendapatkan hak kebutuhan dasarnya.	Perangkat desa, BPD, masyarakat, tim siaga desa, Forum PRB Desa, Karang Taruna Desa	Tanggap Darurat		APBD Kab. Sleman ADDesa
3	Mengaktifkan pos pengungsian	Sebagai Media Center dalam situasi darurat Memudahkan koordinasi di bawah komando Unit Pelaksana Desa	Memudahkan mekanisme koordinasi, dan pelayanan informasi	Perangkat desa, BPD, masyarakat, tim siaga desa, Forum PRB Desa, Karang Taruna Desa	Tanggap Darurat		APBD Kab. Sleman ADDesa

**Jenis ancaman : Awan Panas G. Merapi**  
**Fase : Pasca bencana**  
**Desa/Kec : Purwobinangun**  
**Kabupaten : Sleman**  
**Provinsi : DIY**

No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Capaian	Pelaku	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya
1	Sosialisasi tentang pemulihan mental	Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemulihan psikososial	Warga terdampak memahami langkah – langkah pemulihan mental/penanganan psikososial	Warga terdampak Perangkat desa, BPD, masyarakat, tim siaga desa, Forum PRB Desa, Karang Taruna Desa	Pasca Bencana		ADDesa
2	Rekonstruksi/rehabilitasi	Membangun kembali sarana dan prasarana yang vital untuk memulihkan akses/fungsi wilayah yang terkena dampak bencana	Menjalankan kembali fungsi dan akses sarana dan prasarana untuk kebutuhan pasca darurat.	Warga terdampak Perangkat desa, BPD, masyarakat, tim siaga desa, Forum PRB Desa, Karang Taruna Desa	Pasca Bencana		ADDesa
3	Pemulihan aktivitas	Memastikan kembali kegiatan masyarakat yang terdampak melakukan aktifitas keseharian	Warga melakukan aktifitas sehari- hari warga bergotong – royong membersihkan lingkungan	Warga terdampak	Pasca Bencana		ADDesa

# Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



# Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana



# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputian Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

## **Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana**

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

### **PENGARAH**

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB  
Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

### **PENANGGUNGJAWAB**

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB  
Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

### **EDITOR**

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta

### **PENYUSUN**

Sigit Purwanto	Pujiono Centre
Sumino	LPTP Surakarta
Wahyu Heniwati	Daya Annisa / MDMC
Anggoro Budi Prasetyo	Aksara
Wana Kristanto	PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta
Indra Baskoro Adi	PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta
Muhammad Nur Ronggo Dinoyo	LPTP Surakarta
Gandar Mahojwala	KAPPALA Indonesia
Pudji Santosa	Lingkar
Gigih Aditya Pratama	KAPPALA Indonesia
Yugyasmono	Lingkar
Hadi Sutrisno	BNPB
Nurul Maulidhini	BNPB

### **KONTRIBUTOR**

Arif Fadli	BNPB
Virana Fatwa Nurmala	BNPB
Denadia Mutty	BNPB
Rahma Sari Puspita	BNPB
Riski Yufawinda	BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

# Daftar Isi

- Pengantar ..... 2**
- Daftar Isi ..... 4**
  
- A. Materi Pembelajaran ..... 5**
  - A.1. Pengertian Umum dan Kerangka Kerja ..... 5
  - A.2. Bentuk-Bentuk Kegiatan Mitigasi ..... 6
  
- B. Praktek Pembelajaran ..... 8**
  
- Daftar Referensi ..... 10**

# A. Materi Pembelajaran

## A.1. PENGERTIAN UMUM DAN KERANGKA KERJA

---

Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko bencana diukur dan atau dinilai melalui metode pengkajian risiko bencana. Metode ini dilakukan dengan mengetahui tingkat risiko dan memetakan risiko bencana. Secara umum, pengkajian dilakukan dalam 3 langkah, yaitu mengkaji bahaya atau ancaman bencana, mengkaji kerentanan dan kapasitasnya, dan penilaian risiko bencana.

Secara umum, risiko bencana dikelola dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengurangi risiko bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh melalui upaya-upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini. Faktor-faktor atau elemen risiko tersebut adalah bahaya atau ancaman penyebab bencana dan kerentanan yang berkaitan dengan unsur yang terpapar bahaya (manusia dan aset), termasuk kemampuannya dalam menghadapi bahaya.

Upaya mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Selain itu, mitigasi dilakukan untuk menghindari terjadinya bencana. Kegiatan mitigasi dilakukan melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sebagai tindakan/upaya preventif untuk meminimalkan dampak negatif bencana yang diantisipasi akan terjadi di masa datang di suatu daerah tertentu, mitigasi merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

Kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Mitigasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya teknis, baik secara alami maupun buatan, yang dapat mencegah atau memperkecil kemungkinan timbulnya bencana dan dampaknya. Bentuk mitigasi ini adalah segala konstruksi fisik untuk mengurangi atau menghindarkan kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh ancaman bahaya, atau penerapan teknik-teknik rekayasa untuk mewujudkan ketangguhan dan daya tahan struktur-struktur atau sistem-sistem (KKP, 2004).

Mitigasi non struktural adalah upaya non teknis yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang kegiatan manusia agar sejalan dan sesuai dengan upaya mitigasi struktural maupun upaya lainnya. Mitigasi ini adalah segala langkah yang tidak melibatkan konstruksi fisik yang menggunakan pengetahuan, praktik atau kesepakatan untuk

mengurangi risiko dan dampak, khususnya melalui kebijakan dan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan dan pendidikan (UNISDR).

## **A.2. BENTUK-BENTUK KEGIATAN MITIGASI**

---

Berikut adalah bentuk-bentuk mitigasi bencana (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2004):

### **A.2.1. Mitigasi Bencana Banjir**

#### **A.2.1.a. Mitigasi Struktural**

1. Pembangunan tanggul di pinggir titik-titik daerah rawan banjir serta waduk pada daerah genangan air,
2. Pembangunan kanal-kanal untuk menurunkan ketinggian air di daerah aliran sungai dengan menambah dan mengalihkan arah aliran sungai sekaligus untuk irigasi,
3. Membangun riverside conservation area di daerah tengah dan hulu, bertujuan untuk menahan air tidak segera menuju muara,
4. Pembangunan polder, bertujuan untuk mengumpulkan dan memindahkan air dari tempat yang mempunyai elevasi lebih tinggi dengan menggunakan pompa,
5. Normalisasi secara selektif sungai bertujuan untuk melancarkan dan mempercepat aliran air sungai secara proporsional, dan
6. Pembangunan pintu-pintu air pengendali banjir di ruas ruas sungai sehingga debit sungai akan sesuai dengan kapasitas sungai. Pemilihan jenis konstruksi dan prasarana pengendali banjir khususnya untuk mitigasi bencana struktural tersebut dilakukan melalui tahapan pengenalan/pengecekan kondisi lapangan, penyusunan masterplan, studi kelayakan rancang bangun dengan pertimbangan ekologis dan teknis secara terpadu.
7. Penghijauan (reboisasi) daerah-daerah yang rawan banjir.
8. Desain kompleks pemukiman yang “akrab bencana”

#### **A.2.1.b. Mitigasi Non Struktural**

1. Peraturan perundangan yang mengatur tentang bencana alam,
2. Kebijakan tentang tata guna lahan di dataran banjir dan daerah tangkapan air,
3. Kebijakan tentang standarisasi bangunan (permukiman maupun bangunan lainnya) serta infrastruktur sarana dan prasarana,
4. Pembuatan Peta Potensi Bencana Banjir, Peta Tingkat Kerentanan dan Peta Tingkat Ketahanan,
5. Mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal serta mikrozonasi sistem drainase perkotaan dan sistem pengelolaan sampah.
6. Kebijakan tentang penerapan batas sempadan sungai,
7. Pelatihan dan simulasi serta sosialisasi mitigasi bencana banjir,
8. Pengendalian curah hujan untuk mengurangi intensitas curah hujan.
9. Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir

## **A.2.2. Mitigasi Bencana Tsunami**

### **A.2.2.a. Mitigasi Struktural**

1. Alami, seperti penanaman “green belt” (hutan pantai atau mangrove), di sepanjang kawasan pantai dan perlindungan terumbu karang.
2. Buatan,
  - a. pembangunan breakwater, seawall, pemecah gelombang sejajar pantai untuk menahan tsunami,
  - b. memperkuat desain bangunan serta infrastruktur lainnya dengan kaidah teknik bangunan tahan bencana tsunami dan tata ruang akrab bencana, dengan mengembangkan beberapa insentif, antara lain:
    - Retrofitting: agar kondisi bangunan permukiman memenuhi kaidah teknik bangunan tahan tsunami,
    - Relokasi: salah satu aspek yang menyebabkan daerah rentan bencana adalah kepadatan permukiman sehingga tidak ada ruang publik untuk evakuasi serta terbatasnya mobilitas masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memindahkan sebagian permukiman ke lokasi lain, dan menata kembali permukiman yang ada mengacu konsep kawasan permukiman akrab bencana.

### **A.2.2.b. Mitigasi Non Struktural**

1. Peraturan perundangan yang mengatur tentang bencana alam,
2. Kebijakan tentang tata guna lahan / tata ruang/ zonasi kawasan pantai yang aman bencana,
3. Kebijakan tentang standarisasi bangunan (permukiman maupun bangunan lainnya) serta infrastruktur sarana dan prasarana,
4. Mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal,
5. Pembuatan Peta Potensi Bencana Tsunami, Peta Tingkat Kerentanan dan Peta Tingkat Ketahanan, sehingga dapat didesain kompleks permukiman “akrab bencana” yang memperhatikan beberapa aspek :
  - a. Bangunan permukiman tahan terhadap bencana tsunami,
  - b. Mobilitas dan akses masyarakat pada saat terjadi bencana,
  - c. Ruang fasilitas umum untuk keperluan evakuasi, dan
  - d. Aspek sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar kegiatan perekonomiannya tergantung pada hasil dan budidaya kawasan pantai.
6. Kebijakan tentang eksplorasi dan kegiatan perekonomian masyarakat kawasan pantai,
7. Pelatihan dan simulasi mitigasi bencana tsunami,
8. Penyuluhan dan sosialisasi upaya mitigasi bencana tsunami, dan
9. Pengembangan sistem peringatan dini adanya bahaya tsunami.

## B. Praktek Pembelajaran

Berikut adalah langkah menyusun dan menentukan rencana dan kegiatan mitigasi bencana.

1. Gunakan hasil kajian risiko bencana untuk dasar menentukan jenis bahaya atau ancaman bencana.
2. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana tersebut deskripsikan intensitas bahaya tersebut, yaitu gambaran akibat atau dampak dari kejadian bencana. Intensitas bahaya dapat berupa jumlah penduduk terdampak, aset terdampak, luas wilayah terdampak, dan lainnya di lokasi yang akan dilakukan kegiatan mitigasi bencana. Data intensitas ini dapat dikembangkan dari matrik Penilaian Risiko di mana penyebab dan bentuk-bentuk kerentanan dan kapasitas telah teridentifikasi. (lihat Modul Pengkajian Risiko Bencana Partisipatif)
3. Tentukan kegiatan mitigasi sesuai kondisi dan kapasitas yang dimiliki masyarakat.
4. Hasil, yaitu hasil atau target yang akan dicapai dari kegiatan mitigasi.
5. Strategi Keberlanjutan, yaitu rancangan pengelolaan hasil-hasil mitigasi. (Lembar Kerja 1)

Lembar Kerja 1 Rencana Kegiatan Mitigasi

Bahaya	Intensitas Bahaya	Kegiatan Mitigasi	Hasil	Strategi Keberlanjutan

6. Detail detail kegiatan mitigasi, yaitu penjabaran tiap kegiatan mitigasi dengan setidaknya menjelaskan tentang tujuan, hasil-hasil teknis, lokasi dan waktu, jumlah dana yang diperlukan, sumber dana, dan pelaksana teknis kegiatan mitigasi. Informasi lain yang relevan dan mendukung gambaran kegiatan dapat ditambahkan dalam Lembar Kerja 2 berikut ini.

Lembar Kerja 2 Penyusunan Rancangan Detail Kegiatan Mitigasi

Kegiatan Mitigasi	Tujuan	Hasil	Lokasi dan Waktu	Anggaran	Sumber Anggaran	Pelaksana

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kegiatan mitigasi:

1. Manfaat, yaitu manfaat untuk mengatasi permasalahan dan perlindungan bagi masyarakat terdampak
2. Relevansi, yaitu hubungan kegiatan/aksi terhadap upaya meredam atau mengurangi ancaman
3. Kapasitas yang dimiliki, yaitu kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan/aksi
4. Keberlanjutan, yaitu memastikan adanya strategi atau cara agar hasil-hasil kegiatan mitigasi dikelola dengan baik.



## Daftar Referensi

- Anonim, 2004, Pedoman Mitigasi Bencana Alam Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Anonim, 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana
- Anonim, 2007, Undang Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Anonim, 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Anonim. 2009, Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Dalam Program Pengembangan Masyarakat Sipil. Modul Pelatihan. Lingkar, Forum PRB DIY, UNDP
- Anonim, 2012, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana
- Anonim, 2015, Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 - 2030, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Anonim, 2019, Terminologi Pengurangan Risiko Bencana. United Nations Disaster Risk Reduction Secretariat
- Anonim, 2020, Panduan Teknis Fasilitator Desa Tangguh Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Coburn, A.W, 2009, Mitigasi Bencana, United Nations Development Programme
- Paripurno, E.T dan Jannah, M (Editor), 2014, Panduan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Jakarta
- Paripurno, E.T, 2007, PRA untuk Penanggulangan Bencana, Perkumpulan KAPPALA - Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta

# Penyusunan Rencana Kontingensi Desa/Kelurahan

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



# Penyusunan Rencana Kontingensi Desa dan Kelurahan

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputan Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

## **Penyusunan Rencana Kontingensi Desa dan Kelurahan**

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

### **PENGARAH**

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB

Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

### **PENANGGUNGJAWAB**

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB

Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

### **EDITOR**

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

### **PENYUSUN**

Sigit Purwanto

Sumino

Wahyu Heniwati

Anggoro Budi Prasetyo

Wana Kristanto

Indra Baskoro Adi

Muhammad Nur Ronggo Dinoyo

Gandar Mahojwala

Pudji Santosa

Gigih Aditya Pratama

Yugyasmono

Hadi Sutrisno

Nurul Maulidhini

Pujiono Centre

LPTP Surakarta

Daya Annisa / MDMC

Aksara

PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

LPTP Surakarta

KAPPALA Indonesia

Lingkar

KAPPALA Indonesia

Lingkar

BNPB

BNPB

### **KONTRIBUTOR**

Arif Fadli

BNPB

Virana Fatwa Nurmala

BNPB

Denadia Mutty

BNPB

Rahma Sari Puspita

BNPB

Riski Yufawinda

BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan

Kedeputian Bidang Pencegahan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

# Daftar Isi

<b>Pengantar .....</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>4</b>
<b>A. Materi Pembelajaran .....</b>	<b>5</b>
A.1. Pengertian, Tujuan, dan Landasan Perencanaan Kontingensi.....	5
A.2. Penyusunan Skenario .....	8
A.3. Penetapan Tujuan dan Strategi Penanganan Darurat Bencana .....	11
A.4. Penetapan Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana .....	11
A.5. Perencanaan bidang operasi/sector .....	11
<b>B. Praktik Pembelajaran .....</b>	<b>12</b>
B.1. Praktek Penyusunan Skenario.....	12
B.2. Praktek Penetapan Tujuan Dan Strategi Penanganan Darurat Bencana .....	13
B.3. Praktek Penetapan SKPDB .....	17
B.4. Praktek Perencanaan Bidang Operasi.....	20
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>28</b>

# A. Materi Pembelajaran

## A.1. PENGERTIAN, TUJUAN, DAN LANDASAN PERENCANAAN KONTINGENSI

---

Kontingensi adalah suatu kondisi yang bisa terjadi, tetapi belum tentu benar-benar terjadi. Perencanaan kontingensi merupakan suatu upaya untuk merencanakan suatu peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan peristiwa itu tidak akan terjadi. Adanya unsur ketidakpastian, maka diperlukan suatu perencanaan untuk mengurangi akibat yang mungkin terjadi (BNPB, Panduan Perencanaan Kontinjensi, 2011).

Perencanaan kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan untuk kesiapan tanggap darurat yang di dalamnya terdapat situasi potensi bencana, di mana skenario, kebutuhan sumber daya (analisa kesenjangan) kesepakatan jumlah sektor dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahannya potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat.

Rencana kontingensi disusun untuk satu ancaman, dan kemungkinan ancaman ikutan bila ada. Penentuan ancaman yang diprioritaskan dilakukan dengan menilai bobot pada Kemungkinan Kejadian dan/atau Skala Dampak. Rencana kontingensi disusun untuk satu periode waktu yang disepakati. Perencanaan kontingensi menggunakan asumsi skenario dan dampak yang disepakati.

Beberapa butir penting bahwa perencanaan kontinjensi:

1. Dilakukan sebelum keadaan darurat berupa proses perencanaan ke depan.
2. Lebih merupakan proses daripada menghasilkan dokumen.
3. Merupakan suatu proses partisipasi membangun kesepakatan skenario dan tujuan yang akan diambil.
4. Merupakan suatu kesiapan untuk tanggap darurat dengan menentukan langkah dan sistem penanganan yang akan diambil sebelum keadaan darurat terjadi.
5. Mencakup upaya-upaya pencegahan risiko yang lebih tinggi
6. Aktivasi dari perencanaan kontingensi beralih ke rencana operasi tanggap darurat
7. Rencana kontingensi memetakan sumber daya yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan untuk melakukan tanggap darurat

Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai turunan dari Undang-undang Penanggulangan Bencana No 24 Tahun 2007 menyatakan pentingnya rencana kontingensi disusun untuk memberikan arah dan panduan dalam operasi tanggap darurat ketika bencana terjadi. Sejalan juga dengan amanat UU PB No 24 tahun 2007 tentang perbaikan sistem penanggulangan bencana pada setiap tingkatan

baik nasional, provinsi, kabupaten/kota bahkan di tingkat masyarakat, maka untuk percepatan perbaikan sistem tersebut, Pemerintah dengan dukungan kuat DPR RI melalui BNPB memberikan prioritas peningkatan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah melalui kegiatan Penyusunan Rencana kontingensi.

Beberapa prinsip dalam penyusunan rencana kontingensi desa dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Prinsip-prinsip penyusunan rencana kontingensi desa

<b>Prinsip</b>	<b>Penjelasan</b>
1. Dasarnya jelas	Setelah ada kajian risiko bencana, setelah ada peringatan bahaya, memasuki musim hujan/kemarau
2. Hanya untuk satu jenis ancaman	Rencana kontingensi disusun untuk satu jenis ancaman saja
3. Disusun secara partisipatif	Melibatkan Semua Pihak Baik Pemerintah, masyarakat, organisasi dan lembaga-lembaga dengan proses terbuka serta tidak ada keputusan-keputusan tertutup
4. Berdasarkan kesepakatan	Skenario, tujuan, prosedur ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama
5. Harus bisa dioperasionalkan	Semua prosedur dalam rencana kontingensi harus masuk akal, bisa dijalankan, mudah dipahami, biasa dijadikan dasar rencana operasi
6. Tidak menimbulkan keresahan	Penyusunan rencana kontingensi harus menggunakan kehati-hatian ekstra agar tidak diartikan sebagai usaha menakut-nakuti sehingga memicu keresahan
7. Mengutamakan sumberdaya lokal	Kebutuhan sumberdaya dalam rencana kontingensi sebisa mungkin dipenuhi dengan mengerahkan sumber daya setempat
8. Dipatuhi oleh semua pihak	Setiap kesepakatan dalam rencana kontingensi bersifat mengikat
9. Selalu dimutakhirkan	Rencana kontingensi harus selalu diperbaiki secara berkala agar selalu sesuai dengan perkembangan ancaman, penduduk dan prakiraan dampak
10. Tujuan kemanusiaan	Penyusunan rencana kontingensi ditujukan serta untuk kepentingan kemanusiaan



Sistematika dokumen rencana kontingensi. Perlu ditegaskan bahwa penyusunan rencana kontingensi tidak semata-mata untuk menghasilkan dokumen, tetapi lebih untuk menata kesiapan menghadapi bencana. Untuk apa dokumen indah, rapi, bagus tetapi tidak bisa diterapkan.

Tabel 2.2. Sistematika dokumen rencana kontingensi

Bagian	Isi
1. Latar Belakang	Berisi penjelasan latar belakang mengapa dibutuhkan rencana kontingensi, ruang lingkupnya, serta landasan-landasan formal dan pengertian rencana kontingensi
2. Tujuan	Berisi penjelasan tujuan umum dan khusus perencanaan kontingensi
3. Pengkajian risiko bencana /penilaian ancaman	Berisi deskripsi hasil pengkajian risiko atau penilaian ancaman sebagai dasar pengembangan skenario
4. Pengembangan skenario	Berisi skenario kejadian ancaman dan kerugian-kerugian pada aspek manusia, sosial, ekonomi, politik, infrastruktur dan lingkungan/alam
5. Kebijakan dan strategi	Berisi pernyataan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana akibat ancaman serta strategi-strategi untuk melaksanakan atau mencapai hasil dari pernyataan kebijakan
6. Perencanaan sektoral	Berisi pemetaan aktor/ <i>stakeholder</i> /pelaku, kebutuhan jumlah dan nama sektor, penjelasan situasi, tujuan, sasaran, proyeksi kebutuhan sumberdaya dan analisis kesenjangan (kebutuhan vs ketersediaan sumberdaya) per sektor
7. Rencana tindak lanjut	Menjelaskan rencana-rencana untuk melakukan perbaikan, formalisasi, pelatihan

## A.2. PENYUSUNAN SKENARIO

### A.2.1. Skenario Kejadian Ancaman

Skenario kejadian ancaman adalah perkiraan-perkiraan masuk akal tentang kejadian ancaman. Dapat menggunakan skenario kejadian terburuk atau skenario kejadian paling mungkin (seperti pernah terjadi sebelumnya). Pengembangan skenario harus berpedoman pada hasil kajian karakter ancaman dan peta risiko bencana. Penyusunan skenario kejadian ancaman meliputi:

- Waktu kejadian, misalnya ancaman terjadi pada tengah malam atau dini hari saat semua masyarakat sedang terlelap tidur (ini contoh skenario terburuk).
- Kecepatan datangnya ancaman, misalnya melebihi dari kecepatan dalam karakter ancaman.
- Lama kejadian, misalnya sampai 4 jam atau 4 hari.
- Perulangan kejadian, misalnya setelah kejadian ancaman pertama disusul kejadian berikutnya dengan jeda waktu sempit.
- Ketersediaan jalur dan alat evakuasi
- Potensi bencana ikutan, misalnya banjir menyebabkan aliran listrik arus pendek sehingga menyebabkan korban dan membahayakan penolong.
- Luas daerah terdampak, bisa satuan luas (hektar) atau unit wilayah (dusun, RT/RW).

Tabel 2.3. Contoh Skenario kejadian Ancaman Banjir

<b>Jenis ancaman : Banjir</b>	
<b>Desa/Kelurahan : Pakansari</b>	
<b>Kecamatan : Cibinong</b>	
<b>Kabupaten/Kota : Bogor</b>	
<b>Provinsi : Jawa Barat</b>	
<b>Karakter</b>	<b>Keterangan</b>
Waktu kejadian	Peringatan bahaya diterima pukul 00.00
Lama kejadian	3 X 24 Jam
Luas daerah terdampak	-
Potensi bencana ikutan	Longsor

Tabel 2.4. Contoh Skenario kejadian

<b>Jenis Ancaman : Tsunami</b>	
<b>Desa/Kelurahan : Prigi</b>	
<b>Kecamatan : Watulimo</b>	
<b>Kabupaten/Kota : Trenggalek</b>	
<b>Provinsi : Jawa Timur</b>	
<b>Karakter</b>	<b>Keterangan</b>
Waktu kejadian	Peringatan bahaya diterima pukul 19.30
Lama kejadian	20 Menit
Luas daerah terdampak	-
Potensi bencana ikutan	-

Tabel 2.5. Contoh Skenario kejadian

<b>Jenis ancaman</b> : Awan Panas G. Merapi	
<b>Desa/Kelurahan</b> : Purwobinangun	
<b>Kecamatan</b> : Pakem	
<b>Kabupaten/Kota</b> : Sleman	
<b>Provinsi</b> : DIY	
Karakter	Keterangan
Waktu kejadian	Peringatan bahaya diterima pukul 14.30 wib
Lama kejadian	2 jam
Luas daerah terdampak	Radius 5 km dari Puncak G. Merapi
Potensi bencana ikutan	Hujan Abu Vulkanik

### A.2.2. Skenario Dampak

Dengan skenario kejadian disepakati, maka dapat diperkirakan kemungkinan apa saja bentuk dampak ancaman. Perkiraan dampak menggunakan hasil kajian risiko bencana.

Tabel 2.6. Contoh skenario dampak

<b>Jenis ancaman</b> : Banjir		
<b>Desa/Kelurahan</b> : Pakansari		
<b>Kecamatan</b> : Cibinong		
<b>Kabupaten/Kota</b> : Bogor		
<b>Provinsi</b> : Jawa Barat		
Aset	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset	
	Bentuk Risiko	Jumlah
Manusia	Kena penyakit (diare, gatal-gatal, ISPA, DBD, Chikungunya),	252 jiwa
	Depresi stres	252 jiwa
	Tidak bisa bekerja	63 KK
	Tidak bisa sekolah	Sekitar 100 anak
Sosial	Kerukunan sosial hilang/menurun	63 KK
Ekonomi/ Finansial	Harta benda hilang dan rusak atau hancur	63 KK
	Dokumen dan surat berharga rusak/hilang	63 KK
	Kolam lele/ikan jebol tanggulnya	63 KK
Fisik/ Infrastruktur	Rumah rusak/tidak bisa ditinggali	63 KK
Alam/ Lingkungan	- Kesulitan air bersih karena sumur tercemar banjir.	RW 04: RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05
	- ,	RW 08: RT 02

Tabel 2.7. Contoh skenario dampak

<b>Jenis Ancaman : Tsunami</b>		
<b>Desa/Kelurahan : Prigi</b>		
<b>Kecamatan : Watulimo</b>		
<b>Kabupaten/Kota : Trenggalek</b>		
<b>Provinsi : Jawa Timur</b>		
Aset	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset	
	Bentuk Risiko	Jumlah
Manusia	Meninggal	52 jiwa
	Cacat	184 jiwa
	Luka	389 jiwa
	Tidak bisa bekerja	2933 KK
	Tidak bisa sekolah	Sekitar 1000 anak
Sosial	Kerukunan sosial hilang/menurun	2933 KK
Ekonomi/ Finansial	Harta benda hilang dan rusak atau hancur	2933 KK
	Dokumen dan surat berharga rusak/hilang	2933 KK
Fisik/ Infrastruktur	Rumah rusak/tidak bisa ditinggali	2933 KK
Alam/ Lingkungan	- Kesulitan air bersih karena saluran air rusak	Desa Prigi

Tabel 2.8. Contoh skenario dampak

<b>Jenis ancaman : Awan Panas G. Merapi</b>		
<b>Desa/Kelurahan : Purwobinangun</b>		
<b>Kecamatan : Pakem</b>		
<b>Kabupaten/Kota : Sleman</b>		
<b>Provinsi : DIY</b>		
Aset	Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset	
	Bentuk Risiko	Jumlah
Manusia	Meninggal	68 jiwa
	Cacat fisik	42 jiwa
	Luka-luka/Luka Bakar	32 jiwa
	Sakit	10 jiwa
	Kehilangan kemampuan/keterampilan	55 jiwa
	Mengungsi	550 jiwa
	Tidak bisa bekerja	156 jiwa
	Tidak bisa sekolah	55 jiwa
Sosial	Terganggunya kegiatan kemasyarakatan	1 padukuhan
Ekonomi/ Finansial	Kehilangan pekerjaan	1 Padukuhan
	Akses kehilangan modal kerja	
Fisik/ Infrastruktur	Rumah rusak	1 Padukuhan
	Infrastruktur rusak	
Alam/ Lingkungan	Kerusakan jaringan pipa air bersih di kali Boyong Kerusakan saluran air Tercemarnya air bersih dari abu vulkanik 6 dusun terdampak kekurangan air bersih	6 Padukuhan terdiri dari Turgo, Kaliurang Barat, Ngandong, Tritis Kulon, Ngepring, Kemiri

### **A.3. PENETAPAN TUJUAN DAN STRATEGI PENANGANAN DARURAT BENCANA**

---

Tujuan dimaksud disini adalah tujuan-tujuan khusus dan indikatif yang hendak dicapai dari adanya penanganan darurat bencana. Sedangkan strategi merupakan cara spesifik yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan dan strategi penanganan darurat bencana harus merupakan hasil kesepakatan bersama dalam penyusunan rencana kontingensi.

Tujuan penanganan darurat bencana diekspresikan dengan kalimat-kalimat pernyataan tegas (tidak bermakna ganda) serta mudah dipahami. Sedangkan strategi penanganan darurat bencana diekspresikan dengan kalimat-kalimat pernyataan tegas dan bersifat mengatur bagaimana suatu hal harus dilakukan.

### **A.4. PENETAPAN STRUKTUR KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA**

---

Setelah semua seksi membuat perencanaan kegiatan, proses lokakarya dapat dilanjutkan dengan menyusun Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Struktur ini akan menggambarkan secara jelas hirarki, rantai komando dan rantai koordinasi antar sektor, pengambilan keputusan dan alur pertanggungjawaban. Struktur komando tanggap darurat dapat disusun menggunakan organigram seperti di bawah ini.

### **A.5. PERENCANAAN BIDANG OPERASI/SEKTOR**

---

Perencanaan sektoral dimaksud disini adalah perencanaan sektor atau bidang yang perlu ditangani, siapa menanganinya, bagaimana dan kapan penanganannya serta kebutuhan sumber dayanya. Jenis dan jumlah sektor untuk ditangani selaras dengan pernyataan kebijakan. Beberapa sektor atau bidang paling umum ada dalam rencana yakni, SAR, penampungan pengungsi, layanan kesehatan, air-sanitasi.

Rencana satu sektor biasanya selalu terhubung dengan sektor lainnya. Maka hal terpenting harus diperhatikan dalam penyusunan rencana sektor adalah keterkaitan dan sinergi antara sektor satu dengan lainnya. Agar mempermudah melihat keterhubungan dan keterpaduan antar sektor, maka rencana tiap sektor sekurang-kurang harus memuat 5 penjelasan di bawah ini:

1. Situasi. Menjelaskan dalam situasi seperti apa sektor bersangkutan mulai bekerja
2. Sasaran. Menjelaskan rincian dan ukuran-ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas sektor
3. Kegiatan dan Pelaku. Menjelaskan bentuk kegiatan dan pelakunya (dalam bentuk tabel)
4. Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya. Menjelaskan kebutuhan-kebutuhan sumberdaya oleh sektor agar dapat melaksanakan tugasnya
5. Analisa Kesenjangan Sumberdaya. Menjelaskan perbedaan atau selisih sumberdaya antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Penjelasan ini menjadi alat untuk mengukur kemampuan serta sebagai acuan dalam pengembangan rencana kontingensi.

## B. Praktik Pembelajaran

### B.1. PRAKTEK PENYUSUNAN SKENARIO

---

#### B.1.1. Skenario Kejadian

Setelah mengikuti penjelasan tentang penyusunan skenario maka peserta diminta mencurahkan pendapat tentang aspek-aspek dalam penyusunan skenario kejadian dan dampak menggunakan lembar kerja berikut ini.

Lembar kerja 1. Tugas kelompok penyusunan skenario kejadian

<b>Jenis ancaman</b> : .....	
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....	
<b>Kecamatan</b> : .....	
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....	
<b>Provinsi</b> : .....	
Karakter	Keterangan
Waktu kejadian	
Lama kejadian	
Luas daerah terdampak	
Potensi bencana ikutan	

#### B.1.2. Skenario Dampak

Setelah mengikuti penjelasan tentang skenario dampak, peserta diminta menyusun skenario dampak dengan menggunakan hasil penilaian risiko bencana hasil dari praktek Modul Pengkajian Risiko Bencana Partisipatif.

Lembar kerja 2. Tugas kelompok penyusunan skenario dampak

<b>Jenis ancaman</b> : .....		
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....		
<b>Kecamatan</b> : .....		
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....		
<b>Provinsi</b> : .....		
<b>Aset</b>	<b>Perkiraan Bentuk Risiko Pada Aset</b>	
	Bentuk Risiko	Jumlah
Manusia		
Sosial		
Ekonomi/ Finansial		
Fisik/ Infrastruktur		
Alam/ Lingkungan		

## B.2. PRAKTEK PENETAPAN TUJUAN DAN STRATEGI PENANGANAN DARURAT BENCANA

Lembar kerja 3. Penyusunan tujuan dan strategi penanganan darurat bencana

<b>Jenis ancaman</b> : ..... <b>Desa/Kelurahan</b> : ..... <b>Kecamatan</b> : ..... <b>Kabupaten/Kota</b> : ..... <b>Provinsi</b> : .....	
Tujuan	Strategi
1. Pengerahan seluruh sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana	1. Menetapkan situasi darurat bencana dengan..... 2. Menetapkan masa tanggap darurat bencana selama.....hari
2. Korban meninggal dunia.....jiwa	1..... 2..... 3..... 4.....
3. Korban hilang.....jiwa	1..... 2..... 3..... 4.....
4. Korban luka-luka.....jiwa tertangani hingga ke Puskesmas/rumah sakit	1..... 2..... 3..... 4.....
5. Kebutuhan dasar pengungsi tercukupi	1..... 2..... 3..... 4.....
6. Dihasilkannya data kerusakan dan kerugian untuk digunakan pada tahap paska bencana	1..... 2..... 3..... 4.....

Tabel 2.9. Contoh kebijakan dan strategi darurat bencana banjir

<b>Jenis ancaman : Banjir</b> <b>Desa/Kelurahan : Pakansari</b> <b>Kecamatan : Cibinong</b> <b>Kabupaten/Kota : Bogor</b> <b>Provinsi : Jawa Barat</b>	
<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Pengalokasian seluruh sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan kondisi tanggap darurat bencana dengan SK Lurah</li> <li>Menetapkan masa tanggap darurat 7 hari</li> </ul>
Korban meninggal/hilang 0 jiwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring tanda-tanda banjir</li> <li>Memberitahukan kepada warga yang terkena rawan banjir dengan pengeras suara</li> <li>Berkoordinasi dengan RT,Rw,dan Kelurahan</li> <li>Menyediakan tempat pengungsian dan tenda pengungsian bila terjadi banjir</li> <li>Menyiapkan dapur umum dan obat-obatan</li> </ul>
Korban luka tertangani sampai dirumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan kendaraan siaga</li> <li>Menyiapkan surat-surat untuk pengurusan kesehatan/JAMKESMAS</li> </ul>
Kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi	Sandang,pangan,papan,posko kesehatan,pendidikan,kebutuhan rohani,menyediakan MCK,sarana permainan anak
Memastikan adanya kegiatan pemulihan awal	Menyediakan alat kebersihan yaitu : cangkul,ember,skop,dll

Tabel 2.10. Contoh kebijakan dan strategi darurat bencana tsunami

<b>Jenis Ancaman : Tsunami</b> <b>Desa/Kelurahan : Prigi</b> <b>Kecamatan : Watulimo</b> <b>Kabupaten/Kota : Trenggalek</b> <b>Provinsi : Jawa Timur</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Strategi</b>
Memastikan semua warga terdampak tertangani dan tercukupi kebutuhan dasarnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengerahkan semua sumber daya dan Potensi yang ada untuk dapat dipergunakan dalam tanggap darurat penanggulangan bencana, dan bersifat partisipatif.</li> <li>Pembentukan Posko Penanggulangan Bencana dan Penyediaan Logistik dan fasilitas pengungsian bagi pengungsi, serta pos-pos kesehatan, rumah sakit lapangan di setiap titik pengungsian, menyiapkan obat-obatan, penyediaan darah, dokter dan paramedis.</li> <li>Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan serta tindak lanjut yang direncanakan</li> </ol>
Memastikan tidak munculnya risiko ikutan	Berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana, dan terus memantau informasi terkini.



<b>Jenis Ancaman : Tsunami</b> <b>Desa/Kelurahan : Prigi</b> <b>Kecamatan : Watulimo</b> <b>Kabupaten/Kota : Trenggalek</b> <b>Provinsi : Jawa Timur</b>	
Tujuan	Strategi
Memastikan keberlanjutan proses pendidikan	Segera mendata anak-anak dalam usia sekolah untuk diberikan pendidikan di posko darurat.
Meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik serta memastikan bahwa para korban bebas dari tindakan diskriminasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kegiatan mengurus para korban bencana dengan kegiatan evakuasi, penyelamatan korban luka-luka, dan pelayanan kesehatan</li> <li>Melaksanakan kegiatan mengurus para pengungsi korban bencana dengan kegiatan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, hunian sementara, dan MCK serta air bersih.</li> </ol>
Memastikan inventarisasi dan penyelamatan aset penting negara.	Mengarahkan kepada tim forum PRB untuk menyelamatkan asset penting Negara dan menunjuk salah satu orang sebagai penanggung jawab.

Tabel 2.11. Contoh kebijakan dan strategi darurat bencana awan panas

<b>Jenis ancaman : Awan Panas G. Merapi</b> <b>Desa/Kelurahan : Purwobinangun</b> <b>Kecamatan : Pakem</b> <b>Kabupaten/Kota : Sleman</b> <b>Provinsi : DIY</b>	
Tujuan	Strategi
1. Pengerahan seluruh sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan situasi darurat bencana dengan SK kepala desa</li> <li>Menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 30 hari</li> </ol>
2. Korban meninggal dunia 0 jiwa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan koordinasi dalam penyusunan rencana kontingensi</li> <li>Peningkatan kapasitas melalui destana</li> <li>Latihan kesiapsiagaan PB secara berkala</li> <li>Koordinasi dengan FPRB Desa. Unit pelaksana Desa bersama BPBD Kab. Sleman</li> </ol>
3. Korban hilang 0 jiwa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membentuk tim penyisir tingkat dusun yang didukung oleh Basarnas</li> <li>Koordinasi dengan linmas desa bersama PMI</li> <li>Persiapan peralatan pendukung masing – masing sumberdaya.</li> </ol>
4. Korban luka-luka 10 jiwa tertangani hingga ke Puskesmas/rumah sakit	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kesiapan SOP tim kesehatan desa yang sudah disepakati</li> <li>Koordinasi dengan pihak RS rujukan</li> </ol>

<b>Jenis ancaman : Awan Panas G. Merapi</b> <b>Desa/Kelurahan : Purwobinangun</b> <b>Kecamatan : Pakem</b> <b>Kabupaten/Kota : Sleman</b> <b>Provinsi : DIY</b>	
Tujuan	Strategi
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kesiapan armada ambulance bersama personel medis/tim medis</li> <li>4. Dukungan dari Tim TRC BPBD Kab. Sleman</li> </ol>
5. Kebutuhan dasar pengungsi tercukupi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesigapan tim Dapur Umum dan Logistik selalu koordinasi dan melakukan evaluasi</li> <li>2. Identifikasi kelompok rentan yang prioritas untuk pemenuhan dasar pengungsi</li> <li>3. Pelibatan semua relawan desa/Forum PRB Desa Purwobinangun, dengan dukungan semua perangkat desa</li> <li>4. SOP penanganan kedaruratan yang sudah disepakati bersama</li> </ol>
6. Dihasilkannya data kerusakan dan kerugian untuk digunakan pada tahap paska bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada kajian awal mengenai data kerusakan dan kerugian</li> <li>2. Diseminasi hasil dari tim pasca bencana desa untuk ditindak lanjuti oleh perangkat daerah/ BPBD Kab. Sleman</li> </ol>

### B.3. PRAKTEK PENETAPAN SKPDB

Lembar kerja 4. Tugas kelompok penetapan struktur komando penanganan darurat bencana

<b>Jenis ancaman</b> : .....		
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....		
<b>Kecamatan</b> : .....		
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....		
<b>Provinsi</b> : .....		
Penanggung Jawab/Komandan:		
Koordinator Umum/Wakil komandan:		
<b>Bidang Operasi</b>	<b>Koordinator</b>	<b>Anggota</b>
1. Sekretariat		
2. Peringatan Dini		
3. Evakuasi		
4. SAR (Pencarian dan Pertolongan)		
5. Layanan Kesehatan		
6. Barak Pengungsian		
7. Dapur Umum		
8. Bantuan non Pangan		
9. Air dan Sanitasi		
10. Pendidikan		
11. Keamanan		
12. Pengkajian kerusakan dan kerugian		

Tabel 2.12. Contoh struktur komando penanganan darurat bencana banjir

<b>Jenis ancaman</b> : Banjir		
<b>Desa/Kec</b> : Pakansari, Cibinong		
<b>Kabupaten</b> : Bogor		
<b>Provinsi</b> : Jawa Barat		
Tanggungjawab : Dewabrata (08128400xxx)		
Koordinator Umum : Dewi Sri (082127744xxx)		
<b>Bidang Operasi</b>	<b>Koordinator</b>	<b>Anggota</b>
Sekretariat	Maksum (085925148xxx)	Adi Suyono (081316428xxx), Ade Rustandi, Syahrofi Warsito (081382281xxx), Suryana Hadi (08128827xxx)
Peringatan Dini	Eko Waluyo R 087775033xxx	Yayang, Budi, Deden, Saimin, Sugeng
Evakuasi	Idris RH 087770941xxx	Adyansyah 089638280839, Firdaus Arif S 081398052xxx, Undang Darma 08787040xxx, Imam Turmudi 085211931xxx, Asep Sopiyan 081814980xxx
SAR (Pencarian dan Pertolongan)	Tidak ada	Tidak ada
Layanan Kesehatan	Bidan Yeti 081318326xxx	Jomanssen, Bidan Sukami, Dahlia
Barak Pengungsian	Tanu	Wahyudin 087872142xxx, Syaipudin, Suharto, Atim, H.Natsir

<b>Jenis ancaman : Banjir</b>		
<b>Desa/Kec : Pakansari, Cibinong</b>		
<b>Kabupaten : Bogor</b>		
<b>Provinsi : Jawa Barat</b>		
Dapur Umum	Ibu Atikah 081384550xxx	Ibu Nani 085714823xxx, Ibu Halimah 081218272xxx, Ibu Yayah 085780444xxx, Arpah, Nahrudin muhamad
Bantuan non Pangan	Riyadi	Adyansyah 089638280839, Firdaus Arif S 081398052xxx, Undang Darma 08787040xxx, Imam Turmudi 085211931xxx, Asep Sopiyan 081814980xxx
Air dan Sanitasi	Jumadi 087872151xxx	M.Yusuf, Pujianto 085714823xxx, Ramlan, Iskandar
Pendidikan	Budiningsih 081399713xxx	Ibu Nita 087874513xxx, Ibu Rus 08571643xxx, Ibu Yanti 087870186xxx, Ibu Marsih 081384482xxx, Ibu Nurhayati 087770375xxx
Keamanan	Suharman 085524xxx	Seluruh anggota Hansip Kel Pakansari dibackup Satpol PP, TNI dan Polri
Pengkajian kerusakan dan kerugian	Eko Waluyo R 087775033xxx	Yayang, Budi, Deden, Saimin, Sugeng

Tabel 2.13. Contoh struktur komando penanganan darurat bencana tsunami

<b>Jenis Ancaman : Tsunami</b>		
<b>Desa/Kelurahan : Prigi</b>		
<b>Kecamatan : Watulimo</b>		
<b>Kabupaten/Kota : Trenggalek</b>		
<b>Provinsi : Jawa Timur</b>		
Tanggungjawab : Prakarsa Utama (081236846xxx)		
Koordinator Umum: Kuncup Mekar (08124588xxx)		
<b>Bidang Operasi</b>	<b>Koordinator</b>	<b>Anggota</b>
Sekretariat	Sutrisno 08128827xxx	Adi, Wanedi, Shobirin, Sholikin
Peringatan Dini	Sugeng Riyadi 081814980xxx	Riko, Budi, Dea, Taufan
Evakuasi	Abu Sofyan 087770941xxx	Tamsyir,
SAR (Pencarian dan Pertolongan)	Magtoun 087874513xxx	Nanda, Wiratama, Wiyono
Layanan Kesehatan	Dr. Tri Rahmadi 08571643xxx	Dokter dan Bidan Pustu
Barak Pengungsian	Junanto	Wahyudin, Syaipudin, Suharto, Atim,
Dapur Umum	Heniwati 081384550xxx	Silvia, Aulia, Dewi, Anggun
Bantuan non Pangan	Wirasman 081382281xxx	Agung, yudha, Dwi, Yudistira
Air dan Sanitasi	Jainuri 087751411xxx	Pandu, Satriawan, Ramadana, Siddiq
Pendidikan	Rahayu 0813596327xxx	Zhafina, Amalia, Kartika, Suherman
Keamanan	Gustafo 0875129563xxx	Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Karangtaruna
Pengkajian kerusakan dan kerugian	Hartono 087542694xxx	Wakil RT/RW

Tabel 2.14. Contoh struktur komando penanganan darurat bencana awan panas

<b>Jenis ancaman : Awan Panas G. Merapi</b> <b>Desa/Kelurahan : Purwobinangun</b> <b>Kecamatan : Pakem</b> <b>Kabupaten/Kota : Sleman</b> <b>Provinsi : DIY</b>		
Penanggungjawab/Komandan : Heri Suasana (Kepala Kalurahan Purwobinangun) Koordinator Umum/Wakil komandan : Bapak Nurhadi Kasipem/Jogo Boyo		
Bidang Operasi	Koordinator	Anggota
1. Sekretariat	Meru	1. Andrian 2. Yulianto 3. Wawan
2. Peringatan Dini	Dwi Hartanto	1. Suyadi 2. Tuwuh 3. Joko 4. Musdiyantoro
3. Evakuasi dan Transportasi	Indra Baskoro Adi	1. Widodo 2. Kasiman 3. Prapto Hartono
4. SAR (Pencarian dan Pertolongan)	Gimin Giri Nurcahyo	1. Hartono 2. Kasiran 3. Tohari
5. Kesehatan Umum dan Penanganan Covid 19	Felisiana	1. Tukirah 2. Jumirah 3. Sariyem
6. Barak Pengungsian	Eko Tri	1. Mesiyam 2. Jatmiko 3. Sujari
7. Dapur Umum	Dwi Samto	1. Adi Nurcahyo 2. Yoga utama 3. Sulyanto

Setelah terbentuk bidang operasi, proses lokakarya dapat dilanjutkan dengan menyusun struktur komando penanganan darurat bencana (SKPDB). Struktur ini akan menggambarkan secara jelas hirarki, rantai komando dan rantai koordinasi antar bidang operasi, pengambilan keputusan dan alur pertanggungjawaban.



Gambar 2.1. Contoh rantai alur struktur komando penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi

## B.4. PRAKTEK PERENCANAAN BIDANG OPERASI

---

Perencanaan bidang operasi meliputi;

1. Rencana kegiatan berdasarkan situasi dan sasaran
2. Proyeksi atau perkiraan kebutuhan sumberdaya baik personel, alat dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan

Lembar kerja 6. Perencanaan bidang operasi Sekretariat

<b>Jenis ancaman</b> : .....	
<b>Bidang operasi</b> : Sekretariat	
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....	
<b>Kecamatan</b> : .....	
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....	
<b>Provinsi</b> : .....	
Situasi	
Sasaran	
Kegiatan	

Lembar kerja 7. Proyeksi kebutuhan bidang operasi Sekretariat

<b>Jenis ancaman</b> : .....						
<b>Bidang operasi</b> : Sekretariat						
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....						
<b>Kecamatan</b> : .....						
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....						
<b>Provinsi</b> : .....						
No	JenisKebutuhan	Vol	Satuan	Tersedia	Kekurangan	Ket
1						
2						
3						
dst						

Lembar kerja 8. Perencanaan bidang operasi Peringatan Dini

<b>Jenis ancaman</b> : .....	
<b>Bidang operasi</b> : Peringatan Dini	
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....	
<b>Kecamatan</b> : .....	
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....	
<b>Provinsi</b> : .....	
Situasi	
Sasaran	
Kegiatan	

Lembar kerja 9. Proyeksi kebutuhan bidang operasi Peringatan Dini

<b>Jenis ancaman</b> : .....						
<b>Bidang operasi</b> : Peringatan Dini						
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....						
<b>Kecamatan</b> : .....						
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....						
<b>Provinsi</b> : .....						
No	JenisKebutuhan	Vol	Satuan	Tersedia	Kekurangan	Ket
1.						
2.						
3.						
dst						

Lembar kerja 10. Perencanaan bidang operasi Evakuasi

<b>Jenis ancaman</b> : .....	
<b>Bidang operasi</b> : Evakuasi	
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....	
<b>Kecamatan</b> : .....	
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....	
<b>Provinsi</b> : .....	
Situasi	
Sasaran	
Kegiatan	

Lembar kerja 11. Proyeksi kebutuhan bidang operasi Evakuasi

<b>Jenis ancaman</b> : ..... <b>Bidang operasi</b> : Evakuasi <b>Desa/Kelurahan</b> : ..... <b>Kecamatan</b> : ..... <b>Kabupaten/Kota</b> : ..... <b>Provinsi</b> : .....						
No	JenisKebutuhan	Vol	Satuan	Tersedia	Kekurangan	Ket
1						
2						
3						
dst						

Lembar kerja 12. Perencanaan bidang operasi SAR (Pencarian dan Pertolongan)

<b>Jenis ancaman</b> : ..... <b>Bidang operasi</b> : SAR (Pencarian dan Pertolongan) <b>Desa/Kelurahan</b> : ..... <b>Kecamatan</b> : ..... <b>Kabupaten/Kota</b> : ..... <b>Provinsi</b> : .....	
Situasi	
Sasaran	
Kegiatan	

Lembar kerja 13. Proyeksi kebutuhan bidang operasi SAR (Pencarian dan Pertolongan)

<b>Jenis ancaman</b> : ..... <b>Bidang operasi</b> : SAR (Pencarian dan Pertolongan) <b>Desa/Kelurahan</b> : ..... <b>Kecamatan</b> : ..... <b>Kabupaten/Kota</b> : ..... <b>Provinsi</b> : .....						
No	JenisKebutuhan	Vol	Satuan	Tersedia	Kekurangan	Ket
1						
2						
3						
dst						



Lembar kerja 14. Perencanaan bidang operasi Layanan Kesehatan

<b>Jenis ancaman</b> : .....	
<b>Bidang operasi</b> : Layanan Kesehatan	
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....	
<b>Kecamatan</b> : .....	
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....	
<b>Provinsi</b> : .....	
Situasi	
Sasaran	
Kegiatan	

Lembar kerja 15. Proyeksi kebutuhan bidang operasi Layanan Kesehatan

<b>Jenis ancaman</b> : .....						
<b>Bidang operasi</b> : Layanan Kesehatan						
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....						
<b>Kecamatan</b> : .....						
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....						
<b>Provinsi</b> : .....						
No	Jenis Kebutuhan	Vol	Satuan	Tersedia	Kekurangan	Ket
1						
2						
3						
dst						

Lembar kerja 16. Perencanaan bidang operasi Barak Pengungsian

<b>Jenis ancaman</b> : .....	
<b>Bidang operasi</b> : Barak Pengungsian	
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....	
<b>Kecamatan</b> : .....	
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....	
<b>Provinsi</b> : .....	
Situasi	
Sasaran	
Kegiatan	

Lembar kerja 17. Proyeksi kebutuhan bidang operasi Barak Pengungsian

<b>Jenis ancaman</b> : .....						
<b>Bidang operasi</b> : Barak Pengungsian						
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....						
<b>Kecamatan</b> : .....						
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....						
<b>Provinsi</b> : .....						
No	JenisKebutuhan	Vol	Satuan	Tersedia	Kekurangan	Ket
1						
2						
3						
dst						

Lembar kerja 18. Perencanaan bidang operasi Dapur Umum

<b>Jenis ancaman</b> : .....	
<b>Bidang operasi</b> : Dapur Umum	
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....	
<b>Kecamatan</b> : .....	
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....	
<b>Provinsi</b> : .....	
Situasi	
Sasaran	
Kegiatan	

Lembar kerja 19. Proyeksi kebutuhan bidang operasi Dapur Umum

<b>Jenis ancaman</b> : .....						
<b>Bidang operasi</b> : Dapur Umum						
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....						
<b>Kecamatan</b> : .....						
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....						
<b>Provinsi</b> : .....						
No	JenisKebutuhan	Vol	Satuan	Tersedia	Kekurangan	Ket
1						
2						
dst						

Lembar kerja 20. Perencanaan bidang operasi Bantuan non Pangan

<b>Jenis ancaman</b> : .....	
<b>Bidang operasi</b> : Bantuan non Pangan	
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....	
<b>Kecamatan</b> : .....	
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....	
<b>Provinsi</b> : .....	
Situasi	
Sasaran	
Kegiatan	

Lembar kerja 21. Proyeksi kebutuhan bidang operasi Bantuan non Pangan

<b>Jenis ancaman</b> : ..... <b>Bidang operasi</b> : Bantuan non Pangan <b>Desa/Kelurahan</b> : ..... <b>Kecamatan</b> : ..... <b>Kabupaten/Kota</b> : ..... <b>Provinsi</b> : .....						
No	JenisKebutuhan	Vol	Satuan	Tersedia	Kekurangan	Ket
1						
2						
3						
dst						

Lembar kerja 22. Perencanaan bidang operasi Air dan Sanitasi

<b>Jenis ancaman</b> : Air dan Sanitasi <b>Bidang operasi</b> : ..... <b>Desa/Kelurahan</b> : ..... <b>Kecamatan</b> : ..... <b>Kabupaten/Kota</b> : ..... <b>Provinsi</b> : .....	
Situasi	
Sasaran	
Kegiatan	

Lembar kerja 23. Proyeksi kebutuhan bidang operasi Air dan Sanitasi

<b>Jenis ancaman</b> : Air dan Sanitasi <b>Bidang operasi</b> : ..... <b>Desa/Kelurahan</b> : ..... <b>Kecamatan</b> : ..... <b>Kabupaten/Kota</b> : ..... <b>Provinsi</b> : .....						
No	JenisKebutuhan	Vol	Satuan	Tersedia	Kekurangan	Ket
1						
2						
3						
dst						

Lembar kerja 24. Perencanaan bidang operasi Pendidikan

<b>Jenis ancaman</b> : .....	
<b>Bidang operasi</b> : Pendidikan	
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....	
<b>Kecamatan</b> : .....	
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....	
<b>Provinsi</b> : .....	
Situasi	
Sasaran	
Kegiatan	

Lembar kerja 25. Proyeksi kebutuhan bidang operasi Pendidikan

<b>Jenis ancaman</b> : .....						
<b>Bidang operasi</b> : Pendidikan						
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....						
<b>Kecamatan</b> : .....						
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....						
<b>Provinsi</b> : .....						
No	JenisKebutuhan	Vol	Satuan	Tersedia	Kekurangan	Ket
1						
2						
3						
dst						

Lembar kerja 26. Perencanaan bidang operasi Keamanan

<b>Jenis ancaman</b> : .....	
<b>Bidang operasi</b> : Keamanan	
<b>Desa/Kelurahan</b> : .....	
<b>Kecamatan</b> : .....	
<b>Kabupaten/Kota</b> : .....	
<b>Provinsi</b> : .....	
Situasi	
Sasaran	
Kegiatan	

Lembar kerja 27. Proyeksi kebutuhan bidang operasi Keamanan

<b>Jenis ancaman</b> : ..... <b>Bidang operasi</b> : Keamanan <b>Desa/Kelurahan</b> : ..... <b>Kecamatan</b> : ..... <b>Kabupaten/Kota</b> : ..... <b>Provinsi</b> : .....						
No	JenisKebutuhan	Vol	Satuan	Tersedia	Kekurangan	Ket
1						
2						
3						
dst						

Lembar kerja 28. Perencanaan bidang operasi Pengkajian kerusakan dan kerugian

<b>Jenis ancaman</b> : ..... <b>Bidang operasi</b> : Pengkajian kerusakan dan kerugian <b>Desa/Kelurahan</b> : ..... <b>Kecamatan</b> : ..... <b>Kabupaten/Kota</b> : ..... <b>Provinsi</b> : .....	
Situasi	
Sasaran	
Kegiatan	

Lembar kerja 29. Proyeksi kebutuhan bidang operasi Pengkajian kerusakan dan kerugian

<b>Jenis ancaman</b> : ..... <b>Bidang operasi</b> : Pengkajian kerusakan dan kerugian <b>Desa/Kelurahan</b> : ..... <b>Kecamatan</b> : ..... <b>Kabupaten/Kota</b> : ..... <b>Provinsi</b> : .....						
No	JenisKebutuhan	Vol	Satuan	Tersedia	Kekurangan	Ket
1						
2						
3						
4						
dst						

## Daftar Pustaka

Paripurno, ET & Purwanto, S (Ed.), 2010, Panduan Fasilitator Wajib Latih Penanggulangan Bencana Gunungapi, PSMB UPN 'Veteran' Yogyakarta  
SNI 8751: 2019, Perencanaan kontinjensi

# Latihan Penanganan Darurat Bencana

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



# Latihan Penanganan Darurat Bencana

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



**Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana**



# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputian Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

## **Latihan Penanganan Darurat Bencana**

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

### **PENGARAH**

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB  
Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

### **PENANGGUNGJAWAB**

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB  
Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

### **EDITOR**

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

### **PENYUSUN**

Sigit Purwanto	Pujiono Centre
Sumino	LPTP Surakarta
Wahyu Heniwati	Daya Annisa / MDMC
Anggoro Budi Prasetyo	Aksara
Wana Kristanto	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Indra Baskoro Adi	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Muhammad Nur Ronggo Dinoyo	LPTP Surakarta
Gandar Mahojwala	KAPPALA Indonesia
Pudji Santosa	Lingkar
Gigih Aditya Pratama	KAPPALA Indonesia
Yugyasmono	Lingkar
Hadi Sutrisno	BNPB
Nurul Maulidhini	BNPB

### **KONTRIBUTOR**

Arif Fadli	BNPB
Virana Fatwa Nurmala	BNPB
Denadia Mutty	BNPB
Rahma Sari Puspita	BNPB
Riski Yufawinda	BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

# Daftar Isi

<b>Pengantar</b> .....	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>4</b>
<b>A. Materi Pembelajaran</b> .....	<b>5</b>
A.1. Tingkat Pelatihan/Dasar .....	5
A.1.1. Seminar .....	5
A.1.2. Lokakarya .....	6
A.2. Tingkat Simulasi .....	6
A.2.1. Geladi Ruang ( <i>Table Top Exercise</i> ) .....	6
A.2.2. Permainan Peran .....	6
A.2.3. Uji Latihan ( <i>Drill</i> ) .....	7
A.3. Tingkat Uji Sistem .....	7
A.3.1. Geladi Posko ( <i>Command Post Exercise</i> ) .....	7
A.3.2. Geladi Lapangan ( <i>Field Training Exercise</i> ) .....	8
A.4. Tahapan Proses Pelatihan PDB .....	9
A.4.1. Rancangan Latihan PDB Tingkat Pelatihan .....	9
A.4.2. Rancangan Latihan PDB Tingkat Simulasi .....	9
A.4.3. Rancangan Latihan PDB Tingkat Uji Sistem .....	9
<b>B. Praktik Pembelajaran</b> .....	<b>11</b>
B.1. Tingkat Latihan .....	11
B.2. Tingkat Simulasi .....	11
B.3. Tingkat Uji Sistem .....	12
<b>Daftar Referensi</b> .....	<b>13</b>

## A. Materi Pembelajaran

Latihan Penanganan Darurat Bencana (PDB) merupakan suatu proses terencana dan sistematis, pada fase kesiapsiagaan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan koordinasi-komunikasi antar instansi/lembaga dalam sebuah sistem penanganan darurat terpadu. Pelaksanaan latihan PDB diartikan sebagai bentuk latihan koordinasi, komunikasi dan evakuasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Latihan PDB terdiri dari 3 (tiga) tingkatan dengan masing-masing metodenya sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini;



Gambar 1. Tingkatan dan metode latihan PDB

Latihan PDB diawali dari tingkat yang paling dasar yakni seminar dan lokakarya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang ancaman. Sebelum melakukan latihan PDB, para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana telah menyusun dan menyepakati ancaman, peringatan dini, rencana evakuasi, bahkan jika memungkinkan telah tersusun rencana kontingensi. Karena dalam latihan PDB yang di praktekkan adalah sistem peringatan dini, rencana evakuasi, dan rencana kontingensi.

### A.1. TINGKAT PELATIHAN/DASAR

Pada tingkatan ini sering disebut pelatihan tingkat dasar sebab dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap sumber dan ancaman bencana. Ada 2 (dua) tingkatan pada pelatihan dasar ini;

#### A.1.1. Seminar

Seminar merupakan tinjauan akademik dan teknokratik untuk memberikan arahan tentang kewenangan, strategi, rencana, kebijakan, prosedur, sistem, sumberdaya, dan/atau

konsep/ide tertentu untuk menyusun atau mengembangkan sistem kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat bencana. Seminar menggunakan cara paparan atau panel oleh para ahli dan pejabat berwenang. Audiens dapat bertanya dengan pengaturan oleh moderator.

### **A.1.2. Lokakarya**

Lokakarya merupakan tahapan kedua dari rangkaian penyelenggaraan latihan. Arahan-arahan akademik dan teknokratik hasil seminar dibahas lebih terperinci dan operasional dalam lokakarya. Tujuan utama lokakarya adalah membangun kesepakatan-kesepakatan teknis pelaksanaan, strategi, rencana, kebijakan, prosedur, sistem, sumberdaya. Lokakarya juga melibatkan para pihak lebih luas dan masyarakat. Interaksi antar audiens lebih intensif dalam format diskusi kelompok kecil membahas hal-hal spesifik dan diskusi pleno.

## **A.2. TINGKAT SIMULASI**

---

Pada tingkat ini sering disebut pelatihan tingkat menengah yang dilakukan bilamana peserta telah memiliki pengetahuan dasar. Pelatihan pada tingkat ini dirancang guna meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan peserta. Kegiatan ini sesuai dengan skenario pelatihan, atau bahkan sesuai sistem peringatan dini, rencana evakuasi dan rencana kontijensi yang telah disusun. Peserta menggunakan berbagai macam peragaan termasuk cara informasi peringatan bencana dikeluarkan dan diterima oleh petugas yang berwenang dan diteruskan kepada pimpinan pelatihan dan staf serta respon terhadap informasi tersebut. Metoda pelatihan pada tingkat ini meliputi;

### **A.2.1. Geladi Ruang (*Table Top Exercise*)**

Geladi Ruang (*Table-Top Exercise/TTX*) adalah suatu latihan dalam bentuk diskusi pada level pengambil keputusan dari tiap-tiap instansi yang berfungsi membahas kasus atau permasalahan dalam operasi penanganan bencana berdasarkan Skenario Latihan guna meningkatkan pemahaman tentang SOP, buku petunjuk, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing.

### **A.2.2. Permainan Peran**

Permainan peran adalah suatu bentuk latihan yang menggunakan metode simulasi dengan menggunakan alat-alat bantu peraga seperti maket, bak pasir, miniatur, peta berukuran besar, ataupun slide paparan berdasarkan suatu Skenario Latihan. Penggunaan alat-alat bantu peraga tersebut adalah untuk menggambarkan dan memvisualisasikan keadaan Daerah Latihan kepada para Pelaku Latihan. Metode latihan ini dapat berupa: Geladi Peta, Geladi Model, dan Latihan Simulasi sebagai sarana untuk Pra Latihan sesungguhnya. Latihan ini mensimulasikan pergerakan masing-masing instansi berdasarkan suatu Skenario Latihan. Adanya alat bantu peraga akan memperlihatkan visualisasi gerakan dan koordinasi antar pelaku sehingga dapat menghasilkan suatu rencana gerak/rencana aksi dari masing-masing pelaku dalam merespon permasalahan yang dihadapi.

### **A.2.3. Uji Latihan (*Drill*)**

Merupakan suatu metode latihan yang melibatkan aset dan personel sesungguhnya dalam suatu rangkaian Skenario Latihan sederhana. Pada pelaksanaannya sudah menggunakan alat bantu komunikasi untuk jalur komunikasi antar pelaku dan pengendali-pelaku. Sifat latihan dilakukan dengan satu pihak dikendalikan, pengendali mengarahkan tindakan pelaku agar bertindak sesuai Skenario Latihan. Situasi darurat kebencanaan disiapkan oleh penyelenggara latihan ataupun diperankan oleh Penimbul Situasi (*Bulsi/Roleplayer*) yang dikendalikan oleh Tim Pengendali.

Uji latihan bertujuan untuk melatih/mempertahankan kemampuan, mencoba perlengkapan baru, menguji SOP baru seluruh personel dalam melaksanakan tugas per bidang masing-masing dihadapkan dengan kerjasama dengan instansi lainnya dalam suatu rangkaian Skenario Latihan Sederhana.

## **A.3. TINGKAT UJI SISTEM**

---

Tingkat ini sering disebut pelatihan tingkat lanjut dimana mekanisme dan metode pelatihan mencapai tahapan yang paling rumit. Pelatihan dimulai dengan kegiatan pra pelatihan dengan melibatkan unsur penyelenggara pelatihan, pelaku pelatihan, tim evakuasi, pengamat dan pengawas pelatihan. Pada tingkat ini dimaksudkan untuk menguji kesiapan dan keterampilan peserta dalam menerapkan standar prosedur penanggulangan bencana, menguji sistem informasi dan garis perintah serta menguji sistem peringatan bencana beserta alur informasi yang diperlukan. Ada 2 (dua) metode dalam pelatihan ini;

### **A.3.1. Geladi Posko (*Command Post Exercise*)**

Geladi Posko merupakan suatu kegiatan latihan yang melibatkan satu atau multi-pihak atau lembaga/instansi untuk menguji kapasitas dan berbagai fungsi yang dimiliki oleh lembaga/instansi yang terlibat berdasarkan suatu Skenario Latihan. Pelaku Geladi Posko adalah personil atau individu yang berasal dari level manajerial dari satu atau beberapa instansi/lembaga terkait. Metode ini mensimulasikan kegiatan operasi tanggap darurat yang sebenarnya dengan memberikan berbagai permasalahan yang rumit tetapi realistis dan membutuhkan tanggapan/aksi yang cepat dan efektif dari para pelakunya sehingga diperlukan konsentrasi penuh dari semua pihak yang terlibat dan pengendalian waktu yang baik. Pada pelaksanaannya, pelaku diberikan serangkaian keadaan dan kejadian yang sambung menyambung, mengandung keputusan, rencana, perintah, dan tindakan dari Pelaku dalam PDB. Situasi dikembangkan melalui para Pengendali yang meneruskan semua persoalan secara bagian dalam hubungan Komando ke atas, bawah, dan samping guna mensimulasikan kejadian sesungguhnya. Pengendali Atas, Pengendali Samping, dan Pengendali Bawah akan memberikan kasus kepada para pelaku berdasarkan Skenario Latihan. Selama pelatihan berlangsung, Posko, tetap berada di tempat dan bekerja dengan alat komunikasi tiruan atau yang disiapkan.

Metode geladi posko memiliki karakteristik pergerakan personil dan perlengkapan/peralatannya hanya sebatas simulasi; diperlukan perhatian atau konsentrasi

yang tinggi dari pihak-pihak yang terlibat; pelaku memberikan tanggapan/aksi dengan cepat dan efektif untuk semua permasalahan yang diberikan; dan terdapat pembatasan waktu untuk setiap kasus atau penyelesaian masalah yang diberikan

### **A.3.2. Gladi Lapangan (*Field Training Exercise*)**

Gladi Lapangan merupakan metode latihan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaku dengan mempergunakan gerakan yang telah dipelajari sebelumnya untuk menyempurnakan dan menguji pengetahuan dan keterampilan operasional dan fungsional institusi dalam situasi yang menggambarkan realism kedaruratan dampak bencana di Daerah Latihan sesungguhnya. Secara idealnya, gladi Lapangan bertujuan untuk mengevaluasi berbagai fungsi rencana kontijensi, rencana operasi, maupun PDB. Metode ini merupakan metode latihan yang paling kompleks karena melibatkan berbagai sektor, kewilayahan, dan multi-institusi. Gladi lapangan sebagai metode latihan yang bertujuan untuk: 1) Mensimulasikan kondisi latihan sesuai kondisi kejadian sesungguhnya guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perorangan/unit di Lapangan; 2) Menguji kemampuan unit yang dilaksanakan di medan yang mendekati keadaan sebenarnya dan situasi yang menggambarkan realisme kejadian bencana.

Gladi Lapangan berbeda dengan Drill karena dalam gladi Lapangan terjadi penggabungan beberapa kegiatan dari berbagai sektor untuk menguji fungsi kedaruratan dengan mendayagunakan Sistem Komando Penanganan Tanggap Darurat. Realisme latihan diperoleh dari: Kegiatan di TKP dan pengambilan keputusan; Penimbul Situasi (Bulsi); Kebutuhan SAR; Peralatan Komunikasi; Gelar perlengkapan; Alokasi personil dan sumber daya sesungguhnya.

## **A.4. TAHAPAN PROSES PELATIHAN PDB**

---

### **A.4.1. Rancangan Latihan PDB Tingkat Pelatihan**

Latihan PDB tingkat pelatihan terdiri dari 2 metode latihan; 1) seminar dan 2) lokakarya. Masing-masing metode latihan memiliki tujuan, keluaran dan penatalaksanaan spesifik.

#### **A.4.2.a. Seminar**

Pelatihan tahap awal berupa seminar untuk melakukan tinjauan-tinjauan akademik dan pakar/ahli terhadap rencana penanganan darurat meliputi; skenario ancaman, landasan formal, kebijakan dan strategi, perencanaan bidang operasi dan ide/gagasan pengembangan model penanganan darurat. Sebagai gambaran pada tabel di bawah ini diuraikan penatalaksanaan seminar.

#### **A.4.1.b. Lokakarya**

Lokakarya berformat non formal dan memungkinkan interaksi antar pelaku serta merupakan bagian tindak lanjut dari seminar. Gambaran penatalaksanaan lokakarya dijelaskan pada tabel di bawah ini.

### **A.4.2. Rancangan Latihan PDB Tingkat Simulasi**

Latihan tingkat simulasi terdiri dari 3 metode latihan; 1) geladi ruang (*Table Top Exercise*), 2) permainan dan 3) drill / Uji latihan. Masing-masing metode latihan memiliki tujuan, keluaran dan penatalaksanaan spesifik.

#### **A.4.2.a. Geladi Ruang (*Table Top Exercise*)**

Geladi ruang adalah suatu latihan dalam bentuk interaksi dialogis antar unsur pelaksana penanganan darurat bencana. Interaksi dialogis difokuskan pada potensi-potensi permasalahan dalam operasi penanganan darurat bencana berdasarkan skenario.

#### **A.4.2.b. Permainan**

Suatu bentuk latihan yang menggunakan metode simulasi dengan menggunakan alat-alat bantu peraga seperti maket atau peta berukuran besar. Latihan ini mensimulasikan pergerakan masing-masing instansi berdasarkan suatu skenario. Alat bantu peraga akan memvisualisasi gerakan dan koordinasi antar unsur pelaku penanganan darurat bencana.

#### **A.4.2.c. Uji Latihan (*Drill*)**

Suatu metode latihan melibatkan personel dan peralatan sesungguhnya dalam suatu rangkaian skenario. Dapat dilaksanakan di kawasan rawan bencana daerah simulasi/daerah latihan. Latihan ini sudah menggunakan alat bantu komunikasi sebagai jalur komunikasi baik antar unsur pelaku maupun antara pengendali dan pelaku di lapangan.

### **A.4.3. Rancangan Latihan PDB Tingkat Uji Sistem**

Latihan PDB tingkat uji sistem terdiri dari 2 metode; 1) geladi posko (*Command Post Exercise*) dan 2) geladi lapangan (*Field Training Exercise*). Masing-masing metode latihan memiliki tujuan, keluaran dan penatalaksanaan spesifik.



#### A.4.3.a. Geladi Posko (*Command Post Exercise*)

Metode latihan ini diselenggarakan di dalam ruangan dan mensimulasikan operasi tanggap darurat sebenarnya. Berbagai permasalahan rumit diberikan pada para pelaku dan kemudian dinilai bentuk tanggapan/aksi efektif dari para pelaku sesuai bidang masing-masing.

#### A.4.3.b. Geladi Lapangan (*Field Training Exercise*).

Merupakan metode latihan mengerahkan seluruh unsur pelaku, peralatan dan masyarakat penyintas. Dilaksanakan di kawasan rawan bencana sesungguhnya dengan menggunakan skenario sedekat mungkin dengan kenyataan. Metode latihan ini memperagakan tindakan/penanganan sesuai prosedur setiap bidang operasi.

## B. Praktik Pembelajaran

Setelah mengikuti penjelasan peserta diminta membentuk/kembali ke kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok dengan lembar kerja di bawah ini :

### B.1. TINGKAT LATIHAN

---

Lembar Kerja 1. Tugas kelompok analisis tingkat latihan dasar

Aspek	Seminar	Lokakarya
Format		
Metode		
Pemateri		
Peserta		
Tujuan		
Keluaran		
Kelengkapan acara		

### B.2. TINGKAT SIMULASI

---

Lembar Kerja 2. Tugas kelompok analisis tingkat menengah

Aspek	Geladi Ruang	Permainan	Drill
Format			
Metode			
Peserta			
Tujuan			
Keluaran			
Kelengkapan acara			

### B.3. TINGKAT UJI SISTEM

---

#### Lembar Kerja 3. Tugas kelompok analisis tingkat lanjut

<b>Aspek</b>	<b>Geladi Posko</b>	<b>Geladi lapang</b>
Format		
Metode		
Pemateri		
Peserta		
Tujuan		
Keluaran		
Kelengkapan acara		

# Daftar Referensi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2017, Panduan Teknis Fasilitator Destana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2017, Membangun Kesadaran, Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018, Modul 7 Pelatihan Penanganan Darurat Bencana

Department of Police, Fire and Emergency Management, 2015, Managing Exercises; A Handbook For Tasmanian Government Agencies,

GITEWS, 2008, Pedoman Pelaksanaan Gladi Tsunami Bantul

Standar Nasional Indonesia Nomor 8288:2017 tentang Manajemen Pelatihan Penanggulangan Bencana

# Advokasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



# **Advokasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan**

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

**2021**



**Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputian Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

## **Advokasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan**

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

### **PENGARAH**

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB

Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

### **PENANGGUNGJAWAB**

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB

Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

### **EDITOR**

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta

### **PENYUSUN**

Sigit Purwanto

Pujiono Centre

Sumino

LPTP Surakarta

Wahyu Heniwati

Daya Annisa / MDMC

Anggoro Budi Prasetyo

Aksara

Wana Kristanto

PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta

Indra Baskoro Adi

PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta

Muhammad Nur Ronggo Dinoyo

LPTP Surakarta

Gandar Mahojwala

KAPPALA Indonesia

Pudji Santosa

Lingkar

Gigih Aditya Pratama

KAPPALA Indonesia

Yugyasmono

Lingkar

Hadi Sutrisno

BNPB

Nurul Maulidhini

BNPB

### **KONTRIBUTOR**

Arif Fadli

BNPB

Virana Fatwa Nurmala

BNPB

Denadia Mutty

BNPB

Rahma Sari Puspita

BNPB

Riski Yufawinda

BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan

Kedeputian Bidang Pencegahan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021



# Daftar Isi

<b>Pengantar</b> .....	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>4</b>
<b>A. Materi Pembelajaran</b> .....	<b>5</b>
A.1. Pengertian Advokasi.....	5
A.2. Jenis Advokasi.....	5
A.3. Langkah Advokasi .....	6
A.3.1. Menentukan Isu .....	6
A.3.2. Menentukan Target yang Akan Dicapai .....	6
A.3.3. Mengumpulkan Informasi.....	6
A.3.4. Menentukan Konstituen .....	6
A.3.5. Melakukan Analisis Potensi dan Ancaman .....	6
A.3.6. Kerjasama dan Gotong Royong dengan Pihak Lain .....	7
A.3.7. Teknik Advokasi.....	7
A.4. Menjamin Keberlanjutan Advokasi .....	8
A.5. Menjamin Kesiambungan Advokasi .....	8
A.6. Pihak Pentahelix PB Pendukung Advokasi Kebencanaan .....	8
A.7. Rekomendasi Hasil Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan Sebagai Target Advokasi .....	10
A.8. Advokasi Rekomendasi Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan .....	10
A.8.1. Desa.....	10
A.8.2. Kelurahan.....	15
<b>B. Praktik Pembelajaran</b> .....	<b>16</b>
B.1. Pemetaan Aktor.....	16
B.2. Strategi Advokasi.....	16
B.3. Bahan Advokasi.....	17
B.4. Penyesuaian RPB .....	18
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>24</b>
<b>Lampiran</b> .....	<b>25</b>
Lampiran 1 Strategi Integrasi Indikator PKD dalam Rencana Pembangunan Desa: Persandingan Indikator PKD dengan Bidang/Kegiatan sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 .....	25
Lampiran 2 Strategi Integrasi Indikator PKD dalam Rencana Pembangunan Kelurahan: Persandingan Indikator PKD dengan Bidang/Kegiatan sesuai Permendagri 130 Tahun 2018 .....	34

## A. Materi Pembelajaran

### A.1. Pengertian Advokasi

---

Advokasi adalah suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kondisi kebijakan sesuai dengan kehendak pihak yang mengadvokasi. Hal ini dilakukan dengan cara mempengaruhi para penentu kebijakan. Advokasi yang baik adalah yang secara sengaja dan sistematis memang dirancang untuk mendesak adanya dan terjadinya perubahan.

Dengan demikian advokasi kebijakan dimaknai sebagai:

1. Proses yang terencana dan sistematis
2. Bertujuan memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan
3. Kebijakan publik sebagai sasaran advokasi. Dalam pengertian ini, tercakup pula pembuatan suatu kebijakan publik bagi kepentingan bersama yang sebelumnya tidak ada.
4. Kehendak, merupakan aspirasi atau materi yang didesak, atau alternatif yang didesak untuk menggantikan kebijakan lama atau ditetapkan sebagai kebijakan baru
5. Pihak yang melakukan advokasi (mendesak kepentingan) yaitu para warga dan jejaringnya.
6. Pihak yang diadvokasi (didesak untuk melakukan perubahan atau menetapkan kebijakan), yaitu para penentu kebijakan. Penentu kebijakan itu bisa DPR, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala desa, ketua RW, ketua RT, dll.

### A.2. Jenis Advokasi

---

1. Advokasi Litigasi, merupakan advokasi yang dilakukan melalui jalur hukum ke pengadilan.
2. Advokasi non-litigasi, yaitu advokasi yang sifatnya lebih politis, antara lain advokasi kebijakan, kampanye media dan mobilisasi massa. Penggunaan media sosial yang sekarang marak, merupakan salah satu advokasi non-litigasi.

Modul ini lebih terfokus pada pembahasan advokasi non-litigasi dalam mendorong terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana penanggulangan bencana.

### **A.3. Langkah Advokasi**

---

#### **A.3.1. Menentukan Isu**

Isu adalah suatu kondisi sosial yang menjadi permasalahan nyata yang ada di sekeliling kita. Semakin dekat isu yang dipilih dengan kondisi masyarakat, maka akan semakin baik untuk diperjuangkan. Modul ini lebih terfokus pada isu penanggulangan bencana.

#### **A.3.2. Menentukan Target yang Akan Dicapai**

Dalam advokasi, terdapat lima prinsip yang digunakan sebagai penetapan target, yaitu: 1) spesifik, berarti target yang ingin dicapai harus spesifik dan jelas; 2) terukur, berarti target yang ingin dicapai harus dapat diukur keberhasilannya; 3) tercapai, berarti target yang ingin dicapai benar-benar dapat diwujudkan; 4) rasional, berarti target yang ingin dicapai wajar dan mungkin untuk diwujudkan; 5) waktu, berarti menentukan target waktu dalam mencapai target tersebut.

#### **A.3.3. Mengumpulkan Informasi**

Advokasi yang baik harus ditunjang oleh informasi yang dapat dipercaya dan sesuai fakta. Informasi ini dapat diperoleh dengan melakukan proses pencarian data dan informasi, dapat dilakukan secara mandiri oleh warga atau bekerjasama dengan pihak lain, misalnya universitas dan akademisi. Keterlibatan pihak lain akan mampu menjelaskan informasi tentang fenomena/kejadian dan risiko bencana di suatu wilayah. Hal ini nantinya akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam proses lobi, hearing, kampanye, atau membuat sebuah kebijakan oleh pembuat kebijakan di suatu wilayah.

#### **A.3.4. Menentukan Konstituen**

Konstituen adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama, yang kita wakili dan orang-orang mendukung kita secara politik. Konstituen bisa beragam kelompok kepentingan yang jelas, misalnya: kelompok rawan bencana, kelompok perempuan, kelompok difabel.

#### **A.3.5. Melakukan Analisis Potensi dan Ancaman**

Dalam upaya mendesakkan maupun mengubah suatu kebijakan, maka akan banyak tantangan yang akan menghadang. Oleh karena itu kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, termasuk saat advokasi hal-hal apa saja yang mungkin menjadi peluang dan penghambat proses.

- a. Analisis sumber daya. Terdapat dua jenis sumber daya yang perlu dicermati, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia yang ideal memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) menguasai isu dan bahan-bahan yang akan di advokasikan;
  - 2) mampu berkomunikasi dengan baik;
  - 3) memiliki cukup jaringan atau pengaruh;
  - 4) memiliki kematangan emosi;
  - 5) ulet dan tak kenal putus asa.

- b. Analisis ancaman dan risiko. Isu yang kita pilih bisa jadi dianggap oleh pihak lain sebagai isu yang merugikan mereka, sehingga melakukan advokasi terkadang memiliki konsekuensi risiko. Perlu untuk menentukan ancaman dan risiko yang akan muncul dalam proses advokasi atau setelah advokasi berhasil.

#### **A.3.6. Kerjasama dan Gotong Royong dengan Pihak Lain**

Advokasi dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, semakin banyak orang, lembaga, dan jaringan yang terlibat, maka akan semakin kuat pula kekuatan advokasi sehingga semakin besar pula kemungkinan untuk didengar dan diperhatikan oleh pembuat kebijakan. Ada dua keuntungan yang bisa diperoleh dari koalisi:

- a. Meningkatkan sumberdaya, pengalaman, tingkat kepercayaan atas advokasi;
- b. Gerakan semakin besar menyebabkan tuntutan akan lebih didengar, sehingga kemungkinan sukses akan lebih besar.

#### **A.3.7. Teknik Advokasi**

Ada beberapa teknik advokasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Lobby merupakan sebuah kegiatan advokasi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan agar memberi dukungan terhadap sudut pandang kita. Langkah-langkah penting: (1) membangun hubungan yang baik dengan pengambil keputusan; (2) memprioritaskan capaian; (3) datang dengan memiliki tawaran pemecahan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian, dan mengapa keputusan ini penting untuk diambil; (4) menyiapkan kontak dan materi pertemuan dengan para pembuat kebijakan serta mempersiapkan argumen dan data-data pendukung.
- b. Hearing (dengar pendapat) dilakukan kepada pihak pengambil kebijakan dan publik. Hearing kepada pengambil kebijakan biasanya tercakup dalam kegiatan lobby. Kegiatan public hearing (dengar pendapat dengan masyarakat) bertujuan untuk mensosialisasikan gagasan kita dan mencari masukan atau menyerap pandangan masyarakat di seputar isu yang menjadi perhatian kita. Dalam praktiknya, public hearing dapat dilakukan melalui diskusi, debat terbuka, dan seminar.
- c. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan wacana, ide pandangan kita terhadap suatu kebijakan atau kasus tertentu agar mendapat dukungan publik melalui media-media lain seperti gambar, video, dan selebaran.
- d. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan wacana, ide pandangan kita terhadap suatu kebijakan atau kasus tertentu agar mendapat dukungan publik secara langsung. Kampanye umumnya menggunakan media cetak (koran, majalah, dll) maupun media elektronik (radio, televisi, dll). Kampanye dapat berbentuk dialog interaktif di radio atau TV, siaran pers, konferensi pers, suatu artikel, media sosial dan lainnya.
- e. Mobilisasi, merupakan teknik advokasi dengan menggunakan kekuatan massa/orang yang dapat dilakukan melalui berbagai variasi seperti parade, pawai budaya, dan unjuk rasa. Teknik ini dilakukan untuk menunjukkan sikap dan menggalang solidaritas untuk mendukung sikap terhadap isu advokasi yang diangkat..

- f. Pelaporan ke lembaga-lembaga pengawas pelayanan publik, teknik advokasi ini merupakan pilihan tindakan ketika ditemukan ketidakberesan dari suatu proses dalam pemerintahan, contohnya adalah maladministrasi. Lembaga yang dapat menerima pelaporan maladministrasi adalah Ombudsman Republik Indonesia, lembaga ini merupakan lembaga yang menerima pelaporan atas dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pada tingkat desa hingga pusat. Ombudsman menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan akan melakukan pemeriksaan serta menindaklanjuti dan menginvestigasi dugaan maladministrasi tersebut, dan mengeluarkan rekomendasi atas kondisi tersebut. Ombudsman Republik Indonesia memiliki perwakilan di tiap provinsi.

#### **A.4. Menjamin Keberlanjutan Advokasi**

---

Advokasi membutuhkan keuletan, kerja keras, dan kesabaran. Saat advokasi belum membuahkan hasil, tidak berarti kita harus berhenti dan menyerah. Demikian sebaliknya, jangan terlalu cepat merasa puas jika kondisi yang diperjuangkan berhasil dan justru menghentikan prosesnya sehingga tidak mencapai ke tingkat yang lebih baik.

#### **A.5. Menjamin Kestinambungan Advokasi**

---

Untuk menjamin advokasi tetap berkesinambungan, sumber daya manusia dan anggaran harus memadai. Akan selalu ada resiko pergantian personil dalam proses advokasi yang dapat diatasi dengan: 1) dokumentasi kegiatan tentang apa saja yang telah dilakukan, siapa saja yang terlibat, apa yang sudah dihasilkan, apa rencana yang belum dilaksanakan, 2) mempertahankan konsistensi dengan menjaga kredibilitas bahan yang di advokasikan, dan; 3) menjaga kualitas dari korupsi.

#### **A.6. Pihak Pentahelix PB Pendukung Advokasi Kebencanaan**

---

Pihak-pihak lain yang menjadi teman dalam proses advokasi merupakan pihak-pihak yang tergabung dalam pentahelix penanggulangan bencana. Pentahelix ini dimaknai sebagai kerangka kerja dalam berkegiatan dan berkarya agar lebih maksimal. Pentahelix merupakan sebuah teori yang menekankan pada kolaborasi dari lima unsur. Lima Unsur/pihak yang harus diperhatikan baik dari peran, kepentingan maupun karakternya. Unsur pentahelix terdiri dari Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Usaha, Akademisi dan Media. Lima pihak ini bersatu menjalin kebersamaan untuk mencapai satu tujuan Bersama.

Pencegahan dan penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Pentahelix dalam praktiknya adalah semangat jiwa “gotong royong”. Didalam semangat gotong royong terdapat pengertian tulus – ikhlas, ringan sama dijinjing berat sama dipikul, rela berkorban tanpa pamrih. Hal ini sejalan dengan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 bahwa “Gotong royong adalah Pembantingan tulang Bersama, pemerasan keringat semua, keringat semua buat bahagia semua.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, jurus atau cara dalam bersinerginya pun disesuaikan baik pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana. Sebab karakter masalahnya berbeda-beda dengan memperhatikan aspek lokal di setiap daerah. Selain itu, pentingnya ditanamkan bahwa “semua pihak wajib memiliki kesadaran kolektif akan kepedulian terhadap bencana.

- Unsur pemerintah merupakan unsur strategis, dimana komitmen dan kebijakan dengan ketegasan dalam menerapkan regulasi yang adil dan bagi semua. Dengan kebijakan yang mampu merangkul harapan bagi kepentingan yang lebih besar.
- Unsur Akademisi dengan kepakarannya diharapkan dapat memberikan terobosan-terobosan yang inovatif, kajian yang aplikatif termasuk turut terlibat dalam komitmen penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Unsur lembaga usaha berkomitmen dengan tidak merusak lingkungan dengan limbah yang dihasilkan perusahaan dan mendukung penyelenggaraan bencana dengan program CSR.
- Unsur media diharapkan mampu menjadi alat informasi dan mengedukasi masyarakat dengan mainstreaming pengarusutamaan penanggulangan bencana di berbagai sektor.
- Unsur komunitas dapat diharapkan sebagai motor penggerak masyarakat yang partisipatif dalam penanggulangan bencana.

## **A.7. Rekomendasi Hasil Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan Sebagai Target Advokasi**

---

Berawal dari bagaimana rencana tindak lanjut dan apa yang perlu dilakukan setelah dilakukan penilaian ketangguhan Desa/Kelurahan?

Salah satu program penguatan ketangguhan masyarakat seperti Desa tangguh bencana didalamnya terdapat Indikator penilaian ketangguhan desa (PKD). Selanjutnya, hasil dari penilaian ketangguhan desa memunculkan rekomendasi. Dengan rekomendasi hasil penilaian ketangguhan desa tersebut yang kemudian menjadi target yang diadvokasi ke desa, baik dari segi anggaran maupun program melalui RPB desa. Sebagai contoh rekomendasi dalam pengurangan resiko bencana yaitu perlu adanya jalur evakuasi, rambu evakuasi, dan adanya latihan kesiapsiagaan bencana secara berkala dan berkelanjutan tingkat desa/kelurahan.

Rencana penanggulangan bencana merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan (pra-saat-pasca) bencana dan bidang kerja kebencanaan (Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008). Sebagai sebuah program strategis, hal ini harus diadvokasi sehingga dapat tercapai sesuai dengan perencanaan awalnya. Bentuk pelaksanaan dari RPB dapat diwujudkan dengan mendorong keterlibatan pihak lain yang ada dalam pentahelix penanggulangan bencana.

Pengarusutamaan rencana penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan desa merupakan target utama dari advokasi, sehingga diperlukan keterlibatan antar pihak di dalam pentahelix penanggulangan bencana untuk dapat berkolaborasi agar rencana penanggulangan bencana menjadi bagian dari perencanaan pembangunan desa dan teranggarkan di dalam anggaran pendapatan belanja desa.

## **A.8. Advokasi Rekomendasi Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan**

---

### **A.8.1. Desa**

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dengan tujuan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

#### **A.8.1.a. Pengertian RPJMDesa**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMDes disusun untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam program/kegiatan pembangunan desa. RPJMDes berisi arah kebijakan pembangunan desa, rencana kegiatan yang meliputi 5 bidang pembangunan desa yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Kegiatan pemberdayaan

masyarakat yang akan dilakukan pemerintah desa. Dokumen ini menjadi acuan seluruh program pembangunan desa.

Maka dalam upaya advokasi RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) melalui perencanaan pembangunan desa maka kegiatan – kegiatan RPB harus masuk dalam RPJMDes. Apabila tidak diakomodir dalam RPJMDes maka akan sulit untuk mendapatkan alokasi pendanaan dari dana desa.



Gambar 1. Mekanisme Tahapan Penyusunan RPJMDesa



### A.8.1.b. Pengertian RKP Desa

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa secara partisipatif melalui MUSRENBANGDES. Program-program dalam RKP Desa diusulkan pemerintah desa ke pemerintah kabupaten, disesuaikan dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah (RKP), pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Review RKP Desa dilakukan pada desa yang memiliki dokumen RKP Desa. Dengan melakukan review RKP Desa maka fasilitator dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang direncanakan desa yang terintegrasi dengan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana).

Tahap ini dilakukan untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dalam RKP Desa sesuai dengan program-program yang direncanakan dalam RPJM Desa. RKP Desa merupakan penjabaran kegiatan detail yang disusun setiap tahun dan program tahunan yang akan berjalan.



Gambar 2. Mekanisme Tahapan Penyusunan RKP Desa

#### A.8.1.c.Pengertian APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan desa.

Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Sumber Pendapatan Desa: 1) Pendapatan Asli Desa, 2) Dana Desa yang Bersumber dari APBN, 3) Bagian dari Hasil PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Kab/kota, 4) Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota, 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, 6) Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3, serta 7) Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa seperti dalam uraian diatas.

##### a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk: 1) pelaksanaan pembangunan; dan 2) Pemberdayaan masyarakat desa

##### b. Penggunaan Dana Transfer ke Desa sebagai berikut (Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018):

Tabel. Penggunaan Dana Transfer ke Desa (Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018):

Bidang/Komponen	Kegiatan
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;</li> <li>2) Sarana dan prasarana pemerintahan desa;</li> <li>3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;</li> <li>4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan;</li> <li>5) Pertanahan.</li> </ol>
Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan;</li> <li>2) Kesehatan;</li> <li>3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>4) Kawasan permukiman;</li> <li>5) Kehutanan dan lingkungan hidup;</li> <li>6) Perhubungan, komunikasi dan informatika;</li> <li>7) Energi dan sumber daya mineral; dan</li> <li>8) Pariwisata</li> </ol>
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;</li> <li>2) Kebudayaan dan keagamaan;</li> <li>3) Kepemudaan dan olah raga; dan</li> <li>4) Kelembagaan masyarakat.</li> </ol>
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kelautan dan perikanan;</li> <li>2) Pertanian dan peternakan;</li> <li>3) Peningkatan kapasitas aparatur desa;</li> <li>4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;</li> <li>5) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;</li> <li>6) Dukungan penanaman modal dan;</li> <li>7) Perdagangan dan perindustrian.</li> </ol>
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak/Darurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penanggulangan bencana;</li> <li>2) Keadaan darurat; dan</li> <li>3) Keadaan mendesak.</li> </ol>

### **A.8.2. Kelurahan**

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan kelurahan untuk menyepakati Rencana Kerja Kelurahan (Renja Kelurahan) tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan. Musrenbang kelurahan diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan kelurahan, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun dari luar kelurahan.

Dasar hukum pelaksanaan musrenbang kelurahan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Di dalam lampiran modul advokasi desa, dilakukan persandingan antara indikator penilaian ketangguhan desa/kelurahan dengan kegiatan pembangunan desa yang dapat dibiayai menggunakan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta penyelarasan dengan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.

## B. Praktik Pembelajaran

### B.1. Pemetaan Aktor

---

Petakan aktor yang terdapat di wilayah saudara dan perannya dalam proses advokasi.

Lembar Kerja 1. Pemetaan Aktor

Aktor	Posisi dalam Pentahelix	Jabatan	Peran dalam Advokasi

### B.2. Strategi Advokasi

---

Buatlah strategi advokasi beserta dengan target dan waktu yang akan dicapai.

Lembar Kerja 2. Strategi Advokasi

Tindakan	Maksud	Target	Waktu	Pelaku
Sosialisasi				
Kampanye				
Lobby				
Hearing				

### B.3. Bahan Advokasi

---

Tulis pengalaman-pengalaman warga dalam berkegiatan PRB yang sudah memberikan manfaat sehingga dapat menjadi bahan diskusi dan advokasi dengan pengambil kebijakan, bahwa langkah-langkah lebih besar perlu dilakukan.

Lembar Kerja 3. Bahan Advokasi

Lokasi	Kondisi	Upaya yang dilakukan	Pelaku	Perubahan yang terjadi

#### B.4. Penyesuaian RPB

Buatlah daftar kegiatan sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana beserta kode rekening yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Lembar Kerja 4. Tabel Penyesuaian Rencana Penanggulangan Bencana

Desa/Kec : Kabupaten : Provinsi :							
No	Kegiatan	Tujuan	Sesuai Permendagri 20/2018				Biaya (Rp)
			Kode Rekening	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	
<b>Catatan penting:</b> Gunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai dasar untuk mengisi kode rekening, bidang, sub bidang dan kegiatan sebagai dasar dalam Rancangan APBDes yang disesuaikan dengan kegiatan yang diusulkan. Cek Lampiran Advokasi Desa Persandingan PKD.							

Tabel 5. Contoh pemetaan aktor

Aktor	Posisi dalam Pentahelix	Jabatan	Peran dalam Advokasi
Ibnu	Pemerintah	Kepala Dusun	Mendorong kebijakan dari dalam pemerintahan desa.
Tatang	Warga	Ketua RW 2	Memberikan dorongan kepada masyarakat saat musyawarah dusun untuk mengusulkan kegiatan mengenai pengurangan risiko bencana
Mbah Sumir	Warga	Tokoh Masyarakat	Memberikan cerita tentang sejarah risiko bencana di desa kepada pemerintah desa.
CV. Jelajah	Badan Usaha	-	Membiayai konsumsi pertemuan warga dan kebutuhan lain dalam perencanaan advokasi.
Sihab	Media Massa	Wartawan	Mendorong pemberitaan tentang risiko bencana di desa.
Supangat	Pemerintah	Pendamping Desa	Mendorong dan mendampingi Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan desa khususnya dalam pengurangan risiko bencana.
Joko H	Akademisi	Dosen Universitas	Memberikan gambaran tentang risiko bencana yang ada di desa saat musyawarah.
Hendra	Warga	Mahasiswa	Melakukan penelitian tentang risiko bencana di desa dengan pak Joko H



Tabel 6. Contoh strategi advokasi

Tindakan	Maksud	Target	Waktu	Pelaku
Sosialisasi dan Kampanye	Mensosialisasikan RPB ke kepala desa, jajarannya dan seluruh masyarakat melalui media gambar, banner dan ceramah keagamaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala desa dan penentu kebijakan paham tentang RPB.</li> <li>• Masyarakat ikut mendukung dan mendorong advokasi RPB.</li> </ul>	Maret - September 2022	Pak Agung (tokoh agama), Pak Ahe (FPRB), Ade (FPRB), Waha (Relawan), dan Karang Taruna.
Hearing	Meminta kepala desa dan jajarannya mendengarkan keluhan masyarakat dan paparan ahli dari universitas terkait risiko longsor.	Kepala desa mau membuat SK, Perdes, dan menganggarkan kegiatan PRB yang ada dalam dokumen RPB setidaknya 1 bulan setelah lobby dilakukan.	Oktober 22	Pak Alex (Kepala Dusun), Pak Sumir (Tokoh Masyarakat), Bu Jalu (Tokoh Adat), Pak Ahe (FPRB).
Lobby	Mempengaruhi kepala desa dan jajarannya dengan menjelaskan maksud, tujuan, dan pentingnya RPB agar membuat SK, Perdes, dan pelaksanaan RPB.	Kepala desa mau membuat SK, Perdes, dan menganggarkan kegiatan PRB yang ada dalam dokumen RPB setidaknya 1 bulan setelah lobby dilakukan.	Oktober 22	Bu Iyan, Pak Abe, Bu Lia (korban longsor) dan Pak Suhu dari Universitas Lokal.

Tabel 7. Contoh bahan advokasi

Lokasi	Kondisi	Upaya yang dilakukan	Pelaku	Perubahan yang terjadi
Dusun Ela, RT 4 dan 5	Kekeringan tahun 2016 menyebabkan matinya sapi milik warga di RT 4 dan 5. Total kerugian mencapai 80 juta rupiah.	Warga secara gotong royong membangun tampungan air kolektif untuk memenuhi kebutuhan air ternak. Pasokan air dipenuhi dari tiap-tiap pemilik sapi.	Kelompok Ternak	Tidak ada kematian sapi.
Dusun Eki, RT 8	Penyumbatan sampah di sungai menyebabkan jalan di RT 8 tergenang air.	Gotong royong pembersihan dan melakukan sosialisasi selama 6 bulan di seluruh RT.	Pegiat RT 8	Tidak ada penyumbatan dan pembuangan sampah-sampah baru.

Tabel 8. Contoh kegiatan advokasi

Desa/Kec : Pakansari/Cibinong							
Kabupaten : Kab. Bogor							
Provinsi : Jawa Barat							
No	Kegiatan	Tujuan	Sesuai Permendagri 20/2018				Biaya (Rp)
			Kode Rek.	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	
1	Sosialisasi kesadaran bencana	Meningkatkan kesadaran masyarakat	3.1.07	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,	Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.	2 Juta
2	Reboisasi	Mencegah longsor bantaran sungai	2.5.02	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan hidup desa.	36 Juta
3	Pembuatan biopori dan sumur resapan	Mempercepat resapan air	2.4.02	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan sumur resapan.	2 Juta
4	Penguatan Tim Siaga Bencana	Menyediakan tenaga terampil dalam penanggulangan bencana	3.1.02	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,	Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa	2 Juta
5	Pelatihan evakuasi dan P3K	Meningkatkan keterampilan tim siaga bencana dan masyarakat	3.1.04	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,	Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Pelatihan Kesiapsiagaan/tanggap bencana skala desa	2 Juta
6	Simulasi bencana	- Uji sistem kesiapsiagaan - Memperbaiki rencana kontijensi	3.1.04	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,	Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Pelatihan Kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal desa	2 Juta
7	Pengadaan perlengkapan kebencanaan	Menyediakan peralatan penanggulangan bencana	3.1.05	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,	Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan bencana skala lokal desa	30 Juta
8	Pengelolaan bank sampah	1. Mengurangi sampah 2. Meningkatkan ekonomi	2.4.07	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah	50 Juta

<b>Desa/Kec : Pakansari/Cibinong</b> <b>Kabupaten : Kab. Bogor</b> <b>Provinsi : Jawa Barat</b>							
No	Kegiatan	Tujuan	Sesuai Permendagri 20/2018				Biaya (Rp)
			Kode Rek.	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	
9.	Penyusunan kajian risiko bencana	1. Mengkaji risiko dan dampak bencana yang ada di desa 2. Membuat peringkat risiko	1.4.03	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKP Des, DII)	50 Juta
10	Penyusunan peta risiko bencana	Memetakan wilayah berdasarkan tingkat risiko bencana	2.3.17	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pekerjaaaan Umum dan Penataan Ruang	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	30 Juta

# Daftar Pustaka

- Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.
- Chambers, Robert, 1996, Participatory Rural Appraisal : Memahami Desa Secara Partisipatif, Kanisius, Yogyakarta.
- Paripurno, ET, 2015, Riset Partisipatif untuk Penanggulangan Bencana, Perkumpulan KAPPALA Indonesia & Pusat Studi Manajemen Bencana UPN "Veteran" Yogyakarta
- Paripurno, ET & Jannah, NM (Ed), 2015, Panduan Pengelolaan Risiko Berbasis Masyarakat, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia - Jakarta
- Tan, Jo Hann & Roem Topatimasang, 2003, Mengorganisir Rakyat : Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara, SEAPCP & R EaD, Kuala Lumpur - Jakarta - Yogyakarta.
- Topatimasang, Roem - Mansour Fakhri - Toto Rahardjo, 2001, Merubah Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar-Red-INSIST-Pact Indonesia, Yogyakarta.
- Usman, Sunyoto, 1998, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## Lampiran

### Lampiran 1 Strategi Integrasi Indikator PKD dalam Rencana Pembangunan Desa: Persandingan Indikator PKD dengan Bidang/Kegiatan sesuai Permendagri 20 Tahun 2018

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
1	Indikator 1. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pendidikan	2 1 01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa ( <i>pilih salah satu kegiatan</i> ) (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
				2 1 02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
				2 1 03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
				2 1 04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa ( <i>pilih salah satu kegiatan</i> )
				2 1 05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa ( <i>pilih salah satu kegiatan</i> )
				2 1 06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa ( <i>pilih salah satu kegiatan</i> )
				2 1 07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa ( <i>pilih salah satu kegiatan</i> )
				2 1 08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
				2 1 09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
				2 1 10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	Indikator 2. Penyelenggaraan Layanan Kesehatan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kesehatan	2 2 01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
				2 2 02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
				2 2 03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
				2 2 04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
				2 2 05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
				2 2 06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
				2 2 07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
				2 2 08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
				2 2 09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ( <i>pilih salah satu kegiatan</i> )
3	Indikator 3. Sarana dan Prasarana Transportasi	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 3 01	Pemeliharaan Jalan Desa
				2 3 02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
				2 3 04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
				2 3 10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ( <i>pilih salah satu kegiatan</i> )
				2 3 11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ( <i>pilih salah satu kegiatan</i> )

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
				2 3 13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
4	Indikator 4. Penyediaan Air Bersih	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kawasan Permukiman	2 4 02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
				2 4 03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
				2 4 04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
				2 3 08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
				2 4 10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (pilih salah satu kegiatan)
				2 4 11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)(pilih salah satu kegiatan)
				2 4 12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) (pilih salah satu kegiatan)
				2 3 19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (pilih salah satu kegiatan)
5	Indikator 5. Program dan Kegiatan Pangan & Gizi	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kesehatan	2 2 02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
				Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pertanian dan Peternakan
		4 2 02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)		
		4 2 03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)		
					4 2 04
6	Indikator 6. Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Ekonomi Melalui BUMDES	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4 5 01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
				4 5 02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi



No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
				4 5 03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
			Dukungan Penanaman Modal	4 6 01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
				4 6 02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
			Perdagangan dan Perindustrian	4 7 03	Pengembangan Industri kecil level Desa
				4 7 04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
7	Indikator 7. Sarana dan Prasarana Komunikasi/Informasi	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2 6 01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
				2 6 02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll (pembuatan poster informasi lokasi bencana di desa, dll))
				2 6 03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
8	Indikator 8. Pelayanan Administrasi dan Kependudukan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1 3 01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
9	Indikator 9. Peraturan/Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kehutanan dan Lingkungan hidup	2 5 01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
				2 5 02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
				2 5 03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
10	Indikator 10. Peraturan dan Kegiatan Keagamaan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
		Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Kebudayaan dan Keagamaan	3 2 03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
				3 2 04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
				3 2 05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
11	Indikator 11. Peraturan dan Kegiatan Kebudayaan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
		Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Kebudayaan dan Keagamaan	3 2 01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
				3 2 02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
				3 2 03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
				3 2 04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
				3 2 05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (pilih salah satu kegiatan)
12	Indikator 12. Peraturan dan Kegiatan Perlindungan Keamanan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	3 1 01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll)
				3 1 02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
				3 1 03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
				3 1 04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
				3 1 05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
				3 1 06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
				3 1 07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
13	Indikator 13. Peraturan dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4 4 01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
				4 4 02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
14	Indikator 14. Layanan Khusus Difabel	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4 4 03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
15	Indikator 15. Pengkajian Risiko Bencana	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pekerjaaaan Umum dan Penataan Ruang	2 3 17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
16	Indikator 16. Rencana Penanggulangan Bencana	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
17	Indikator 17. Pelatihan Penanggulangan Bencana	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	3 1 04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
18	Indikator 18. Kelembagaan PB (Kelompok/Organisasi Penanggulangan Bencana)	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kelembagaan Masyarakat	3 4 04	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
19	Indikator 19. Bantuan/Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
				1 4 09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
20	Indikator 20. Peringatan Bahaya (lebih dari 1 bencana)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2 6 01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
				2 6 02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll (pembuatan poster informasi lokasi bencana di desa, dll))
21	Indikator 21. Penyebarluasan Peringatan Bahaya (lebih dari 1 bencana)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2 6 01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
				2 6 02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll (pembuatan poster informasi lokasi bencana di desa, dll))
				2 6 03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
22	Indikator 22. Rencana Evakuasi (lebih dari 1 bencana)	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)

No	Indikator PKD	Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Sub Bidang dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kode Rekening dalam Permendagri 20 Tahun 2018	Kegiatan dalam Permendagri 20 Tahun 2018
23	Indikator 23. Jalur Evakuasi (lebih dari 1 bencana)	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 4 03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 3 17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
24	Indikator 24. Tempat Pengungsian (lebih dari 1 bencana)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	3 1 05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
25	Indikator 25. Uji Kesiapsiagaan/Simulasi (lebih dari 1 jenis bencana)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	3 1 04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

**Lampiran 2 Strategi Integrasi Indikator PKD dalam Rencana Pembangunan Kelurahan: Persandingan Indikator PKD dengan Bidang/Kegiatan sesuai Permendagri 130 Tahun 2018**

Komponen	Indikator	Permendagri 130 Tahun 2018
Komponen 1. Layanan Dasar	Indikator 1. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan	<p>Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pasal 3 ayat (2) huruf d: Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan</p> <p>Jenis kegiatan berada pada Pasal 4 ayat (4), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>taman bacaan masyarakat;</li> <li>bangunan pendidikan anak usia dini;</li> <li>wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau</li> <li>sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.</li> </ol> <p>Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pasal 5 ayat (2) huruf b: pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan</p> <p>Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (2), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyelenggaraan pelatihan kerja;</li> <li>penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau</li> <li>kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.</li> </ol>
	Indikator 2. Penyelenggaraan Layanan Kesehatan	<p>Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pasal 3 ayat (2) huruf c: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan</p> <p>Jenis kegiatan berada pada Pasal 4 ayat (3), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;</li> <li>pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau</li> <li>sarana prasarana kesehatan lainnya</li> </ol> <p>Pemberdayaan Pasal 5 ayat (2) huruf a: pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat</p> <p>Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (1), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;</li> <li>keluarga berencana;</li> <li>pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau</li> <li>kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.</li> </ol>

Komponen	Indikator	Permendagri 130 Tahun 2018
	Indikator 3. Sarana dan Prasarana Transportasi	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pasal 3 ayat (2) huruf b: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi  Jenis kegiatan berada pada pasal 4 ayat (2), yaitu: a. jalan pemukiman; b. jalan poros Kelurahan; dan/atau b. sarana prasarana transportasi lainnya.
	Indikator 4. Penyediaan Air Bersih	Pasal 3 ayat (2) huruf a: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman  Kegiatan berada pada pasal 4 ayat (1) huruf a. jaringan air minum
	Indikator 5. Program dan Kegiatan Pangan & Gizi	Pemberdayaan Pasal 5 ayat (2) huruf a: pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat  Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (1), huruf d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya. Contoh: pemberian PMT pada balita
	Indikator 6. Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Ekonomi Melalui BUMDES	Pemberdayaan Pasal 5 ayat (2) huruf c: pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah  Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (3), yaitu: a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya
	Indikator 7. Sarana dan Prasarana Komunikasi/Informasi	Berdasarkan SPM Pelayanan Komunikasi/Informasi
	Indikator 8. Pelayanan Administrasi dan Kependudukan	Dasar hukum 1. PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring



Komponen	Indikator	Permendagri 130 Tahun 2018
	Indikator 9. Peraturan/Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Pasal 3 ayat (2) huruf a: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman</p> <p>Kegiatan berada pada pasal 4 ayat (1) huruf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. drainase dan selokan;</li> <li>c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;</li> <li>d. sumur resapan;</li> <li>e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;</li> </ul>
	Indikator 10. Peraturan dan Kegiatan Keagamaan	Berdasar SPM Keagamaan
	Indikator 11. Peraturan dan Kegiatan Kebudayaan	<p>Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan</p> <p>Pasal 3 ayat (2) huruf d: Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan</p> <p>Jenis kegiatan berada pada Pasal 4 ayat (4), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. taman bacaan masyarakat;</li> <li>b. bangunan pendidikan anak usia dini;</li> <li>c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau</li> <li>d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.</li> </ul> <p>Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan</p> <p>Pasal 5 ayat (2) huruf b: pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan</p> <p>Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (2), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan pelatihan kerja;</li> <li>b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau</li> <li>c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.</li> </ul>
	Indikator 12. Peraturan dan Kegiatan Perlindungan Keamanan	<p>Pemberdayaan</p> <p>Pasal 5 ayat (2) huruf e: pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</p> <p>Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (5), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;</li> <li>b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau</li> <li>c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.</li> </ul>
	Indikator 13. Peraturan dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Komponen	Indikator	Permendagri 130 Tahun 2018
	Indikator 14. Layanan Khusus Difabel	
Komponen 2. Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana	Indikator 15. Pengkajian Risiko Bencana	Pemberdayaan Pasal 5 ayat (2) huruf penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya
	Indikator 16. Rencana Penanggulangan Bencana	Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (6): a. penyediaan layanan informasi tentang bencana; b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
	Indikator 17. Pelatihan Penanggulangan Bencana	
	Indikator 18. Kelembagaan PB (Kelompok/Organisasi Penanggulangan Bencana)	Pemberdayaan Pasal 5 ayat (2) huruf d pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan  Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (4): a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
Komponen 3. Kesiapsiagaan Bencana	Indikator 19. Bantuan/Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana	
	Indikator 20. Peringatan Bahaya (lebih dari 1 bencana)	Pemberdayaan Pasal 5 ayat (2) huruf penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya
	Indikator 21. Penyebarluasan Peringatan Bahaya (lebih dari 1 bencana)	Jenis kegiatan berada pada Pasal 6 ayat (6): a. penyediaan layanan informasi tentang bencana; b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
	Indikator 22. Rencana Evakuasi (lebih dari 1 bencana)	
	Indikator 23. Jalur Evakuasi (lebih dari 1 bencana)	
	Indikator 24. Tempat Pengungsian (lebih dari 1 bencana)	
Indikator 25. Uji Kesiapsiagaan/Simulasi (lebih dari 1 jenis bencana)		

# Keluarga Tangguh Bencana

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



# Keluarga Tangguh Bencana

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

2021



Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputian Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

## **Keluarga Tangguh Bencana**

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

### **PENGARAH**

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB  
Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

### **PENANGGUNGJAWAB**

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB  
Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

### **EDITOR**

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

### **PENYUSUN**

Sigit Purwanto	Pujiono Centre
Sumino	LPTP Surakarta
Wahyu Heniwati	Daya Annisa / MDMC
Anggoro Budi Prasetyo	Aksara
Wana Kristanto	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Indra Baskoro Adi	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Muhammad Nur Ronggo Dinoyo	LPTP Surakarta
Gandar Mahojwala	KAPPALA Indonesia
Pudji Santosa	Lingkar
Gigih Aditya Pratama	KAPPALA Indonesia
Yugyasmono	Lingkar
Hadi Sutrisno	BNPB
Nurul Maulidhini	BNPB

### **KONTRIBUTOR**

Arif Fadli	BNPB
Virana Fatwa Nurmala	BNPB
Denadia Mutty	BNPB
Rahma Sari Puspita	BNPB
Riski Yufawinda	BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

# Daftar Isi

- Pengantar ..... 2**
- Daftar Isi ..... 4**
  
- A. Materi Pembelajaran ..... 5**
  
- B. Praktik Pembelajaran ..... 6**
  - B.1. Mengetahui Risiko Bencana Berbasis Keluarga ..... 6
  - B.2. Mengetahui Sistem Peringatan Dini Bencana ..... 9
  - B.3. Menyusun Rencana Evakuasi Mandiri ..... 12
  
- Daftar Referensi ..... 16**
  
- Lampiran ..... 17**
  - Bangunan Rumah Aman Bencana ..... 17
  - Tata Ruang Aman Bencana ..... 20

## A. Materi Pembelajaran

Ketangguhan keluarga dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang, anggota keluarga yang berpotensi terkena bahaya bencana untuk melawan, menyerap, menampung, dan memulihkan diri dari efek bahaya bencana pada waktu yang tepat dan dengan efisien; termasuk melalui perlindungan dan restorasi struktur dasar yang penting dan fungsinya. Oleh karenanya setiap anggota keluarga perlu mengetahui risiko bencana yang berpotensi terjadi di lingkungannya. Tidak hanya risiko bencana di rumahnya, namun juga risiko bencana yang ada pada lingkungan aktivitas harian tiap-tiap anggota keluarga, baik aktivitas rutin, maupun aktivitas temporer, seperti liburan, kunjungan keluarga dan sebagainya.

Dalam konteks kemampuan bangunan huniannya, maka setiap anggota keluarga perlu mengetahui dan memperkuat struktur bangunan rumahnya. Tidak hanya struktur bangunan rumah, namun juga infrastruktur rumah, fasilitas dan perabot yang ada di dalam rumah. Selain struktur, setiap anggota keluarga dapat mengatur ruangan dan perabot agar tidak membahayakan serta mempermudah evakuasi juga mengurangi dan menyelamatkan nyawa. Termasuk, kemudahan ketika anggota keluarga akan menyelamatkan diri.

Ketika bencana terjadi, pertolongan dari pihak berwenang, tidak serta merta bisa diterima. Terutama bagi keluarga yang berada relatif jauh dari akses komunikasi dan transportasi. Oleh karena itu perlengkapan kesiapsiagaan Keluarga adalah satu paket perlengkapan kebutuhan dasar yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana. Semakin banyak persediaan, semakin baik. Namun umumnya kita memerlukan, setidaknya untuk dipergunakan pada keadaan darurat bencana selama 3x24 jam. Perlengkapan ini berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga (anggota keluarga) pada kondisi tidak adanya bantuan sama sekali/bantuan belum tiba.

Setiap keluarga yang berada di daerah rawan bencana perlu merencanakan cara evakuasi keluarga dilakukan jika bencana terjadi. Perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan aktivitas harian tiap-tiap anggota keluarga. Permasalahan yang sering terjadi kita tidak punya rencana evakuasi, dan belum pernah mencobanya.

Rencana kesiapsiagaan keluarga adalah perencanaan yang dibuat oleh keluarga untuk siap dalam kondisi darurat akibat bencana baik saat berada di lapangan maupun di luar rumah. Dalam pembuatan rencana ini, setiap anggota keluarga terlibat untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menyetujui rencana tersebut. Setiap keluarga yang berada di daerah rawan bencana perlu memastikan dirinya memiliki kemampuan dan fasilitas untuk menerima informasi peringatan dini.

Selain itu juga perlu menyiapkan rencana evakuasi apabila terjadi bencana. Evakuasi perlu dilakukan jika sewaktu-waktu terdapat tanda-tanda atau peringatan kejadian bencana. Evakuasi dilakukan untuk memastikan anggota keluarga selamat jika terjadi bencana. Melalui simulasi evakuasi, kemampuan setiap anggota keluarga dibangun agar berdaya melakukan evakuasi secara mandiri.



## B. Praktik Pembelajaran

### B.1. Mengenal Risiko Bencana Berbasis Keluarga

Dalam mengenali risiko bencana berbasis keluarga langkah yang dilakukan adalah :

1. Sosialisasikan hasil kajian risiko bencana desa/kelurahan ke tingkat keluarga
2. Gunakan peta risiko bencana untuk mengidentifikasi tingkat risiko keluarga
3. Lakukan penilaian Tingkat risiko dengan menggunakan tabel dibawah ini :

Lembar kerja 1. Penilaian Tingkat Risiko

Fasilitator/Penyuluh :			
Periode Dampingan :			
Alamat :			
Nama Anggota Katana	Status	Usia	Pekerjaan
Jenis Ancaman Bencana :			
Karakter	Keterangan		
Asal/Penyebab			
Faktor Perusak			
Tanda Peringatan			
Sela Waktu			
Kecepatan Hadir			
Frekuensi			
Perioda			
Durasi			

Intensitas			
Posisi			
<b>Tingkat Risiko</b>			
<b>Perkiraan Bentuk Risiko Pada Keluarga</b>	<b>Kerentanan di Keluarga</b>	<b>Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)</b>	<b>Tingkat Risiko (T/R/S)</b>

Tabel 2.1 Contoh Penilaian Tingkat Risiko

Fasilitator/Penyuluh : Dewi Embun Turun Periode Dampingan : 24 Agustus – 28 Agustus 2020 Alamat : Jl Swadaya 1 Gg gardu RT 004/011 No 29A kelurahan Pejaten Timur			
<b>Nama Anggota Katana</b>	<b>Status</b>	<b>Usia</b>	<b>Pekerjaan</b>
<b>Putra Merdeka</b>	Kepala Keluarga	59 tahun	Wirusaha
<b>Putri Pertiwi</b>	Istri	49 tahun	IRT
<b>Garuda Nusantara</b>	Anggota (Anak)	22 tahun	Mahasiswa
<b>Elang Perkasa</b>	Anggota (Anak)	17 tahun	Siswa
<b>Jenis Ancaman Bencana</b>	<b>: Gempa Bumi</b>		
<b>Karakter</b>	<b>Keterangan</b>		
<b>Asal/Penyebab</b>	Efek Pergeseran lempeng bumi (tektonik) di banten		
<b>Faktor Perusak</b>	Getaran bumi yang kencang		
<b>Tanda Peringatan</b>	Getaran terjadi mulai dari kecil hingga kencang		
<b>Sela Waktu</b>	30 menit		
<b>Kecepatan Hadir</b>	15 detik		
<b>Frekuensi</b>	1 kali pada tahun 2020		
<b>Perioda</b>	Terjadi dalam 2 kali pada tahun 2020 dan terjadi 2 tahun terakhir		
<b>Durasi</b>	10-15 detik		

<b>Intensitas</b>	Besar getaran 5,4 magnitudo kedalaman H>300 KM		
<b>Posisi</b>	Banten		
<b>Tingkat Risiko</b>			
<b>Perkiraan Bentuk Risiko Pada Keluarga</b>	<b>Kerentanan di Keluarga</b>	<b>Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)</b>	<b>Tingkat Risiko (T/R/S)</b>
<b>Luka-luka</b>	Terjadi kepanikan Tertimbun/tertiban barang	Menyiapkan P3K	T
<b>Trauma</b>	Tidak memiliki kesiapan	Trauma healing	S
<b>ISPA</b>	Debu karna reruntuhan	Penggunaan masker	S
<b>Mengungsi</b>	Rumah mengalami kerusakan parah/rentan	Tempat pengungsian (Masjid Al amin, Masjid Nurul Huda, Lapangan Bola Gunuk)	R
<b>Tidak bisa sekolah</b>	Sekolah rusak/ rentan	Terdapat sekolah darurat	S
<b>Pengeluaran tambahan keluarga</b>	Digunakan untuk membeli makan Membeli keperluan rumah tangga Memperbaiki rumah	Memiliki tabungan	S
<b>Kerusakan perabot rumah tangga</b>	Akibat getaran yang cukup kencang, mengakibatkan barang terjatuh dan pecah		T
<b>Gangguan kekerabatan rumah tangga</b>	Saling menyalahkan	Menjalin komunikasi yang baik tiap anggota	S
<b>Tanaman Hias</b>	Tertimbun dan rusak		S

## **B.2. Mengenal Sistem Peringatan Dini Bencana**

Di dalam mengenali bagaimana mekanisme sistem peringatan dini keluarga maka perlu memahami empat unsur prinsip yaitu:

1. Pengetahuan tentang bahaya dan risiko
2. Pemantauan dan layanan peringatan
4. Penyebarluasan dan komunikasi
5. Kemampuan merespon

Adapun langkah penyusunan sistem peringatan dini meliputi:

1. Penetapan pemantauan dan peringatan bahaya; tatacara melakukan pemantauan atau memperoleh informasi bahaya.
2. Penetapan penyebarluasan peringatan bahaya; menentukan tata cara penyebarluasan peringatan bahaya kepada anggota keluarga.
3. Penetapan respon/tindakan terhadap peringatan.

### Lembar Kerja 2. Sistem Peringatan Dini Keluarga

<b>Jenis Ancaman</b>	:	
<b>Fasilitator/Penyuluh</b>	:	
<b>Periode Dampungan</b>	:	
<b>Alamat</b>	:	
<b>Peringatan Bahaya</b>		
<b>Sumber peringatan bahaya</b>		
<b>Bentuk peringatan bahaya</b>		
<b>Cara pemantauan bahaya</b>		
<b>Cara penyampaian peringatan bahaya</b>		
<b>Cara memastikan kebenaran peringatan</b>		
<b>Penyebarluasan peringatan bahaya</b>		
<b>Penyampai peringatan</b>		
<b>Sasaran peringatan</b>		
<b>Cara penyampaian peringatan umum dan khusus difabel</b>		
<b>Bentuk peringatan</b>		

Respon/Tindakan terhadap peringatan	
Tindakan Keluarga	
No kontak penting dan keluarga	
Ayah	
Ibu	
Anak	
Guru Sekolah	
Satpam Sekolah	

Tabel 2.2. Contoh Sistem Peringatan Dini Keluarga

<b>Jenis Ancaman : Gempa Bumi</b> <b>Fasilitator/Penyuluh : Dewi Embun Turun</b> <b>Periode Dampingan : 24 Agustus – 28 Agustus 2020</b> <b>Alamat :</b>	
Peringatan Bahaya	
Sumber peringatan bahaya	BMKG, Televisi, Toa Masjid
Bentuk peringatan bahaya	Terjadi getaran dan pasang surut air laut
Cara pemantauan bahaya	Pemberian Informasi dari pihak terpercaya
Cara penyampaian peringatan bahaya	Via Pesan elektronik, Televisi
Cara memastikan kebenaran peringatan	Mengecek di situs resmi BNPB/BMKG
Penyebarluasan peringatan bahaya	
Penyampai peringatan	Lisan, Pesan WA
Sasaran peringatan	Semua anggota Keluarga
Cara penyampaian peringatan umum dan khusus difable	-
Bentuk peringatan	Waspada, siaga
Respon/Tindakan terhadap peringatan	
Tindakan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengemas surat penting dan barang berharga lainnya</li> <li>• Menyelamatkan diri</li> <li>• Mengevakuasi anggota keluarga</li> </ul>
No kontak penting dan keluarga	
Ayah	081356723xxx

<b>Ibu</b>	089531457xxx
<b>Anak</b>	081776616xxx
<b>Guru Sekolah</b>	081265488xxx
<b>Polisi</b>	110
<b>Telepon darurat</b>	112
<b>PMI</b>	021-4207051
<b>PLN</b>	123
<b>BMKG</b>	021-6546318
<b>TNI</b>	021-84595576
<b>Ambulans</b>	118 atau 119

### B.3. Menyusun Rencana Evakuasi Mandiri

Keluarga di kawasan rawan bencana sebaiknya memiliki rencana evakuasi untuk penyelamatan diri beserta harta bendanya ke tempat lebih aman sebelum datang ancaman. Maka perlu dilakukan penyusunan strategi evakuasi, beberapa prinsip penting adalah;

1. Kecepatan, keamanan, menghindari ancaman
2. Jumlah anggota keluarga yang akan dievakuasi serta jenis harta bendanya yang akan dibawa
3. Ketersediaan alat angkut, peralatan dan operatonya
4. Pembagian tugas dan tanggungjawab dalam evakuasi

Lembar Kerja 3. Rencana Evakuasi Keluarga

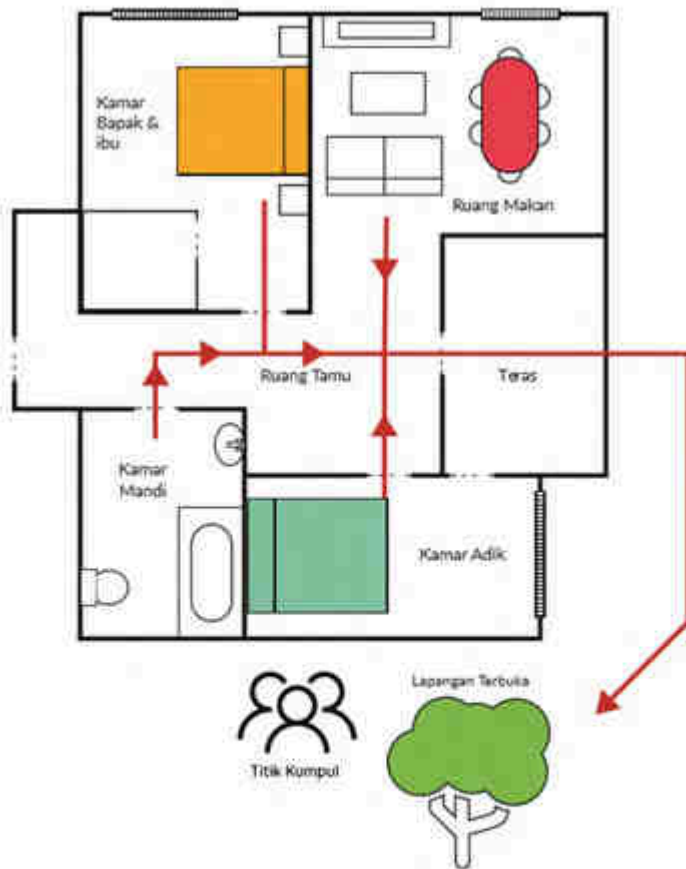
Anggota Keluarga	Jam	Tempat Beraktifitas	Lokasi Evakuasi
Ayah			
Ibu			
Anak			

Tabel 2.3. Contoh Rencana Evakuasi Keluarga

Anggota Keluarga	Jam	Tempat Beraktifitas	Lokasi Evakuasi
Ayah	00.00 -23.59	Rumah	Masjid Nurul Huda
Ibu	00.00 -23.59	Rumah	Masjid Nurul Huda
Anak	07.00-16.40	Kampus	Lapangan Kampus
	07.00-15.00	SMK 63	Lapangan SMK 63
	07.00-13.00	SDN 09 Tanjung barat	Lapangan SDN 09 Tanjung Barat

Setelah rencana evakuasi disusun, kemudian penyusunan peta evakuasi. Peta evakuasi disusun menggunakan peta risiko hasil pengkajian risiko bencana. Setelah strategi evakuasi ditetapkan, selanjutnya peta jalur evakuasi harus digambar. Tujuan menggambar peta

evakuasi agar perencanaan evakuasi menjadi bentuk visual/gambar dan mudah dipahami seluruh anggota keluarga.



Gambar 2.1. Contoh denah jalur evakuasi rumah siaga bencana.

Di samping penyusunan rencana evakuasi, sebelumnya harus dilakukan penyusunan rencana siaga keluarga dan juga mempersiapkan tas siaga bencana.



Lembar Kerja 4. Check List Tas Siaga Bencana

No	Barang/Surat penting	Tanggal Kadaluarsa

Simpan pada tempat yang mudah aksesnya. Cek kadaluarsa obat dan makanan setiap 2 atau 6 bulan sekali. Komunikasikan dengan seluruh anggota keluarga. Gunakan tas tahan air (jika mungkin)

Tabel 2.4. Contoh Check List Tas Siaga Bencana

No	Barang/Surat Penting	Tanggal Kadaluarsa
1	BPKB	-
2	Surat Rumah/ Sertifikat tanah	-
3	Ijazah	-
4	Buku ATM	-
5	Sertifikat pendidikan	-
6	Surat akte kelahiran	-
7	Pakaian dalam	-
8	dompet	-
9	handphone	-
10	Celana panjang	-
11	jaket	-
12	selimut	-
13	handuk	-
14	Jas hujan	-
15	Mie instan,	<b>2022</b>
16	biskuit	<b>2022</b>
17	abon	<b>2021</b>
18	Air mineral untuk 3 hari	<b>2021</b>
19	Obat obatan pribadi	<b>2021</b>
20	Senter	-
21	Uang cash	-
22	peluit	-
23	masker	-
24	sabun	<b>2022</b>
25	Sikat gigi	-
26	odol	<b>2021</b>



## Daftar Referensi

- Anonim, 2007, Undang Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Anonim, 2012, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1  
Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana
- Anonim, 2019, Modul Panduan Penyuluh KATANA

# Lampiran

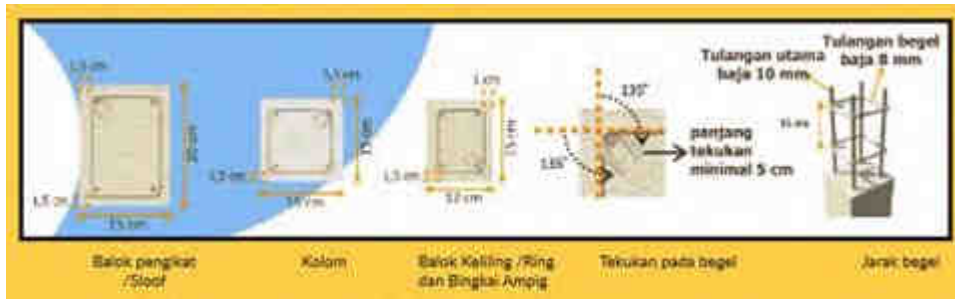
## Bangunan Rumah Aman Bencana



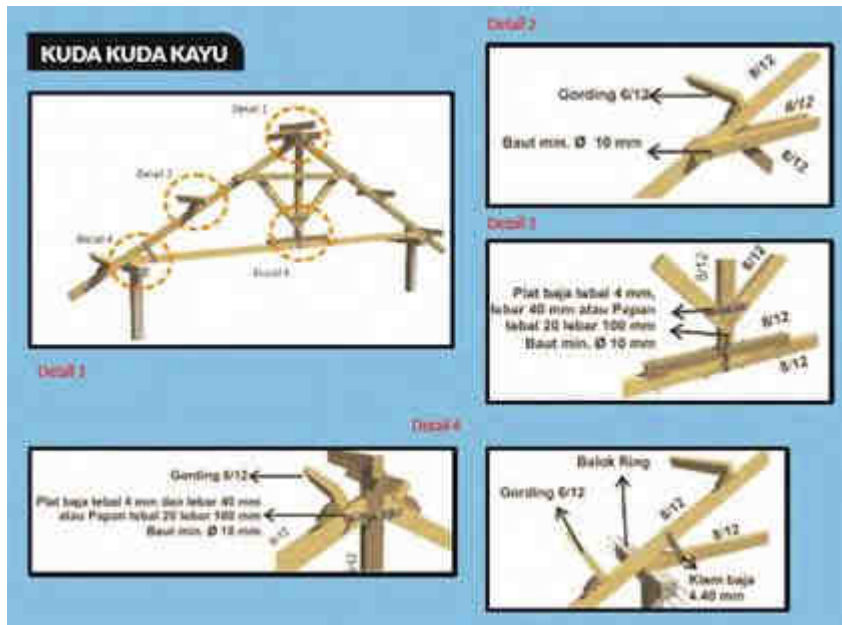
Gambar 2.1. Pokok rumah aman bencana (PUPR – JICA)



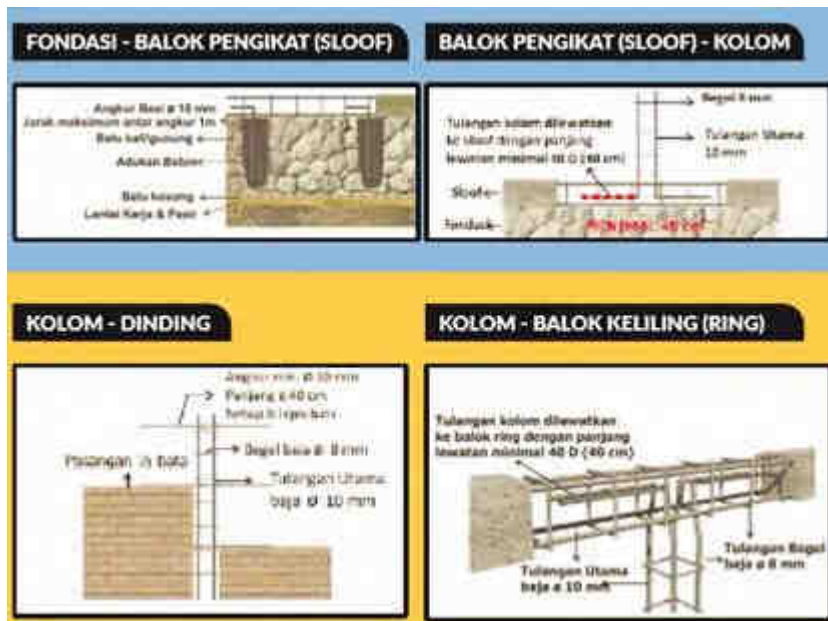
Gambar 2.2. Struktur utama rumah aman bencana (PUPR – JICA)



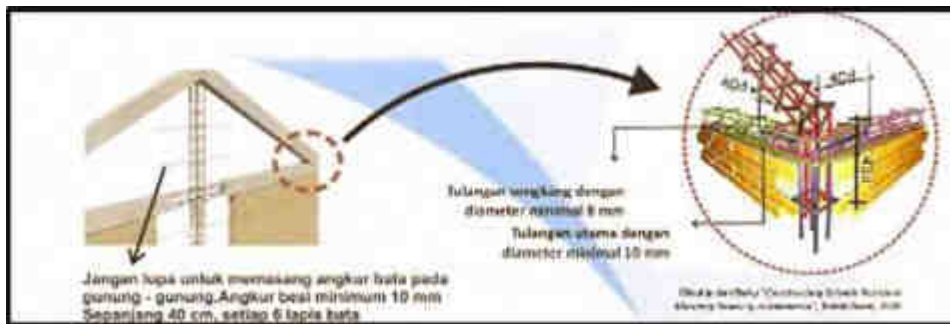
Gambar 2.3. Struktur beton bertulang rumah aman bencana (PUPR – JICA)



Gambar 2.4. Struktur kuda – kuda kayu rumah aman bencana (PUPR – JICA)



Gambar 2.5. Ikatan struktur utama rumah aman bencana (PUPR – JICA)



Gambar 2.6. Gunung – gunung – kolom rumah aman bencana (PUPR – JICA)

### PENGECORAN KOLOM

- Pastikan cetakan rapat dan kuat/kokoh
- pengecoran kolom dilakukan secara bertahap setiap 1 m
- Pada saat pengecoran beton dirojak dengan besi tulangan atau bambu agar tidak ada yang keropos
- Pelepasan bekisting minimal 3 hari setelah pengecoran

Gambar 2.7. Pengecoran kolom rumah aman bencana (PUPR – JICA)

### PENGECORAN BALOK

- Tulangan dirangkai diatas dinding
- Cetakan pada balok gantung harus diberi penyangga
- Cetakan dapat dilepas setelah 3 hari untuk balok yang menumpu di dinding, dan 14 hari untuk balok gantung

Gambar 2.8. Pengecoran balok rumah aman bencana (PUPR – JICA)

## Tata Ruang Aman Bencana

---



Gambar 2.9. Praktik tata ruang aman bencana



# Satuan Pendidikan Aman Bencana

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa





# Satuan Pendidikan Aman Bencana

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputan Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

## **Modul Satuan Pendidikan Aman Bencana**

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

### **PENGARAH**

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB  
Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

### **PENANGGUNGJAWAB**

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB  
Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

### **EDITOR**

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

### **PENYUSUN**

Sigit Purwanto	Pujiono Centre
Sumino	LPTP Surakarta
Wahyu Heniwati	Daya Annisa / MDMC
Anggoro Budi Prasetyo	Aksara
Wana Kristanto	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Indra Baskoro Adi	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Muhammad Nur Ronggo Dinoyo	LPTP Surakarta
Gandar Mahojwala	KAPPALA Indonesia
Pudji Santosa	Lingkar
Gigih Aditya Pratama	KAPPALA Indonesia
Yugyasmono	Lingkar
Hadi Sutrisno	BNPB
Nurul Maulidhini	BNPB

### **KONTRIBUTOR**

Arif Fadli	BNPB
Virana Fatwa Nurmala	BNPB
Denadia Mutty	BNPB
Rahma Sari Puspita	BNPB
Riski Yufawinda	BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

# Daftar Isi

- Pengantar .....2**
- Daftar Isi .....4**
  
- A. Materi Pembelajaran .....5**
  - A.1. Pengertian SPAB.....5
  - A.2. Ketangguhan Sekolah/Madrasah .....5
  
- B. Praktik Pembelajaran .....6**
  - B.1. Mengetahui Risiko Bencana Berbasis Sekolah/Madrasah .....6
  - B.2. Mengidentifikasi Kapasitas Sekolah/Madrasah .....9
  
- Daftar Pustaka .....20**

# A. Materi Pembelajaran

## A.1. PENGERTIAN SPAB

---

Indonesia telah berkomitmen melaksanakan Sekolah Aman Bencana – Safe School sejak tahun 2010 dengan meluncurkan kampanye satu juta sekolah dan rumah sakit aman di Indonesia. Komitmen ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala BNPB N0.4 Tahun 2012 tentang penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) yang menjadi landasan pelaksanaan penerapan pendidikan kebencanaan hingga saat ini.

Sejak diresmikannya Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) maka istilah SMAB berubah menjadi Satuan Pendidikan Bencana (SPAB) supaya lingkungannya lebih luas mencakup dari kelompok bermain hingga sampai ke tingkat SMA. Terdapat tiga aspek/pilar yang menjadi target dari program penguatan Pendidikan kebencanaan di sekolah, yaitu: (1) fasilitas pembelajaran yang aman bencana, (2) manajemen bencana di sekolah, dan (3) pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana di sekolah. Tiga pilar ini menjadi pendekatan dalam program pendidikan kebencanaan di Indonesia.

BNPB melakukan implementasi pendidikan kebencanaan yang komprehensif dalam SPAB mulai dari tahun 2015. Dengan melibatkan fasilitator nasional (fasnas) dan fasilitator daerah (fasda) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada 55 sekolah yang sudah difasilitasi implementasinya sejak 2015-2018. Selama tahun 2019 SPAB dilakukan bersama para Pembina Pramuka untuk 270 Gugus Depan di sekolah.

## A.2. KETANGGUHAN SEKOLAH/MADRASAH

---

Ketangguhan sekolah dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang, warga sekolah yang berpotensi terkena bahaya bencana untuk melawan, menyerap, menampung, dan memulihkan diri dari efek bahaya bencana pada waktu yang tepat dan dengan efisien; termasuk melalui perlindungan dan restorasi struktur dasar yang penting dan fungsinya. Oleh karenanya setiap warga sekolah perlu mengetahui risiko bencana yang berpotensi terjadi di lingkungannya. Tidak hanya risiko bencana di sekolahnya, namun juga risiko bencana yang ada pada lingkungan aktivitas harian Hap-Hap warga sekolah

Dalam konteks kemampuan bangunan huniannya, maka setiap warga sekolah perlu mengetahui dan memperkuat struktur bangunan rumahnya. Tidak hanya struktur bangunan rumah, namun juga infrastruktur rumah, fasilitas dan perabot yang ada di dalam sekolah. Selain struktur, setiap warga sekolah dapat mengelola ruang agar tidak membahayakan serta mempermudah evakuasi juga mengurangi dan menyelamatkan nyawa. Termasuk, kemudahan ketika akan menyelamatkan diri. Setiap warga sekolah di daerah rawan bencana perlu merencanakan cara evakuasi jika bencana terjadi. Perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan aktivitas sekolah. Permasalahan yang sering terjadi kita tidak punya

rencana evakuasi, dan belum pernah mencobanya. Evakuasi perlu dilakukan jika sewaktu-waktu terdapat tanda-tanda atau peringatan kejadian bencana. Evakuasi dilakukan untuk memastikan warga sekolah selamat jika terjadi bencana. Melalui simulasi evakuasi, kemampuan setiap warga dibangun agar berdaya melakukan evakuasi secara mandiri.

## B. Praktik Pembelajaran

### B.1. MENGENAL RISIKO BENCANA BERBASIS SEKOLAH/MADRASAH

Lembar kerja 1. Penilaian Tingkat Risiko Sekolah

<b>Sekolah :</b> .....			
<b>Alamat :</b> .....			
Data Guru Penanggung Jawab Kelas			
Nama Guru	Kelas	Usia	Kontak / Keterangan
Jenis Ancaman Bencana :			
Karakter	Keterangan		
Asal/Penyebab			
Faktor Perusak			
Tanda Peringatan			
Sela Waktu			
Kecepatan hadir			
Frekuensi			
Perioda			
Durasi			
Intensitas			
Posisi			

Tingkat Risiko			
Perkiraan Bentuk Risiko Sekolah	Kerentanan Sekolah	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/R/S)

Tabel 2.1 Contoh Penilaian Tingkat Risiko

<b>Sekolah : SD Budi Mulia 1</b>			
<b>Alamat : Jl. Patung Luhur, Manggarai</b>			
Data Guru Penanggung Jawab Kelas			
Nama	Kelas	Usia	Kontak/Keterangan
Pande Taman	1	55	
Putri Sari	2	50	
Siti Maimunah	3	45	
Luhut Lumban Gaol	4	40	
Ahmad Nasuha	5	35	
Dewi Shinta	6	30	
Jenis Ancaman: Gempa Bumi			
Karakter	Keterangan		
Asal/Penyebab	Efek Pergeseran lempeng bumi (tektonik) di banten		
Faktor Perusak	Getaran bumi yang kencang		
Tanda Peringatan	Getaran terjadi mulai dari kecil hingga kencang		
Sela Waktu	30 menit		
Kecepatan Hadir	15 detik		
Frekuensi	1 kali pada tahun 2020		
Perioda	Terjadi dalam 2 kali pada tahun 2020 dan terjadi 2 tahun terakhir		
Durasi	10-15 detik		
Intensitas	Besar getaran 5,4 magnitudo kedalaman H>300 KM		
Posisi	Banten		

Tingkat Risiko			
Perkiraan Bentuk Risiko Sekolah	Kerentanan Sekolah	Kapasitas Tersedia (untuk mengurangi risiko)	Tingkat Risiko (T/ R/S)
Terluka 25%, ISPA 90%, Mental 5%	Kurang pengetahuan tentang bencana, tidak memakai masker, trauma bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah warga sekolah 850, diadakan pelatihan Tagana (2xpelatihan,</li> <li>Tenaga PMR (60 kelas X, 19 kelas XI, 30 kelas XIII)</li> <li>Terdidik dan terlatih (75 OSIS dan polsis)</li> </ul>	R
Pohon tumbang dan terbakar, air keruh, sungai meluap,	Tertimbun material, pohon rapuh, sumur tidak ditutup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas lahan 3.5 ha</li> <li>Jauh dari sungai yang dialiri lahar hujan dan awan panas</li> </ul>	S
Gedungrusak, akses jalan terputus, listrik padam, jaringan terputus, hubungan singkat arus listrik	<p>Tidak kokoh, fasilitas gedung tidak standar, terhalangpohon, struktur jalan dan jembatan kurang kuat, instalasi listrik tidak standar, sambungan terminal tidak ditutup dengan benar</p> <p>Akses jalan dari sekolah menuju jalan utama rusak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gedung terpisah</li> <li>Memiliki 12 gedung dan jumlah kelas banyak</li> <li>Akses jalan lingkungan sekolah bagus dan terdapat jalur evakuasi</li> <li>Kapasitas listrik yang memadai</li> <li>Persediaan air cukup</li> <li>MCK mencukupi (30 toilet)</li> <li>Memiliki alat transportasi (2 mobil, 1 motor)</li> <li>Memiliki alat komunikasi jarak jauh dan alarm peringatan (2 buah)</li> </ul>	R
Kehilangan keluarga, komunikasi organisasi kurang	Kurangnya kesadaran tanggap bencana, apatis, mementingkan kepentingan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai hubungan komunikasi antar sesama yang baik</li> <li>Suasana yang aman tenang dan damai</li> </ul>	S
Fasilitas sekolah dan dokumen, kendaraan operasional rusak, dana bantuan hilang	Dokumen dan uang kurang terlindungi, penyimpanan kurang baik, tidak tersimpan dengan aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai dana taktis bencana</li> <li>Mempunyai dana sosial guru dan tenaga kependidikan</li> <li>Ada asuransi atas kendaraan sekolah.</li> </ul>	S



## B.2. MENGIDENTIFIKASI KAPASITAS SEKOLAH/MADRASAH

---

### B.2.1. Indikator 1. Lokasi Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana

#### B.2.1.a. Sub Indikator 1. Sejarah Bencana Alam

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
1	Terdapat garis sempadan bangunan di sekolah /madrasah kami.		
2	Sekolah/madrasah kami tidak terletak di lahan bekas pembuangan sampah akhir (TPA) dan daerah bekas pertambangan		
3	Bangunan sekolah/madrasah kami tidak pernah rusak akibat bencana alam.		
4	Bangunan sekolah/madrasah kami belum dibangun kembali/diperkuat setelah kerusakan terjadi.		

#### B.2.1.b. Sub Indikator 2. Kondisi Sekolah/ madrasah Terhadap Paparan Bencana Gempa Bumi

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
1	Bangunan sekolah/madrasah kami dirancang untuk tahan terhadap gempa.		
2	Pintu kelas dan gerbang sekolah/madrasah kami cukup lebar untuk penyelamatan saat gempa		
3	Sekolah/madrasah kami sudah memiliki penanda jalur evakuasi jika terjadi gempa bumi		
4	Sekolah/madrasah kami sudah memiliki penanda tempat berkumpul jika terjadi gempa bumi		
5	Sekolah/madrasah kami tidak berada pada wilayah rawan ancaman gempa bumi		
6	Sekolah/madrasah kami tidak berlokasi di daerah yang pernah terkena gempa bumi besar sebelumnya		
7	Sekolah/madrasah kami tidak memiliki vegetasi pohon yang membahayakan jika terjadi gempa bumi.		

B.2.1.c. Sub Indikator 3. Kondisi Sekolah/ madrasah Terhadap Paparan Bencana Tsunami

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
1	Sekolah/madrasah kami tidak berada pada wilayah yang rawan terjadinya kejadian bencana alam tsunami		
2	Sekolah/madrasah kami tidak berlokasi di daerah yang pernah terkena bencana alam tsunami sebelumnya		
3	Rancangan sekolah/madrasah kami sudah memiliki rancangan yang aman dari tsunami		
4	Sekolah/madrasah kami sudah memiliki penanda jalur evakuasi jika terjadi tsunami		
5	Sekolah/madrasah kami sudah memiliki penanda tempat berkumpul yang aman saat kejadian tsunami		

B.2.1.d. Sub Indikator 4. Kondisi Sekolah/Madrasah Terhadap Paparan Bencana Gunung Berapi

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
1	Sekolah/madrasah kami tidak berada pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Api		
2	Sekolah/madrasah kami tidak berlokasi di daerah yang dekat dengan aliran lahar dingin yang dapat meluap		
3	Sekolah/madrasah kami tidak pernah mengalami dampak erupsi gunung api sebelumnya		
4	Rancangan sekolah/madrasah kami sudah memperhitungkan resiko terpapar dampak erupsi gunung api		

B.2.1.e. Sub Indikator 5. Kondisi Sekolah/ madrasah Terhadap Paparan Bencana Longsor

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
1	Sekolah/madrasah kami tidak berada pada daerah berlereng curam yang sewaktu- waktu bisa longsor		
2	Sekolah/madrasah kami tidak berlokasi di daerah yang pernah terkena bencana tanah longsor sebelumnya		
3	Sekolah/madrasah kami jauh dari lokasi pusat kejadian bencana tanah longsor sebelumnya		
4	Rancangan sekolah/madrasah kami sudah memperhitungkan ancaman tanah longsor yang ada di sekitar		

B.2.1.f. Sub Indikator 6. Kondisi Sekolah/ madrasah Terhadap Paparan Bencana Kebakaran

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
1	Rancangan sekolah/madrasah kami sudah memperhitungkan resiko bencana kebakaran		
2	Pintu kelas dan gerbang sekolah/madrasah kami cukup lebar untuk penyelamatan saat kebakaran		
3	Sekolah/madrasah kami sudah memiliki penanda jalur evakuasi jika terjadi kebakaran		
4	Sekolah/madrasah kami sudah memiliki penanda tempat berkumpul jika terjadi kebakaran		
5	Sekolah/madrasah kami tidak berada pada wilayah permukiman padat yang rawan kebakaran		

B.2.1.g. Sub Indikator 7. Kondisi Sekolah/ madrasah Terhadap Paparan Bencana Bencana Lain

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
	Sekolah/madrasah kami tidak berada dalam wilayah rawan terhadap bencana lain. (..... ..... .....) .....		

## B.2.2. Indikator 2. Struktur Bangunan

### B.2.2.a. Sub Indikator 1. Pondasi

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
1	Ada sistem pondasi di bawah bangunan sekolah/madrasah.		

### B.2.2.b. Sub Indikator 2. Balok

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
1	Bangunan memiliki balok sloof/balok ikat pondasi.		
2	Bangunan sekolah/madrasah memiliki balok ring.		
3	Apakah balok terbebas dari kerusakan (retak, pecah, lepas dari ikatannya)?		
4	Sambungan pembesian (tulangan) tersambung secara kuat dan baik.		

### B.2.2.c. Sub Indikator 3. Kolom

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
1	Bangunan sekolah/madrasah memiliki kolom.		
2	Semua kolom terbebas dari kerusakan (retak, pecah, lepas dari ikatannya).		
3	Tiap sudut kolom yang terbuat dari kayu di atasnya mempunyai sokong diagonal.		

### B.2.2.d. Sub Indikator 4. Dinding

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
1	Dinding bangunan sekolah/madrasah terbuat dari bahan yang ringan.		
2	Dinding sekolah/madrasah bebas dari keretakan.		
3	Terdapat paku untuk mengkoneksikan dinding dengan kayu kusen.		

B.2.2.e. Sub Indikator 5. Atap

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
1	Atap bangunan terbuat dari material yang ringan.		
2	Penutup atap dihubungkan dengan baik pada rangka atap.		

B.2.3. Indikator 3. Desain dan Penataan Kelas

SUB INDIKATOR	No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
			Ya	Tidak
Dinding Partisi	1	Dinding partisi sudah diikatkan pada komponen-komponen terdekat.		
Langit-Langit	1	Plafon atau kisi-kisi sudah diikatkan dengan kuat ke sistem atap.		
Pintu dan Jendela	1	Pintu kelas terbuka keluar ruangan.		
	2	Jendela yang berkaca telah diberi ikatan silang antar sudutnya sebagai pengikat lateral pada struktur atau pada kaca dilapisi dengan plastik pengaman kaca sehingga saat terjadi gempa, pecahan kaca tidak akan membahayakan?		
Ornamen tetap	1	Benda-benda yang menggantung di langit-langit sudah dipastikan tidak akan bertabrakan satu sama lain ketika terjadi gempa?		
	2	Lampu-lampu sudah dipasang dengan kuat dan tepat pada tempatnya?		
	3	Tiang bendera sudah tertanam dengan baik dan kuat pada tempatnya?		
	4	Papan petunjuk di kawasan sekolah/madrasah sudah diikatkan dengan baik?		
	5	Genteng sudah diikatkan dengan baik pada struktur atap?		
Penataan tempat duduk	1	Apakah terdapat jarak yang memadai antara kursi dan meja siswa?		
	2	Apakah terdapat jarak yang memadai antar kursi siswa?		
	3	Apakah posisi duduk siswa berkebutuhan khusus telah memudahkannya untuk evakuasi?		
	4	Apakah tempat duduk siswa dan guru jauh dari benda-benda yang mungkin membahayakannya, missal lemari, rak buku, dll?		
Tangga	1	Apabila ada tangga, pegangan tangga sudah dijangkarkan dengan kuat dan dijangkarkan dengan baik?		

SUB INDIKATOR	No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
			Ya	Tidak
Aksesibilitas	1	Terdapat ramp untuk mendukung kemandirian mobilitas warga sekolah pengguna kursi roda termasuk kemandirian saat evakuasi dalam situasi bencana?		
	2	Terdapat guiding block untuk mendukung kemandirian mobilitas warga sekolah dengan kesulitan penglihatan termasuk kemandirian saat evakuasi dalam situasi bencana?		
Lantai dan Keramik	1	Lantai terbebas dari keretakan.		
	2	Keramik lantai masih dalam kondisi utuh.		
Sekitar	1	Terdapat tempat evakuasi atau lapangan terbuka.		
	2	Jalur evakuasi aman dari benda yang berjatuh.		
	3	Pohon mati atau rapuh sudah ditebang sehingga tidak akan jatuh/patah saat gempa terjadi.		

#### B.2.4. Indikator 4. Dukungan Sarana Dan Prasarana

SUB INDIKATOR	No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
			Ya	Tidak
Peralatan Listrik (telepon, televisi, komputer, lampu, kipas angin, dll)	1	Peralatan yang penting sudah diikatkan dengan baik untuk menghindari peralatan tersebut bergeser dari atas rak atau meja.		
	2	Telepon yang diletakkan di atas meja sudah cukup jauh dari tepi sehingga telepon tersebut tidak akan terjatuh.		
	3	Speakers /pengeras suara, computer, dan alat-alat elektronik lain sudah diikatkan dengan baik sehingga tidak menghambat jalur evakuasi saat terjadi bencana.		
	4	Informasi penting yang berada di dalam komputer sudah disimpan secara periodik ditempat lain sebagai cadangan.		
Perabotan	1	Rak-rak buku, filing cabinet sudah diangkurkan dengan baik pada dinding atau lantai.		
	2	Kondisi rak-rak buku, rak, filing cabinet masih dalam keadaan yang baik (tidak lapuk)?		
	3	Rak-rak buku sudah dilengkapi dengan penyangga atau kabel di tepi, untuk menjaga buku yang jatuh.		
	4	Barang-barang yang dapat pecah sudah berada pada tempat yang cukup stabil dan aman.		
	5	Rak-rak yang menyimpan peralatan P3K terletak pada tempat yang mudah diakses dan tidak mudah rusak.		

SUB INDIKATOR	No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
			Ya	Tidak
	6	Rak-rak yang beroda sudah ditahan/di-block untuk menghindari rak tersebut meluncur saat gempa.		
	7	Meja terbuat dari bahan yang cukup kuat untuk menahan jatuhnya reruntuhan.		
	8	Sudut-sudut meja sudah diratakan dan dibuat tumpul untuk menghindari adanya cedera		
	9	Terdapat tas siaga berisi tas perlengkapan darurat termasuk perlengkapan pertolongan pertama di setiap kelas?		
	10	Di dalam setiap kelas terdapat denah jalur evakuasi?		
	11	Terdapat pemadam kebakaran di setiap kelas?		
Gambar dan Papan	1	Gambar, papan, dan hiasan dinding sudah dipasang dengan kuat pada dinding dan terletak pada lokasi yang tidak membahayakan.		
Bahan-Bahan Berbahaya dan Beracun	1	Barang-barang kimia sudah disimpan sesuai rekomendasi dari pabrik yang membuatnya.		
	2	Tabung gas LPG sudah diamankan dengan baik dan tertutup dengan kencang.		
Utilitas dan Sekitarnya	1	Sambungan pada perpipaan cukup kuat untuk menghindari kerusakan pada gempa saat terjadi.		
	2	Perpipaan terletak pada jalur evakuasi.		
Utilitas yang Lain	1	Tersedia tabung pemadam api.		
	2	Kotak pemadam api sudah diikat dengan aman.		
	3	Tabung pemadam api diamankan dengan pengikat yang mudah dilepaskan.		
Peralatan Listrik	1	Tempat/pipa kabel sudah diikat secara lateral sehingga tidak mudah terlepas dari ikatannya.		

### B.2.5. Indikator 5. Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
1	Sekolah/madrasah memiliki mata pelajaran yang memuat sejarah kebencanaan di lingkungan sekolah/ madrasah.		
2	Sekolah/madrasah memiliki mata pelajaran yang memuat kerentanan manusia dan sumber daya kehidupan dalam kaitannya dengan bencana.		
3	Sekolah/madrasah memiliki mata pelajaran yang memuat kapasitas manusia dan sumber daya kehidupan dalam kaitannya dengan bencana.		
4	Sekolah/madrasah memiliki mata pelajaran yang memuat upaya pengurangan resiko bencana di lingkungan sekolah/madrasah.		
5	Sekolah/madrasah memiliki ekstrakurikuler yang mendidik anak untuk melakukan kegiatan pengamatan tentang bahaya/ancaman bencana di lingkungan sekolah/madrasah.		
6	Sekolah/madrasah memiliki ekstrakurikuler yang mendidik anak untuk melakukan penilaian kapasitas dan kerentanan sekolah/madrasah secara struktural		
7	Sekolah/madrasah memiliki ekstrakurikuler yang mendidik anak untuk melakukan penilaian kapasitas dan kerentanan sekolah/madrasah secara non struktural		
8	Sekolah/madrasah memiliki kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dalam upaya pengurangan resiko bencana di sekolah/madrasah.		
9	Sekolah/madrasah pernah mengadakan sosialisasi mengenai penerapan sekolah/ madrasah aman dari bencana untuk seluruh warga sekolah/madrasah termasuk anak.		
10	Sosialisasi penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali		
11	Simulasi evakuasi bencana tertentu (misal banjir, longsor, gempa/tsunami, dll) dengan melibatkan seluruh warga sekolah termasuk warga sekolah berkebutuhan khusus dilaksanakan secara rutin minimal 3 kali dalam satu tahun?		
12	Sekolah/madrasah pernah mengadakan kegiatan pelatihan kesiapsiagaan yang melibatkan warga sekolah/ madrasah termasuk anak.		
13	Kegiatan pelatihan kesiapsiagaan yang melibatkan warga sekolah/ madrasah termasuk anak dilaksanakan secara berkala minimal 1 tahun sekali.		
14	Sekolah telah mempertimbangkan kemampuan seluruh warga sekolah termasuk kemampuan warga sekolah berkebutuhan khusus dalam memahami dan mempraktikkan pengetahuan PRB		



### B.2.6. Indikator 6. Kebijakan Sekolah/Madrasah

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
1	Ada pernyataan tertulis di dalam program sekolah/madrasah yang mendukung upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di sekolah/madrasah.		
2	Ada pernyataan tertulis dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah yang mendukung upaya PRB di sekolah/madrasah.		
3	Sekolah/madrasah memiliki majalah dinding/buku/ modul/poster/media lainnya yang memuat pengetahuan dan informasi mengenai PRB yang dapat diakses oleh seluruh warga sekolah /madrasah termasuk anak berkebutuhan khusus.		
4	Ada warga sekolah/madrasah yang berpartisipasi dalam kegiatan PRB yang diadakan oleh pihak luar (contoh: pelatihan, musyawarah guru, jambore murid, dsb)		
5	Setiap warga sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan PRB yang diadakan oleh pihak luar (contoh: pelatihan, musyawarah guru, jamboree murid, dsb)		
6	Sekolah/Madrasah pernah mengintegrasikan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah		
7	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah setiap tahun mencantumkan kegiatan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural		
8	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah setiap tahun mencantumkan kegiatan penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana secara non structural		

### B.2.7. Indikator 7. Perencanaan Kesiapsiagaan

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
1	Sekolah/madrasah memiliki dokumen hasil penilaian kerentanan dan kapasitas sekolah/madrasah terhadap ancaman bencana di lingkungan sekolah/madrasah.		
2	Dokumen hasil penilaian kerentanan dan kapasitas sekolah/madrasah terhadap ancaman bencana di lingkungan sekolah /madrasah disusun secara partisipatif termasuk melibatkan anak perempuan dan laki-laki		
3	Dokumen hasil penilaian kerentanan dan kapasitas sekolah/madrasah terhadap ancaman bencana di lingkungan sekolah/madrasah diperbaharui secara berkala.		
4	Ada kesepakatan tertulis mengenai peran dan tanggung jawab warga sekolah/madrasah jika terjadi bencana.		

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
5	Warga sekolah/madrasah termasuk anak secara aktif dan partisipatif merancang jalur dan rambu evakuasi yang mudah dibaca dan diikuti, baik di dalam maupun di luar kelas.		
6	Warga sekolah/madrasah termasuk anak secara aktif dan partisipatif membuat Peta Evakuasi		
7	Warga sekolah/madrasah termasuk anak menyepakati lokasi titik kumpul untuk evakuasi bersama orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar		
8	Sekolah/madrasah memiliki prosedur tetap tentang evakuasi terintegrasi jika terjadi bencana		
9	Sekolah/madrasah pernah mengadakan simulasi prosedur tetap evakuasi terintegrasi.		
10	Sekolah/madrasah mengadakan simulasi prosedur tetap evakuasi terintegrasi secara berkala minimal 1 tahun sekali		
11	Sekolah/madrasah pernah mengadakan simulasi evakuasi bencana yang diikuti oleh anak, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan warga sekolah lainnya, termasuk anak berkebutuhan khusus.		
12	Warga sekolah/madrasah termasuk anak memperbaharui rencana evakuasi terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi setelah simulasi dilaksanakan.		
13	Simulasi evakuasi bencana yang diikuti oleh seluruh warga sekolah/madrasah termasuk anak berkebutuhan khusus, komite sekolah, dan warga sekolah lainnya, termasuk anak dilakukan secara berkala.		
14	Simulasi tersebut diikuti oleh warga di lingkungan sekitar sekolah/madrasah.		
15	Perencanaan kesiapsiagaan sekolah mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan semua warga sekolah termasuk warga sekolah dengan kebutuhan saat dalam situasi bencana?		

### B.2.8. Indikator 8. Mobilisasi Sumber Daya

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
1	Sekolah/madrasah memiliki ruang UKS termasuk obat P3K untuk pertolongan pertama yang dapat digunakan segera setelah bencana terjadi.		
2	Sekolah/madrasah memiliki tandu/tali/ tambang, terpal/tenda/alat-alat keselamatan lainnya.		
3	Peserta didik di sekolah/madrasah melembagakan kegiatan PRB di bawah koordinasi OSIS		
4	Ada peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus terlibat dalam kegiatan PRB di sekolah/madrasah sebagai perencana		

No	PERTANYAAN KUNCI	JAWABAN	
		Ya	Tidak
5	Ada peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus terlibat dalam kegiatan PRB di sekolah/madrasah sebagai pelaksana		
6	Ada peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus terlibat dalam kegiatan PRB di sekolah/madrasah sebagai tim monitoring dan evaluasi		
7	Sekolah memiliki mekanisme dukungan untuk memastikan anak berkebutuhan khusus terlibat dalam upaya kesiapsiagaan bencana dan tidak tertinggal saat situasi bencana.		
8	Sekolah/madrasah mengadakan pertemuan dengan pihak guru, peserta didik, komite sekolah/madrasah, petugas administrasi dan warga sekolah/madrasah lainnya untuk memperkenalkan upaya PRB di sekolah/madrasah.		
9	Pertemuan internal tersebut dilakukan secara rutin/berkala.		
10	Sekolah/madrasah membentuk satuan tugas penanggulangan bencana yang melibatkan guru, peserta didik, komite sekolah/madrasah, petugas administrasi dan warga sekolah/madrasah lainnya		
11	Sekolah/madrasah pernah mengadakan pertemuan eksternal dengan warga di sekitar lingkungan sekolah/madrasah, warga desa/kelurahan/kecamatan/ perwakilan BPBD/lembaga pemerintahan lainnya untuk memperkenalkan upaya PRB di lingkungan sekitar sekolah/ madrasah.		
12	Pertemuan eksternal tersebut dilakukan secara rutin/berkala.		

## Daftar Pustaka

Anonim, 2007, Undang Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Anonim, 2012, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

Anonim, 2013, Panduan Sekolah Aman Bencana Modul Panduan Penyuluh KATANA 2019.

# Standar Pelayanan Minimal

Modul Teknis Fasilitas Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



# Standar Pelayanan Minimal

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



**Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputan Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

## **Modul Standar Pelayanan Minimal**

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

### **PENGARAH**

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB  
Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

### **PENANGGUNGJAWAB**

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB  
Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

### **EDITOR**

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

### **PENYUSUN**

Sigit Purwanto	Pujiono Centre
Sumino	LPTP Surakarta
Wahyu Heniwati	Daya Annisa / MDMC
Anggoro Budi Prasetyo	Aksara
Wana Kristanto	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Indra Baskoro Adi	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Muhammad Nur Ronggo Dinoyo	LPTP Surakarta
Gandar Mahojwala	KAPPALA Indonesia
Pudji Santosa	Lingkar
Gigih Aditya Pratama	KAPPALA Indonesia
Yugyasmono	Lingkar
Hadi Sutrisno	BNPB
Nurul Maulidhini	BNPB

### **KONTRIBUTOR**

Arif Fadli	BNPB
Virana Fatwa Nurmala	BNPB
Denadia Mutty	BNPB
Rahma Sari Puspita	BNPB
Riski Yufawinda	BNPB

Direktorat Kesiapsiagaan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021



# Daftar Isi

<b>Pengantar</b> .....	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>4</b>
<b>A. Materi Pembelajaran</b> .....	<b>5</b>
A.1. Standar Pelayanan Minimal.....	5
A.2. Prinsip Desa Dan Kelurahan Tangguh Bencana .....	5
A.3. Indikator Desa an Kelurahan Tangguh Bencana.....	6
A.3.1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan .....	6
A.3.2. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.....	7
A.3.3. Standar Pelayanan Transportasi .....	7
A.3.4. Standar Layanan Penyediaan Air Bersih.....	7
A.3.5. Standar Pelayanan Pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi melalui BUMDes .....	8
A.3.6. Standar Pelayanan Komunikasi / Informasi.....	8
A.3.7. Standar Pelayanan Administrasi dan kependudukan .....	9
A.3.8. Standar Layanan Lingkungan Hidup .....	10
A.3.9. Standar Pelayanan Keagamaan.....	10
A.3.10. Standar Pelayanan Aktivitas Kebudayaan.....	10
A.3.11. Standar Pelayanan Perlindungan dan Keamanan.....	11
A.3.12. Standar Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	11
A.3.13. Standar Pelayanan Pangan dan Gizi.....	12
A.3.14. Standar Pelayanan Khusus (Difabel).....	12
<b>B. Praktik Pembelajaran</b> .....	<b>14</b>

# A. Materi Pembelajaran

## A.1. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

---

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal

SNI 8357:2017, Desa dan kelurahan tangguh bencana dirumuskan dengan tujuan sebagai standar penerapan desa atau kelurahan tangguh bencana. SNI Desa dan kelurahan tangguh bencana ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam melakukan upaya pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat termasuk di dalamnya adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim yang banyak diinisiasi baik oleh kementerian/lembaga, organisasi non pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat desa dan kelurahan itu sendiri.

Dengan penerapan SNI Desa dan kelurahan tangguh bencana, diharapkan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana tersebut dapat secara nyata berkontribusi dalam penurunan risiko bencana termasuk dampak perubahan iklim melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan pelibatan langsung masyarakat termasuk didalamnya kelompok rentan dan kelompok marginal lainnya.

SNI 8357:2017 menetapkan persyaratan desa dan kelurahan tangguh bencana yang mencakup istilah, prinsip dan indikator. Standar ini hendaknya dilakukan oleh masyarakat di daerah rawan bencana dalam rangka memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi bahaya bencana dan dampak buruk perubahan iklim, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak yang merugikan. Standar ini dapat menjadi acuan standar yang lebih spesifik untuk desa atau kelurahan sesuai dengan jenis bahaya.

## A.2. PRINSIP DESA DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA

---

SNI 8357:2017 memandatkan, desa dan kelurahan tangguh bencana harus mempunyai prinsip-prinsip (1) menggunakan pendekatan multi bahaya; (2) berdasarkan asas perlindungan masyarakat dan berfokus pada upaya pengelolaan risiko; (3) berpusat pada masyarakat dengan mengutamakan kemandirian dan alokasi sumberdaya lokal; (4) merupakan gerakan kolektif dengan melibatkan dan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan; (5) berbasis pada kaidah ilmu pengetahuan dan kearifan lokal; (6) dilakukan secara berkala; (7) memperhatikan prinsip akuntabilitas sosial; dan integrasi ke dalam perencanaan pembangunan.

### **A.3. INDIKATOR DESA AN KELURAHAN TANGGUH BENCANA**

---

Desa dan kelurahan tangguh bencana mempunyai 2 indikator, yaitu indikator dasar dan indikator hasil. Indikator dasar merupakan “prasyarat dasar” untuk desa tangguh tersebut dapat dipenuhi. Indikator dasar terdiri dari (1) penguatan kualitas dan akses pelayanan dasar, dan (2) adanya penguatan sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana. Penjabaran dan indikator layanan dasar ini pada dasarnya merupakan indikator-indikator standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi, berupa: (1) adanya penguatan kualitas layanan dan akses pendidikan formal maupun non formal; (2) adanya penguatan kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua masyarakat; (2) adanya penguatan infrastruktur khususnya bidang ekonomi, energi, kesehatan, pendidikan, sanitasi, komunikasi dan informasi; (3) adanya penguatan sarana dan aksesibilitas transportasi; (4) adanya penguatan pelayanan publik oleh pemerintahan desa dan kelurahan; (5) adanya penguatan sistem informasi desa dan kelurahan yang memadai; (6) adanya penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang mandiri dan sumberdaya manusia yang berkualitas; (7) adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan; (8) adanya penguatan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat; dan (9) adanya perlindungan keamanan masyarakat.

Indikator-indikator tersebut pada dasarnya diwujudkan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) berbagai kementerian dan lembaga. SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar pelayanan minimal SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Beberapa Standar Pelayanan Minimal yaitu :

#### **A.3.1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan**

---

##### **A.3.1.1 Mandat**

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

##### **A.3.1.2 Standar Pelayanan Wajib di desa**

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang wajib ada desa/kelurahan sebagai kewajiban pemerintah memenuhi anak - anak usia sekolah di desa adalah :

##### **A.3.1.3 Referensi**

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan [1]
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) [2]

### **A.3.2. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan**

---

#### A.3.2.1 Mandat

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

#### A.3.2.2 Standar Pelayanan Wajib di desa

SPM Kesehatan yang wajib ada desa/kelurahan sebagai kewajiban pemerintah memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat di desa adalah :

- Bidan Desa : setiap satu bidan maksimal memberikan pelayanan 1000 Jiwa di desa/kelurahan dilayani oleh 1 Bidan
- Pusat kesehatan Masyarakat Pembantu: Setiap pusat kesehatan pembantu maksimal melayani 1500 Jiwa
- Puskesmas: setiap satu puskesmas maksimal memberikan pelayanan : 16.000 jiwa

#### A.3.2.3 Referensi

- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia [\[3\]](#)

### **A.3.3. Standar Pelayanan Transportasi**

---

#### A.3.3.1 Mandat

Standar pelayanan Transportasi merupakan Ketentuan mengenai pemberian pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur

#### A.3.3.2 Standar Pelayanan Transportasi yang Wajib di desa

Standar Pelayanan Minimal Transportasi yang wajib ada desa/kelurahan sebagai kewajiban pemerintah memenuhi pelayanan transportasi kepada masyarakat di desa adalah :

- Kondisi infrastruktur : kekuatan (tonase), perkuatan dan lebar jalan.
- Kondisi dan jenis alat transportasi darat dan air.

#### A.3.3.3 Referensi

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
- Permendagri no 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### **A.3.4. Standar Layanan Penyediaan Air Bersih**

---

#### A.3.4.1 Mandat

Standar pelayanan air bersih merupakan Ketentuan mengenai penyediaan air bersih secara berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat

#### A.3.4.2 Standar Pelayanan Penyediaan Air Bersih yang Wajib di desa

Standar Pelayanan Minimal Penyediaan Air Bersih yang wajib ada desa/kelurahan sebagai kewajiban pemerintah menyediakan akses air bersih di desa adalah :

- Menyediakan air bersih secara berkelanjutan yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % (rata-rata) masyarakat
- Kebutuhan pokok minimal air bersih adalah 60 liter atau 0,06 meter kubik per orang per hari

#### A.3.4.3 Referensi

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### **A.3.5. Standar Pelayanan Pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi melalui BUMDes**

---

#### A.3.5.1 Mandat

Adanya perlindungan, pemberdayaan dan kemudahan bagi usaha mikro, kecil dan koperasi dalam rangka pengelolaan dan pengembangan ekonomi pedesaan secara terpadu.

#### A.3.5.2 Standar pelayanan pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi melalui BUMDes yang Wajib di desa

Standar pelayanan pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi melalui BUMDes yang wajib ada desa/kelurahan diberikan pemerintah kepada masyarakat di desa/kota adalah:

- Adanya penyediaan sarana dan prasarana pengembangan usaha mikro, kecil dan koperasi
- Pengembangan ekonomi lokal melalui BUMDES
- Adanya program pelatihan dan pendampingan UMKM dan koperasi
- Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian

#### A.3.5.3 Referensi

- PP No 7 tahun 2021 Tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.
- Permendagri No.20 tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **A.3.6. Standar Pelayanan Komunikasi / Informasi**

---

#### A.3.6.1 Mandat

Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui kelurahan/desa serta adanya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan.

#### A.3.6.2 Standar Pelayanan Komunikasi / Informasi

Standar Pelayanan Komunikasi / Informasi yang wajib disediakan pemerintah di desa/kelurahan kepada masyarakat di desa/kota adalah :

- Adanya jaringan/ sinyal untuk komunikasi dapat berupa: telepon (seluler/ kabel), internet, radio atau televisi.
- Sistem Informasi Desa

#### 1.3.6.3 Referensi

- Permen Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010
- Permendagri No. 46, 47, dan 110 tahun 2016 Digitalisasi Administrasi Desa.
- Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Standar Pelayanan Minimal Desa, SPM Desa ditetapkan dan diputuskan oleh Kepala Desa (Pasal 4). Ruang lingkup SPM Desa meliputi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat (Pasal 5). Pasal 11 ayat 4, Desa harus memiliki sarana dan prasarana Minimal.
- Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ini mengatur sistem pembuktian dari informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik yang secara rinci dituangkan dalam Pasal 5 sampai Pasal 12

### **A.3.7. Standar Pelayanan Administrasi dan kependudukan**

---

#### A.3.7.1 Mandat

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/ walikota

Untuk meningkatkan akses penduduk kepada Pelayanan Adminduk Daring, pemerintah daerah dapat membangun Kios Pelayanan Adminduk Daring pada desa dan/atau kelurahan.

#### A.3.7.2 Standar **P**elayanan Administrasi dan kependudukan

Standar **P**elayanan Administrasi dan kependudukan yang wajib disediakan pemerintah di desa/kelurahan kepada masyarakat di desa/kelurahan adalah :

- Adanya layanan administrasi dan kependudukan selama 24 jam.

#### 1.3.7.3 Referensi

- UU No 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

### **A.3.8. Standar Layanan Lingkungan Hidup**

---

#### A.3.8.1 Mandat

Ketentuan mengenai jenis dan baku mutu **pelayanan** dasar **bidang lingkungan hidup** yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara **minimal**

#### A.3.8.2 Standar Pelayanan Lingkungan Hidup

Standar Pelayanan Lingkungan Hidup yang wajib disediakan pemerintah di desa/kelurahan kepada masyarakat di desa/kelurahan adalah :

- Adanya program dan kegiatan pengelolaan/perlindungan lingkungan hidup (contoh: pengelolaan sampah cair/padat, gotong royong rutin pemeliharaan lingkungan, penghijauan, konservasi air dan tanah)

#### A.3.8.3 Referensi

- Peraturan MENLH Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

### **A.3.9. Standar Pelayanan Keagamaan**

---

#### A.3.9.1 Mandat

Ketentuan mengenai peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama

#### A.3.9.2 Standar Pelayanan Keagamaan

Standar Pelayanan Aktivitas Keagamaan yang wajib disediakan pemerintah di desa/kelurahan kepada masyarakat di desa/kelurahan adalah :

- Ada tempat ibadah
- Adanya kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan.

#### A.3.9.3 Referensi

- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat

### **A.3.10. Standar Pelayanan Aktivitas Kebudayaan**

---

#### A.3.10.1 Mandat

Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan minimal bidang kesenian di wilayah kerjanya

#### A.3.10.2 Standar Pelayanan Aktivitas Kebudayaan

Standar Pelayanan Aktivitas Kebudayaan yang wajib disediakan pemerintah di desa/kelurahan kepada masyarakat di desa/kelurahan adalah :

- Adanya program dan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

#### A.3.10.3 Referensi

- Peraturan Mendikbud Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.

### **A.3.11. Standar Pelayanan Perlindungan dan Keamanan**

---

#### A.3.11.1 Mandat

Ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar di Bidang Perlindungan dan Keamanan yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

#### 1.3.11.2 Standar **P**elayanan Perlindungan dan Keamanan

Standar Pelayanan Perlindungan dan Keamanan yang wajib disediakan pemerintah di desa/kelurahan adalah :

- Adanya petugas Linmas, Babinsa
- Adanya sarana dan prasarana ketertiban dan keamanan
- Adanya patroli/ronda secara rutin

#### A.3.11.3 Referensi

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

### **A.3.12. Standar Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

---

#### A.3.12.1 Mandat

Bahwa Perempuan dan anak merupakan kelompok yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapat perlindungan.

#### A.3.12.2 Standar **P**elayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Standar Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang wajib disediakan pemerintah di desa/kelurahan adalah :

- Program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

#### A.3.12.3 Referensi

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan
- Permendagri No.20 tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga.



### **A.3.13. Standar Pelayanan Pangan dan Gizi**

---

#### A.3.13.1 Mandat :

Standar pelayanan pangan dan gizi merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Pangan dan Gizi yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan juga merupakan pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

#### A.3.13.2 Standar **P**elayanan Pangan dan Gizi

Standar Pelayanan Pangan dan Gizi yang wajib disediakan pemerintah di desa/kelurahan adalah:

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan:
  - Ketersediaan energi dan protein perkapita 90% dari kebutuhan penduduk
  - Penguatan cadangan pangan 60% dari kebutuhan penduduk .
- b. Distribusi dan Akses Pangan:
  - Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% dari kebutuhan penduduk
  - Stabilitas harga dan pasokan pangan 90% dari kebutuhan penduduk
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:
  - Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% dari kebutuhan penduduk
  - Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% dari kebutuhan penduduk .
- d. Penanganan Kerawanan Pangan: Penanganan daerah rawan pangan 60% dari kebutuhan penduduk

#### A.3.13.3 Referensi

- Peraturan Menteri Pertanian No 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

### **A.3.14. Standar Pelayanan Khusus (Difabel)**

---

#### A.3.14.1 Mandat

Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar khusus difabel yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

#### A.3.14.2 Standar **P**elayanan Khusus Difabel

Dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Namun dalam modul ini menggunakan istilah difabel, lebih halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas.

Standar Pelayanan Khusus (difabel) yang wajib disediakan pemerintah di desa/kelurahan adalah :

- Adanya program dan kegiatan layanan difabel

A.3.14.3 Referensi :

- UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota

## B. Praktik Pembelajaran

Mari kita lengkapi lembar kerja di bawah, yang menunjukkan bidang dan jenis layanan minimal yang ada di desa, ketercukupan rasio (perbandingan) serta rekomendasi atas kebutuhan tersebut. Kita bisa mencermati lagi peraturan-peraturan pemerintah di tingkat kementerian / lembaga yang membidangi hal tersebut.

Lembar Kerja 1: Bidang dan Jenis Layanan Minimal di Desa

No	Bidang	Jenis Layanan	Jumlah	Rasio Ketercukupan	Rekomendasi
1	Pendidikan	SD/MI		< 1000 > 1000	
2	Kesehatan	Bidan		< 1000 > 1000	
		Pusat kesehatan Masyarakat Pembantu		<1500 >1500	
		Puskesmas		<16.000 >16.000	
3	Transportasi	Kondisi infrastruktur			
		alat transportasi umum (darat/air)		< Dapat dilalui kendaraan roda 4	
5	Air Bersih	Penyediaan Air Bersih		<60 liter/orang/hari >60 liter/orang/hari	
4	Ekonomi	Pelayanan UMKM desa		<2,5 juta/usaha mikro >2,5 juta/usaha mikro	
		Pelatihan dan pendampingan UMKM		ada/tidak	
		Pengembangan ekonomi melalui BUMDes		modal usaha bersumber 51% dari desa dan 49 % dari masyarakat	
5	Komunikasi / Informasi	Adanya jaringan/ sinyal untuk komunikasi dapat berupa: telepon (seluler/ kabel), internet, radio atau televisi. Sistem Informasi Desa			

No	Bidang	Jenis Layanan	Jumlah	Rasio Ketercukupan	Rekomendasi
6	Administrasi dan Kependudukan	Kios Pelayanan Adminduk Daring pada desa dan/atau kelurahan			
7	Lingkungan Hidup	Pelayanan pengelolaan sampah/limbah			
8	Keagamaan	Pos pengaduan masalah keagamaan			
		Memiliki forum keagamaan			
		Memiliki tempat ibadah			
9	Kebudayaan	Pagelaran seni pertunjukan/sarasehan			
		Sarana dan prasarana kebudayaan			
		Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan			
10	Keamanan	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			
		Peningkatan kapasitas tenaga keamanan / Ketertiban (Satlinmas) Desa			
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			
12	Layanan Pangan dan Gizi	Program dan kegiatan makanan tambahan			
		Program BPNT			
13	Layanan Khusus (Difabel)	Program Pendampingan Layanan Jamkesus Difabel Berbasis Puskesmas			
		Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang difabel			

# Teknik Fasilitasi

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa



# Teknik Fasilitasi

---

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

2021



DIREKTORAT PENCEGAHAN  
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

# Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputan Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

## **Teknik Fasilitasi**

Modul Teknis Fasilitasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
dan Program Pengembangan Ketangguhan Serupa

### **PENGARAH**

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB  
Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

### **PENANGGUNGJAWAB**

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB  
Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

### **EDITOR**

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta

### **PENYUSUN**

Sigit Purwanto	Pujiono Centre
Sumino	LPTP Surakarta
Wahyu Heniwati	Daya Annisa / MDMC
Anggoro Budi Prasetyo	Aksara
Wana Kristanto	PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta
Indra Baskoro Adi	PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta
Muhammad Nur Ronggo Dinoyo	LPTP Surakarta
Gandar Mahojwala	KAPPALA Indonesia
Pudji Santosa	Lingkar
Gigih Aditya Pratama	KAPPALA Indonesia
Yugyasmono	Lingkar
Hadi Sutrisno	BNPB
Nurul Maulidhini	BNPB

### **KONTRIBUTOR**

Arif Fadli	BNPB
Virana Fatwa Nurmala	BNPB
Denadia Mutty	BNPB
Rahma Sari Puspita	BNPB
Riski Yufawinda	BNPB

Direktorat Pencegahan  
Kedeputian Bidang Pencegahan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021



# Daftar Isi

<b>Pengantar</b> .....	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>4</b>
<b>A. Materi Pembelajaran</b> .....	<b>5</b>
A.1. Pengertian Dasar Fasilitator .....	5
A.2. Kemampuan Fasilitator .....	5
A.3. Aturan Main Fasilitator .....	7
A.3.1. Kerja Dalam Tim .....	7
A.3.2. Tidak Menjatuhkan Martabat Peserta .....	7
A.3.3. Membantu Sesama Fasilitator .....	7
A.3.4. Hadir Secara Utuh .....	7
A.3.5. Bersikap Adil .....	7
A.3.6. Tidak Menyalahkan Pendapat .....	7
A.3.7. Tidak Merasa Lebih Pintar .....	8
A.3.8. Berbicara Jelas dan Gunakan Kalimat Tegas .....	8
A.3.9. Banyak Akal Mencairkan Suasana .....	8
A.3.10. Mempunyai Rencana .....	8
A.3.11. Datang Lebih Awal .....	8
A.3.12. Kenali Karakter Peserta .....	8
A.3.13. Tidak Menjawab Pertanyaan .....	8
A.3.14. Sikap Tubuh .....	9
A.4. Situasi Menantang Bagi Fasilitator .....	9
A.4.1. Peserta Pasif .....	9
A.4.2. Peserta Mendominasi Pembicaraan .....	10
A.4.3. Forum dalam Forum .....	10
A.5. Jenis Pertanyaan Fasilitator .....	11
A.6. Menyusun Rencana Fasilitasi .....	12
A.7. Melakukan Simulasi dan Persiapan Fasilitasi .....	13
A.8. Pada Saat Fasilitasi dan Setelah Sesi .....	14
<b>B. Praktik Pembelajaran</b> .....	<b>16</b>
B.1. Menguraikan Tujuan Pembelajaran Dan Indikator Keberhasilan .....	16
B.2. Menjelaskan Pengertian, Tugas, Fungsi, Aturan Main, Pertanyaan Kunci Fasilitasi .....	16
B.3. Menjelaskan Rencana Dan Praktik Fasilitasi .....	16
B.4. Evaluasi (penguatan) Materi dengan Tanya Jawab .....	17
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>18</b>

## A. Materi Pembelajaran

### A.1. PENGERTIAN DASAR FASILITATOR

---

Fasilitator memiliki peran penting dalam memberikan pelajaran, memahami, dan memutuskan permasalahan dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Fasilitator dibutuhkan untuk memandu diskusi yang panjang dan melihat dari berbagai sudut pandang karena permasalahan yang rumit. Keberadaan fasilitator ini adalah untuk pengelola dan memandu kelancaran diskusi. Fasilitator memiliki tugas untuk memastikan semua pihak berperan aktif dalam diskusi dan menyampaikan pendapat, memastikan semua pendapat dihargai, memastikan arah diskusi tidak melenceng dari persoalan, memastikan hasil diskusi mengerucut pada satu kesimpulan bersama.
2. Fasilitator dibutuhkan karena persoalan tersebut melibatkan banyak pihak dengan latar belakang dan kepentingan berbeda-beda. Di sini Fasilitator menjadi jembatan agar kepentingan semua pihak dihargai dan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bersama.
3. Fasilitator dibutuhkan untuk meyakinkan semua pihak agar mau bertemu, mengatur kesempatan jadwal, menyediakan atau menyiapkan tempat dan perlengkapannya. Karena para pihak belum saling kenal, memiliki beragam kesibukan masing-masing dan saling terpisah jarak sehingga tidak mudah untuk saling bertemu.
4. Fasilitator dibutuhkan jika persoalan yang akan dibahas merupakan hal baru dan belum dipahami semua pihak. Di sini Fasilitator berperan sebagai pembawa pesan adanya persoalan baru. Fasilitator dapat menghadirkan pihak berkompeten atau memiliki kapasitas menyampaikan persoalan apabila persoalan tersebut di luar kemampuannya.

Keempat tuntutan di atas harus bisa dipenuhi oleh fasilitator sekaligus dalam waktu bersamaan.

### A.2. KEMAMPUAN FASILITATOR

---

Seorang Fasilitator wajib memiliki sifat-sifat dasar agar mampu menjalankan peranannya, sifat dasar itu adalah keinginan dan kemauan untuk belajar, selalu memperbaiki diri, dan tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun. Seorang fasilitator sukses selalu belajar dari kegagalan dan memperbaiki.

Kemampuan fasilitator akan semakin meningkat seiring dengan “jam terbang” yang mereka miliki. Namun semua itu didapatkan jika berani memulai dan mencoba serta belajar dari kegagalan. Ada beberapa aspek kemampuan lain bisa kita bandingkan dengan guru yaitu:

Tabel 1 Perbedaan Guru dan Fasilitator

No	Aspek	Guru	Fasilitator
1	Pendekatan	Paedagogy (pendidikan konvensional)	Andragogy (pendidikan orang dewasa)
2	Substansi	Memberi informasi/pengetahuan	Menggali informasi / pengetahuan dan memandu membuat sintesis
3	Syarat	Berpendidikan Sarjana	Pendidikan formal untuk Fasilitator bukan menjadi ukuran utama
4	Kemampuan	Khusus, fakultatif dan lebih tinggi dibanding anak didik	Punya pengalaman khusus, tetapi juga mempunyai pengetahuan umum yang luas
5.	Bahasa	Resmi	Sederhana, bisa dipahami anggota kelompok belajar
6	Cara penyampaian/gaya komunikasi	Lebih banyak menggunakan komunikasi satu arah	Mengutamakan interaksi aktif kelompok belajar, dialog, egaliter
7	Penampilan	Resmi - berseragam	Pakaian sopan, sebaiknya menyesuaikan dengan kondisi kelompok belajar
8	Hasil	Berupa nilai dalam angka	Penyelesaian masalah yang dihadapi kelompok belajar
9	Tempat	Sekolah - Gedung	Bisa di mana saja, yang penting tidak terlalu terganggu dengan keadaan eksternal
10	Pengaturan tempat	Klasikal	Melingkar atau berbentuk U, bisa menggunakan meja – kursi atau lesehan
11	Suasana	Formal - kaku	Lebih santai, sangat fleksibel
12	Proses	Pasif / statis	aktif / dinamis
13	Relasi	Sebagai guru / pendidik dan anak didik.	Sebagai teman – mitra sejajar

## **A.3. ATURAN MAIN FASILITATOR**

---

### **A.3.1. Kerja Dalam Tim**

Dalam bekerja di dalam sebuah tim fasilitator harus memiliki pembagian tugas yang jelas. Karena fasilitator dalam keberhasilannya membutuhkan bantuan orang lain, sehingga fasilitator harus bekerja sama dengan panitia atau fasilitator lain.

### **A.3.2. Tidak Menjatuhkan Martabat Peserta**

Seorang fasilitator harus mampu menjaga keadaan dan membuat suasana yang baik sehingga tidak diperkenankan untuk menjatuhkan martabat dan kehormatan peserta. Menyalahkan pendapat, menghina keadaan fisik, menyindir, membuat lelucon jorok, melontarkan kalimat berbau sara semuanya itu bisa menjatuhkan martabat peserta.

### **A.3.3. Membantu Sesama Fasilitator**

Meskipun dalam perannya sudah ada pembagian tugas yang jelas dalam tim fasilitator, namun tidak berarti akan membiarkan fasilitator lain berada dalam kesulitan. Ketika rekan fasilitator lain sedang tampil kita harus selalu memperhatikannya, jika ada sesuatu yang terlupakan atau grogi kita siap membantu dengan berbagai cara.

### **A.3.4. Hadir Secara Utuh**

Fasilitator harus hadir di setiap kesempatan saat bertugas. Menjadi Fasilitator harus siap mental dan fisik, karena peserta menuntut penampilan terbaik Fasilitator. Peserta akan selalu menilai keprofesionalan Fasilitator dalam setiap kesempatan dalam keadaan apapun sakit atau mengalami kekacauan pikiran dan perasaan. Begitu Tampil, Fasilitator harus fokus pada tanggung jawabnya. Rasa sakit, lelah, mengantuk harus ditahan. Hal-hal mengganggu pikiran dan perasaan harus disingkirkan.

### **A.3.5. Bersikap Adil**

Fasilitator akan dituntut untuk bersikap adil, Setiap peserta berhak mendapat perhatian sama dari Fasilitator. Mendengarkan dengan seksama dan menghargai setiap pendapat peserta. Pastikan juga setiap peserta punya kesempatan sama mengeluarkan pendapat. Memberi perhatian yang merata kepada seluruh peserta. Jangan hanya memperhatikan yang dikenal, yang ganteng atau cantik saja yang diberi perhatian. Semua peserta mempunyai nilai dan derajat yang sama. Jadi perlu perlakukan dengan adil.

### **A.3.6. Tidak Menyalahkan Pendapat**

Fasilitator tidak berhak menilai atau menentukan salah benar suatu pendapat. Biarlah peserta lain menilai pendapat itu. Menyalahkan pendapat peserta sama saja menjatuhkan martabatnya di depan umum. Fasilitator harus ingat bahwa dalam proses pembelajaran kadang-kadang ada peserta yang grogi atau susah menyampaikan pendapatnya. Peran kita adalah membuat mereka lebih bersemangat dan percaya diri. Pembelajaran bersama merupakan proses dengan asas saling menghormati; sehingga tidak ada seorangpun yang berhak mencemooh atau mengejek jawaban atau presentasi yang dilakukan orang lain.

### **A.3.7. Tidak Merasa Lebih Pintar**

Dalam perannya Fasilitator harus menjaga sikap tidak boleh merasa paling tinggi diantara peserta atau fasilitator yang lain. Berhati-hati dalam menghadapi peserta akan sangat penting karena sangat mungkin ada seseorang dari mereka jauh lebih memahami masalah atau bahkan lebih terampil menjadi Fasilitator.

### **A.3.8. Berbicara Jelas dan Gunakan Kalimat Tegas**

Fasilitator harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta. Selain itu harus memiliki intonasi yang biasa namun dapat mengatur suara agar dapat didengar oleh semua peserta, gunakan kalimat yang mengandung pengertian yang tegas.

### **A.3.9. Banyak Akal Mencairkan Suasana**

Fasilitator selalu melatih kelihaian mencairkan suasana, lelucon adalah salah satu dan cara ampuh untuk mencairkan suasana namun tidak membuang waktu terlalu banyak. Namun Fasilitator tidak boleh melupakan untuk tetap menjaga martabat peserta sehingga fasilitator sebaiknya memberikan lelucon yang bermutu dan tidak menyinggung peserta ataupun fasilitator yang lain. Fasilitator dapat juga dapat menggunakan permainan, menyanyi, atau gerakan senam dan lain sebagainya, akan tetapi harus mengingat waktu.

### **A.3.10. Mempunyai Rencana**

Fasilitator selalu memiliki rencana tertulis berisi urutan kegiatan proses fasilitasi. Rencana ini disusun berdasarkan kesepakatan fasilitator lain dan panitia.

### **A.3.11. Datang Lebih Awal**

Fasilitator datang lebih awal di lokasi untuk mempersiapkan dan melihat kondisi lingkungan sekitar. Banyak keuntungan diperoleh dengan hadir lebih awal beberapa menit sebelum peserta pertama. Fasilitator bisa leluasa mengatur ruangan, memastikan kesiapan peralatan pendukung, dan menunjukkan keseriusan.

### **A.3.12. Kenali Karakter Peserta**

Penting bagi Fasilitator untuk mengenali karakter peserta karena akan menentukan strategi yang akan dibuat. Untuk itu salah satu manfaat dari datang lebih awal adalah berkenalan dan mengobrol dengan peserta dapat membantu mengenali karakter mereka. Kalau waktu sempit, tanyakan pada panitia, siapa saja pesertanya dan bagaimana latar belakang mereka.

### **A.3.13. Tidak Menjawab Pertanyaan**

Fasilitator perlu mengingat bahwa fasilitator bukanlah guru, dosen, ahli, atau pelatih, untuk itu jika ada pertanyaan dari peserta maka sebaiknya pertanyaan tersebut dilemparkan kepada peserta lainnya. Setelah terjadi interaksi tanya jawab antar peserta, lakukan pemantauan, ikuti alurnya, kendalikan agar arah diskusi tidak melenceng.

### A.3.14. Sikap Tubuh

Sebagai Fasilitator maka perlu kepercayaan diri untuk menunjukkannya maka badan harus selalu menghadap ke peserta, Jangan pernah membelakangi peserta walaupun harus menulis di papan atau menyimak bahan tayang di layar. Membelakangi peserta sama saja tidak menghargai keberadaan mereka. Arahkan pandangan mata ke arah peserta secara bergantian. Jadikan mata sebagai radar pemantau peserta. Mengarahkan pandangan mata secara merata ke seluruh peserta akan membuat mereka merasa dihargai. Jangan pernah sekali pun berbicara dengan membuang pandangan mata ke langit-langit, lantai, atau jendela. Itu sikap orang tidak percaya diri atau sedang berbohong.

## A.4. SITUASI MENANTANG BAGI FASILITATOR

Seorang fasilitator akan menjumpai hal-hal yang menantang dan dituntut untuk mampu menangani dengan sebaik mungkin. Tantangan tersebut bisa datang dari mana saja baik dari fasilitator sendiri ataupun peserta:

### A.4.1. Peserta Pasif

Bagi fasilitator peserta pasif merupakan tantangan terberat yang paling sering dijumpai. Peserta pasif yang dimaksudkan disini adalah peserta hanya diam tidak merespon pertanyaan Fasilitator. Dimintai pendapat, mereka diam membisu. Ditanya apakah sudah memahami topik pembicaraan, tidak ada jawaban. Sikap pasif peserta bisa terjadi karena banyak penyebab. Berikut ini beberapa contoh penyebab peserta pasif, cara mendeteksi dan alternatif solusinya.

Tabel 2 Sikap Peserta

Penyebab Peserta Pasif	Cara Mendeteksi	Alternatif Solusi
Karena tidak memahami tujuan dan hasil pertemuan/pelatihan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minta semua peserta menuliskan tujuan dan hasil pertemuan/pelatihan pada selembar kertas, biarkan mereka menulis bebas sepengetahuan mereka</li><li>2. Kumpulkan jawaban lalu simpulkan apakah mereka sudah paham. Jika belum, lanjut ke solusi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jelaskan tujuan dan hasil pertemuan/pelatihan</li><li>2. Mintalah setiap peserta menuliskan pada selembar kertas tentang harapan-harapan mereka setelah mengikuti pertemuan/pelatihan, lakukan pengelompokan dan pembahasan.</li></ol>

Penyebab Peserta Pasif	Cara Mendeteksi	Alternatif Solusi
Karena tidak terbiasa mengungkapkan pendapat, malu, bingung merangkai kata.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berikan satu pertanyaan tentang masalah atau kekhawatiran mereka pada bencana.</li> <li>2. Mintalah setiap peserta menuliskan jawaban pada selembar kertas lalu kumpulkan</li> <li>3. Lakukan penilaian diam-diam. Jika mereka menjawab panjang lebar secara tertulis, maka lanjutkan ke solusi.</li> </ol>	Selalu meminta pendapat peserta disampaikan secara tertulis.
Karena sulit memahami alur pembicaraan dan kata-kata Fasilitator.	Bagikan lembar penilaian Fasilitator (lampiran), lalu lihat hasilnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuliskan alur pembicaraan dan jelaskan.</li> <li>2. Atur/perlambat kecepatan bicara.</li> <li>3. Gunakan kata-kata mudah dimengerti.</li> </ol>
Karena Fasilitatornya galak, takut salah, dimarahi atau dihukum.	Bagikan lembar penilaian Fasilitator (lampiran), lalu lihat hasilnya.	Lakukan pendekatan, akrabkan diri dan cairkan suasana dengan lelucon.

#### **A.4.2. Peserta Mendominasi Pembicaraan**

Jika ada beberapa peserta sudah terlalu sering mengeluarkan pendapat, berikan himbauan lisan secara sopan agar ia memberi kesempatan berpendapat pada peserta lain. Mintalah peserta untuk tidak memotong atau menyela saat peserta lain sedang mengajukan pendapat.

#### **A.4.3. Forum dalam Forum**

Sering dijumpai dalam beberapa pertemuan sering ada peserta mengobrol atau membuat forum sendiri pada saat Fasilitator memberikan penjelasan atau ada peserta mengajukan pendapat, segera lakukan tindakan. Pertama dengan peringatan lisan. Jika tidak mempan, dekati posisi duduk mereka, lalu lanjutkan penjelasan.

## A.5. JENIS PERTANYAAN FASILITATOR

Pertanyaan fasilitator menjadi kunci hidup diskusi yang “hidup”. Fasilitator selalu memancing pertanyaan untuk menghidupkan diskusi. Kemampuan fasilitator membuat pertanyaan menjadi penting. Ada beberapa contoh dan jenis-jenis pertanyaan pemancing diskusi:

Tabel 3. Jenis Pertanyaan dan Contohnya

Jenis Pertanyaan	Keterangan/Contoh Pertanyaan
Pertanyaan Terbuka	Pertanyaan ini memiliki jawaban yang terbuka dan tidak mengharapkan jawaban 'ya' atau 'tidak'. Contoh:"Kenapa bapak belum makan?"
Pertanyaan Tertutup	Pertanyaan ini memiliki jawaban yang sudah jelas dan tegas. Contoh ; "Kita harus sedia payung sebelum.....?"
Pertanyaan Peningat	Pertanyaan ini bertujuan untuk memberikan dan merangsang ingatan.Pertanyaan ini akan memunculkan jawaban berupa gambaran peristiwa masa sebelumnya. Contoh:"Bagaimana kejadian erupsi gunung Merapi tahun 2010? Bagaimana cara masyarakat menyelamatkan diri pada saat erupsi Gunung Merapi tahun 2010?"
Pertanyaan Analitis	Pertanyaan Analitis ini memiliki jawaban yang berupa analisis sebab-akibat dari suatu peristiwa. Contoh : " Apa dampak yang ditimbulkan dari erupsi gunung Merapi tahun 2010 lalu?"
Pertanyaan Proyektif	Pertanyaan ini memiliki jawaban yang berupa perkiraan kejadian di masa mendatang. Contoh : "Erupsi tahun depan seberapa besar dan kapan bisa terjadi?"
Pertanyaan Terlarang	Pertanyaan jenis ini adalah pertanyaan yang tidak boleh digunakan oleh Fasilitator. Contoh : ' Kalau erupsi bapak-ibu harus mengungsi, ya atau ya?"



## A.6. MENYUSUN RENCANA FASILITASI

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa seorang Fasilitator harus membuat rencana fasilitasi. Rencana fasilitasi ini harus disusun bersama dengan rekan fasilitator dan panitia agar dapat mengerti tentang tugasnya. Rencana fasilitasi seperti contoh di bawah ini memberikan gambaran garis besar proses fasilitasi. Masing-masing Fasilitator masih harus menyusun rencana secara rinci sesuai topik tanggung jawabnya.

Tabel 2. Contoh Rencana Fasilitasi

Topik	Fasilitator	Metode	Hasil	Waktu (menit)	Alat/Bahan
Pembukaan dan sambutan	Panitia				
Orientasi pelatihan	Yoram	Penjelasan Fasilitator Curah pendapat	Disepakatinya tujuan, hasil, harapan peserta pelatihan	90	
Aturan main dan pengaturan waktu	Yoram	Penjelasan Fasilitator Curah pendapat	Disepakatinya peraturan, waktu mulai, istirahat, dan selesai	60	
Topik 1. Peran Fasilitator	Meri	Penjelasan, curah pendapat, diskusi kelompok	Peserta memahami tugas dan peran Fasilitator Dihasilkannya lembar diskusi kelompok tentang tugas dan peran Fasilitator	120	
Topik 2. Aturan main Fasilitator	Yoram	Penjelasan dan curah pendapat	Peserta memahami aturan main Fasilitator	120	
Topik 3. Menyusun rencana fasilitasi	Ridwan	Penjelasan, curah pendapat dan diskusi kelompok	Peserta memahami perlunya rencana fasilitasi Peserta mampu menyusun rencana fasilitasi Dihasilkannya rencana fasilitasi per kelompok	160	
Topik 4. Simulasi	Yoram dan Meri	Praktek per kelompok	Terbentuknya kelompok praktek Tersusunnya rencana fasilitasi per kelompok Terlaksananya praktek simulasi berkelompok	340	
Rencana tindak lanjut	Ridwan	Curah pendapat	Disepakatinya rencana tindak lanjut kegiatan	50	

## **A.7. MELAKUKAN SIMULASI DAN PERSIAPAN FASILITASI**

---

Fasilitator perlu melakukan simulasi atau micro teaching untuk melatih kemampuan fasilitator. Simulasi ini dilakukan menggunakan rencana fasilitasi dan melibatkan seluruh anggota tim fasilitator sebagai penilai.

Persiapan untuk fasilitasi ini sangat perlu dilakukan untuk menghindari kemungkinan kegagalan dan mempermatang rencana fasilitasi. Persiapan dari fasilitator ini adalah sebagai berikut :

1. Mengerti dengan persis tujuan lokakarya atau seminar atau pelatihan yakni pembelajaran bersama agar kita secara bersama-sama menjadi lebih tahu, lebih mengerti dan dapat melakukan lebih banyak. Tentunya hal ini dilakukan dengan perilaku yang baik.
2. Membuat silabus atau menguasai silabus agar kita menguasai konteks diskusi dan dialog sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Silabus adalah garis besar atau isi atau topik-topik yang akan dibahas dalam keseluruhan proses.
3. Mengerti dengan jelas jenis lokakarya/seminar ataupun pelatihan yang akan difasilitasi. Karena suatu orientasi akan berbeda dengan kursus dasar atau TOT. Sehingga kedalaman maupun metodologi yang digunakan pada saat membahas suatu topik akan berbeda juga.
4. Mengerti situasi dan kondisi yang akan difasilitasi. Misal jumlah peserta, komposisi laki dan perempuan, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan pengalaman dalam bidang yang menjadi topik, rata-rata umur, status perkawinan, jumlah anak, dsb. Sehingga psikologi peserta dapat diketahui.
5. Kenali karakter peserta, karena setiap peserta memiliki kondisi yang berbeda ada yang menonjol dalam pengetahuan, logika, analisa, sintesis, dsb. Ada juga yang cenderung mendominasi atau menjadi peserta bermasalah. Fasilitator perlu melakukan pendekatan khusus agar mereka rela untuk lebih bersabar dan memberi kesempatan yang lain untuk belajar.
6. Siapkan lembar kehadiran (presensi) untuk memonitor tingkat kehadiran setiap peserta. Gunanya untuk mencari penyebab dan solusi penurunan tingkat kehadiran terutama untuk kelas.
7. Sebelum lokakarya dimulai yakinkan bahwa pembagian sesi cukup berimbang antara teori dan praktek, antara ceramah dan diskusi atau curah pendapat, kecuali untuk ilmu-ilmu atau pengetahuan baru.
8. Siapkan modul atau rencana fasilitasi yang berisi langkah demi langkah proses untuk mengantar proses agar berjalan runtut dan semua topik atau materi yang akan dibahas tidak terlewatkan. Namun ingat bahwa kita harus siap untuk menghadapi perubahan dan perbaikan.
9. Siapkan bahan yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Buatlah daftar kebutuhan bahan dan yakinkan bahwa bahan-bahan tersebut ada atau dapat dibeli di lokasi. Apabila ragu-ragu, siapkan sejak dari kota asal. (misalnya kertas plano/flipchart, spidol berbagai ukuran, metaplan, tali, dll.)

10. Siapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Bikin List kebutuhan alat dan yakinkan bahwa alat-alat tersebut ada atau tersedia di lokasi. Apabila ragu-ragu, bawa atau siapkan sejak dari kota asal. Misalnya, OHP, LCD proyektor, layar, dsb. Tidak semua hotel mengizinkan spreinya dipakai untuk layar.
11. Siapkan fisik dan mental sebelum memfasilitasi. Makan dan tidur cukup merupakan resep utama. Karaoke, belanja atau jalan-jalan dapat dilakukan setelah acara selesai. Walaupun sering terjadi acara belum selesai taksi sudah membunyikan klakson untuk siap membawa kita ke bandara. Yakinkan diri bahwa lain kali bisa kembali! Sehingga tidak begitu kecewa. Ingat peserta merasa tidak nyaman difasilitasi oleh orang yang mengantuk, terkena flu atau batuk. Catatan: Seringkali Fasilitator jatuh sakit karena lupa makan atau kurang tidur.
12. Yakinkan bahwa pembagian sesi cukup berimbang antara teori dan praktek, antara ceramah dan diskusi atau curah pendapat, kecuali untuk ilmu atau pengetahuan baru.
13. Siapkan modul atau rencana fasilitasi yang berisi langkah demi langkah agar proses berjalan lancar dan semua topik atau materi yang akan dibahas tidak terlewatkan. Namun ingat bahwa kita harus siap untuk menghadapi perubahan untuk perbaikan, dan ingat pepatah tiada gading yang tak retak.
14. Bentuk tim Fasilitator. Memfasilitasi sendiri memerlukan tenaga dan pikiran ekstra dan akan sangat melelahkan. Apabila terpaksa melakukan sendiri, bentuk tim perumus yang akan membantu dalam penulisan proses dan juga kesimpulan-kesimpulan akhir.
15. Sebelum dimulai, diskusikan dengan kolega atau tim fasilitator tentang apa yang akan dibawakan dan tanyakan hal-hal yang perlu digarisbawahi dalam sesi yang akan dibawakan.
16. Cek alat-alat yang akan digunakan sebelum sesi dimulai. Persiapan yang baik akan memperlancar proses pembelajaran.
17. Cek apakah tayangan-tayangan dapat dilihat dengan jelas oleh seluruh peserta terutama yang duduk dibelakang.
18. Cek gaung dan kejelasan suara apabila memakai sound system. Kalau sound system rusak atau kurang baik minta teknisi memperbaiki. Apabila tidak bisa, lebih baik tanpa sound system apabila ruang tidak begitu besar.
19. Cek tata ruang sebelum acara dimulai dan lakukan penyesuaian dengan proses yang akan dilalui. Misalnya, untuk diskusi kelompok atau permainan, dsb.

## **A.8. PADA SAAT FASILITASI DAN SETELAH SESI**

---

Pada saat melakukan fasilitasi hendaknya segala persiapan di simulasi dan kekurangannya perlu dipersiapkan untuk memperlancar proses fasilitasi.

1. Usahakan Fasilitator hadir sebelum peserta hadir atau paling tidak 15 menit sebelum jadwal.
2. Siapkan materi, baik flipchart, transparansi, maupun slide agar tidak bingung pada saat dibutuhkan

3. Yakinkan semua peserta atau sebagian besar peserta telah hadir dan duduk ditempat yang telah ditentukan
4. Yakinkan bahwa mereka telah mengisi daftar hadir yang telah disiapkan
5. Sampaikan bahwa acara segera dimulai dan tanyakan apakah semua siap?
6. Mulailah acara dengan salam dan ucapan selamat pagi atau siang atau malam.
7. Jangan lupa perkenalkan diri kalau baru pertama kali.
8. Jelaskan topik sesi ini dan tayangkan maksud dan tujuan agar semua mempunyai pemahaman dan tujuan yang sama, sehingga diskusi tidak melebar.
9. Ingat selalu “apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Fasilitator” yang dibahas di awal sesi ini.
10. Kontrol waktu sehingga semua topik yang harus disampaikan dapat dilaksanakan.
11. Sebelum sesi ditutup jangan lupa untuk mengecek tujuan sesi. Tayangkan kembali dan tanyakan kepada peserta apakah tujuan sesi telah tercapai. Apabila belum tegaskan bagian yang mana dan kenapa belum tercapai. Kemudian diskusikan bersama bagaimana mengatasinya. Bisa dilanjutkan, mengambil waktu istirahat atau dibahas di pertemuan berikutnya.
12. Jangan lupa mengucapkan terima kasih atas partisipasi segenap peserta dan memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Tentunya dalam setiap fasilitasi akan dibagi menjadi beberapa sesi dan di dalam setiap sesi itu akan ada jeda (break) sehingga fasilitator perlu melakukan beberapa hal setelah sesi berakhir yaitu :

1. Setelah sesi selesai, bereskan kertas-kertas, flipchart dan juga alat-alat yang tidak dibutuhkan sehingga mempermudah proses selanjutnya
2. Catatan-catatan penting baik tentang proses maupun hasil harus dikumpulkan dan disimpan dengan baik. Kalau mungkin ditempel di dinding sehingga sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali
3. Istirahat sejenak sebelum memulai sesi berikut.
4. Kalau mungkin dilakukan secara selang-seling dengan tim Fasilitator yang lain agar tidak terlalu capai dan sekaligus mencegah kemungkinan timbulnya rasa bosan peserta.

## B. Praktik Pembelajaran

### B.1. MENGURAIKAN TUJUAN PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

---

Mereview materi yang disampaikan/dibaca sebelumnya, menguraikan tujuan pembelajaran dan indikator keberhasilan. Pada kegiatan ini peserta memperhatikan, mencatat, berdiskusi dan bertanya-jawab.

### B.2. MENJELASKAN PENGERTIAN, TUGAS, FUNGSI, ATURAN MAIN, PERTANYAAN KUNCI FASILITASI

---

Peserta berdiskusi dan berkelompok, mendengarkan pendapat orang lain dan sesama anggota kelompok. Untuk membantu kelancaran curah pendapat dan diskusi maka perlu beberapa hal yang diperhatikan:

1. Memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengemukakan pandangan/ pendapat tentang pengertian, tugas, fungsi, aturan main, dan pertanyaan-pertanyaan kunci fasilitasi sesuai dengan pengetahuan masing-masing.
2. Menuliskan semua pandangan/pendapat setiap orang dalam kelompok sesuai dengan yang diungkapkannya.
3. Mengidentifikasi jawaban yang berdekatan maknanya secara tepat.
4. Menentukan pilihan pernyataan yang paling mendekati.
5. Bersama-sama dengan anggota kelompok merumuskan hasil curah pendapat

### B.3. MENJELASKAN RENCANA DAN PRAKTIK FASILITASI

---

Setelah mempelajari tentang pengertian, tugas, fungsi, aturan main, dan pertanyaan-pertanyaan kunci fasilitasi, peserta diminta untuk melakukan rencana fasilitasi dan praktek fasilitasi. Peserta diminta untuk berkelompok agar mempermudah pelaksanaan perencanaan dan praktik fasilitasi. Dalam perencanaan fasilitasi dan dituliskan pada Lembar Kerja (LK) sesuai dengan kesepakatan kelompok.

Tabel 3 Lembar Kerja Perencanaan Fasilitasi

Topik	Fasilitator	Metode	Hasil	Waktu (menit)	Alat/ Bahan

#### **B.4. EVALUASI (PENGUATAN) MATERI DENGAN TANYA JAWAB**

---

Setelah melakukan perencanaan fasilitasi dan mempraktekkannya maka kegiatan terakhir dari pembelajaran ini adalah evaluasi materi dan tanya jawab. Peserta akan memberikan penilaian dan bertanya jawab dengan peserta lain maupun fasilitator untuk memperkaya pengetahuan.

## Daftar Pustaka

Anonim, 2007, Undang Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Anonim, 2012, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

Pariyono, ET & Purwanto, S (Ed.), 2010, Panduan Fasilitator Wajib Latih Penanggulangan Bencana Gunungapi, PSMB UPN 'Veteran' Yogyakarta.



2021

ISBN 978-603-5330-10-0



9 786235 539539